



SALINAN

# **BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN**

No. 26, 2021

PEMERINTAH  
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

**PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0112);
12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 67);
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan.
7. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

RKPD Tahun 2022 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 3

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2021 terdiri dari:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi daerah;
  - c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
  - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
  - e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
  - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - g. penutup.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 7 Juli 2021

WALI KOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan  
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 26

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Ciputat, 16 Juli 2021  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani



# RKPD

## Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan

**“Percepatan implementasi Tangsel Unggul,  
Kreatif, Inovatif, Layak huni dan Saling Terkoneksi”**

TAHUN 2022

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>I</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>III</b>
<b>1. BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. DASAR HUKUM.....	1
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .....	3
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN .....	4
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
<b>2. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>6</b>
2.1. KONDISI UMUM DAERAH .....	6
2.1.1. <i>Aspek Geografi dan Demografi</i> .....	6
2.1.2. <i>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</i> .....	17
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	17
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	21
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga.....	25
2.1.3. <i>Aspek Pelayanan Umum</i> .....	26
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib.....	26
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan .....	32
2.1.4. <i>Aspek Daya Saing Daerah</i> .....	32
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD ..	38
2.2.1. <i>Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2020</i> .....	38
2.2.2. <i>Evaluasi Capaian RPJMD sampai Tahun 2020</i> .....	40
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	77
2.3.1. <i>Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah</i> .....	77
2.3.2. <i>Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah</i> .....	78
<b>3. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	<b>79</b>
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH.....	79
3.1.1. <i>Pertumbuhan Ekonomi Nasional</i> .....	79
3.1.2. <i>Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten</i> .....	80
3.1.3. <i>Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan</i> .....	82
3.1.4. <i>Penanggulangan COVID-19</i> .....	86
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	87
3.2.1. <i>Arah Kebijakan Pendapatan</i> .....	89
3.2.2. <i>Arah Kebijakan Belanja Daerah</i> .....	94
3.2.3. <i>Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah</i> .....	105
3.3. INOVASI DAERAH .....	107
3.3.1. <i>Pemanfaatan Inovasi Daerah</i> .....	107
3.3.2. <i>Potensi Pengembangan Inovasi Daerah</i> .....	108
<b>4. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b> .....	<b>110</b>
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN.....	110
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022 .....	113
4.2.1. <i>Penelaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022</i> .....	113
4.2.2. <i>Penelaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2022</i> .....	114
4.2.3. <i>Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i> .....	115
4.2.4. <i>Hasil Musrenbang</i> .....	117
4.2.5. <i>Isu Strategis</i> .....	121
4.2.6. <i>Prioritas Pembangunan Tahun 2022</i> .....	122
4.3. SINKRONISASI PRIORITAS KOTA TANGERANG SELATAN TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI .....	124

<b>5.</b>	<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....</b>	<b>131</b>
5.1.	PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS RKPD TAHUN 2022.....	131
<b>6.</b>	<b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....</b>	<b>164</b>
6.1.	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	164
6.2.	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD).....	166
	<b>BAB VII PENUTUP.....</b>	<b>181</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Kota Tangerang Selatan .....	7
Tabel 2.2.	Bentuk Lahan dan Jenis Tanah di Kota Tangerang Selatan .....	8
Tabel 2.3.	Kejadian Bencana pada Tahun 2020.....	10
Tabel 2.4.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 .....	13
Tabel 2.5.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 .....	14
Tabel 2.6.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020.....	14
Tabel 2.7.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 .....	15
Tabel 2.8.	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan.....	16
Tabel 2.9.	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020.....	18
Tabel 2.10.	Daftar Sarana dan Prasarana Olahraga di Tangserang Selatan .....	25
Tabel 2.11.	Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020 .....	26
Tabel 2.12.	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020.....	27
Tabel 2.13.	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020 .....	29
Tabel 2.14.	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020 .....	29
Tabel 2.15.	Rekapitulasi Cakupan Rumah Layak Huni Per-Kecamatan di Kota Tangerang Selatan, Tahun 2021 .....	30
Tabel 2.16.	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020 .....	31
Tabel 2.17.	Capaian Kinerja Urusan Sosial Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020 .....	31
Tabel 2.18.	Capaian Kinerja Pariwisata Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020.....	32
Tabel 2.19.	Capaian Kinerja Pertanian Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020.....	32
Tabel 2.20.	Derajat Keterbukaan Ekonomi Kota Tangerang Selatan 2016-2020.....	33
Tabel 2.21.	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kota Tangerang Selatan, 2016-2020 .....	34
Tabel 2.22.	Nilai Koefisien ICOR Kota Tangerang Selatan, 2010-2019.....	37
Tabel 2.23.	Persentase Penduduk Berumur 15 tahun Ke atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin.....	38
Tabel 2.24.	Rekapitulasi Realisasi Fisik Dan Keuangan RKPD s.d Triwulan IV TA 2020 .....	38
Tabel 2.25.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD s.d Tahun 2020.....	43
Tabel 3.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020.....	79
Tabel 3.2.	Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia .....	80
Tabel 3.3.	Realisasi LPE Triwulanan dan Tahunan Nasional dan Banten .....	81

Tabel 3.4.	Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 (dalam Persen).....	83
Tabel 3.5.	Proyeksi Inflasi Nasional, Banten dan Kota Tangerang Selatan.....	85
Tabel 3.6.	Perkiraan TPT Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 (dalam persen).....	85
Tabel 3.7.	Proyeksi Persentase Kemiskinan Nasional, Banten dan Kota Tangerang.....	86
Tabel 3.8.	Rencana Aksi Penanggulangan COVID-19.....	87
Tabel 3.9.	Target/Proyeksi APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 - 2022.....	88
Tabel 3.10.	Realisasi dan Target/Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 s.d. Tahun 2022.....	93
Tabel 3.11.	Mandatoty spending Kota Tangerang Selatan TA 2022.....	94
Tabel 3.12.	Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:.....	104
Tabel 3.13.	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2018 s.d. tahun 2022.....	106
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022.....	112
Tabel 4.2.	Rumusan Usulan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD.....	115
Tabel 4.3.	Rumusan Usulan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2021.....	117
Tabel 4.4.	Isu Strategis.....	121
Tabel 4.5.	Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah/Fokus Daerah dengan Prioritas Provinsi dan Nasional.....	124
Tabel 4.6.	Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Tahun 2022.....	124
Tabel 5.1.	Rekapitulasi Pagu Belanja Daerah Tahun 2022.....	131
Tabel 5.2.	Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022.....	133
Tabel 5.3.	Daftar Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022.....	160
Tabel 6.1.	Indikator Makro Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022.....	164
Tabel 6.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tangerang Selatan Tahun 2022.....	164
Tabel 6.3.	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2022.....	166

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur Penyusunan RKPD Tahun 2022 .....	3
Gambar 1.2.	Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Kab/Kota dan OPD.....	4
Gambar 2.1.	Peta Wilayah Administratif Kota Tangerang Selatan .....	7
Gambar 2.2.	Jumlah Hari Hujan Kota Tangerang Selatan .....	9
Gambar 2.3.	Peta Rawan Bencana Banjir Kota Tangerang Selatan .....	10
Gambar 2.4.	Peta Rawan Bencana Longsor .....	11
Gambar 2.5.	Distribusi Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 .....	16
Gambar 2.6.	Distribusi Persentase PDRB Kota Tangerang Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020.....	18
Gambar 2.7.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2020 .....	18
Gambar 2.8.	PDRB Per Kapita di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2020 .....	20
Gambar 2.9.	Angka Inflasi Tahunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2020 .....	20
Gambar 2.10.	Indeks Gini Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2020.....	21
Gambar 2.11.	Tingkat Kemiskinan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020.....	22
Gambar 2.12.	Nilai TPAK Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 – 2020 .....	22
Gambar 2.13.	TPT Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2020 .....	23
Gambar 2.14.	Angka Harapan Hidup di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2020.....	24
Gambar 2.15.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020.....	24
Gambar 2.16.	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tangerang Selatan 2016-2020.....	25
Gambar 2.17.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Tangerang Selatan 2016-2020.....	34
Gambar 2.18.	Permasalahan Pokok Kota Tangerang Selatan .....	77
Gambar 3.1.	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 - 2026 .....	84
Gambar 3.2.	Proyeksi Inflasi Kota Tangerang Selatan 2021 - 2026 .....	84
Gambar 3.3.	Proyeksi Angka Pengangguran Terbuka (%) Kota Tangerang Selatan.....	85
Gambar 3.4.	Proyeksi Angka Tingkat Kemiskinan Kota Tangerang Selatan .....	86
Gambar 4.1.	Posisi RKPD 2022 dalam Rancangan Awal RPJMD 2021-2022.....	112
Gambar 4.2.	Keselarasn Prioritas Pembangunan Daerah/Fokus Daerah dengan Prioritas Provinsi dan Nasional.....	124

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang selanjutnya disebut dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sebagai dokumen perencanaan daerah tahunan, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Mengingat pada tahun 2021 Kota Tangerang Selatan memasuki masa transisi pergantian kepala daerah maka RKPD Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ, yang mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen RKPD 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025 juga mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepada Daerah serentak tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022.

Selain mempedomani Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ, beberapa materi RKPD Tahun 2022 juga telah diselaraskan dengan Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026.

## 1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

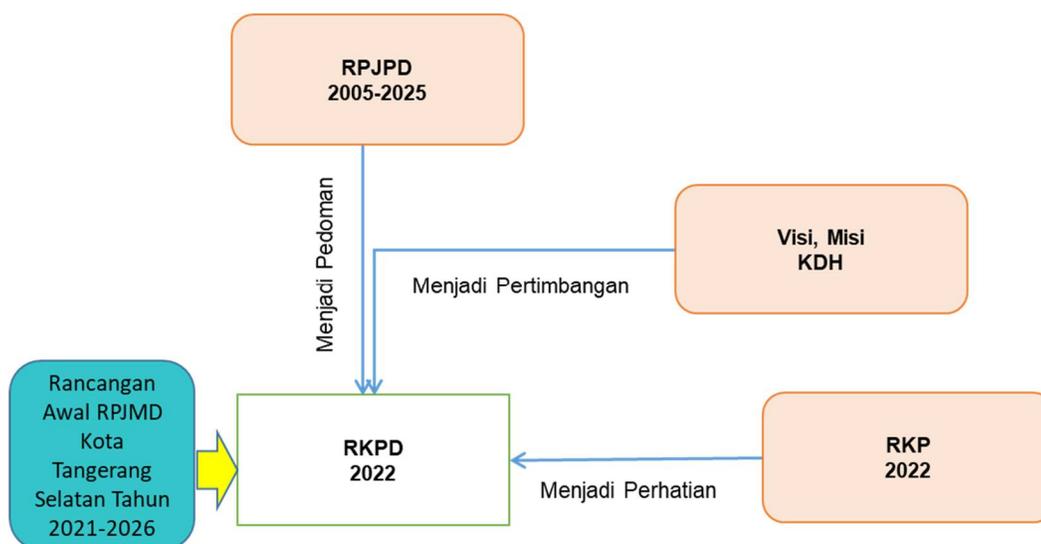
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah);
4. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang SPM;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Surat Edaran Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 21 Tahun 2021 tentang RKPD Tahun 2022 Provinsi Banten.

19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0112);
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
22. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

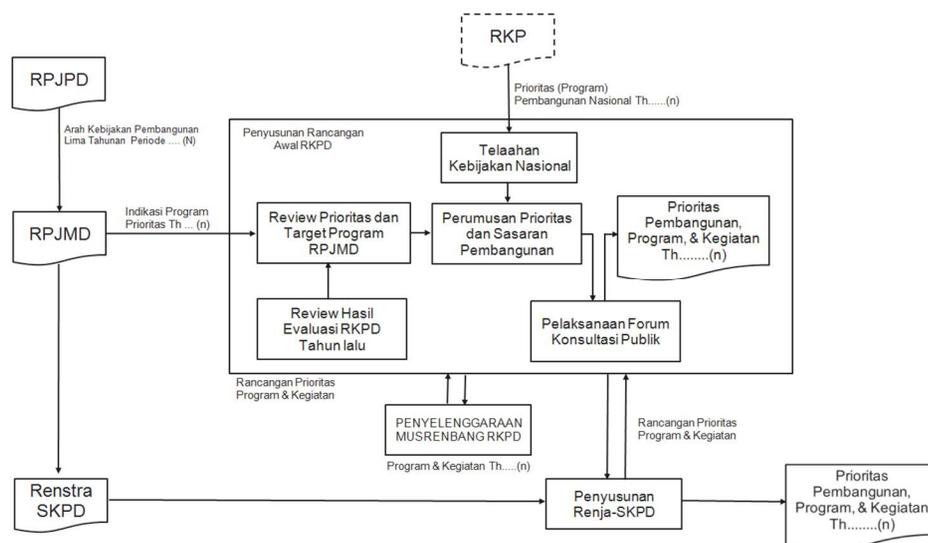
Sebagaimana Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ, bahwa RKPD tahun 2022 bagi Daerah dengan masa berlaku dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah selesai pada tahun 2021 tetap harus sinergi dengan dokumen perencanaan penganggaran lainnya sebagaimana ketentuan perencanaan penganggaran yang berlaku.

Meski dalam masa transisi, RKPD tetap akan menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan selanjutnya RKPD akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Tangerang Selatan tahun 2022 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tangerang Selatan tahun 2022 sebagaimana alur pada Gambar 1.1. dan 1.2.



Sumber : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 640/16/SJ

Gambar 1.1. Alur Penyusunan RKPD Tahun 2022



Sumber : Undang-undang 25 Tahun 2004

Gambar 1.2. Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Kab/Kota dan OPD

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang selaras dengan agenda dan program prioritas pemerintah dan pemerintah provinsi Banten tahun 2022 dan juga sebagai landasan penetapan program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2022 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 dengan tujuan pembangunan daerah tahun 2022 tercapai sesuai target perencanaan.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen RKPD disusun dengan mempedomani ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 disampaikan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat dan menjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD serta sistematika penulisan dokumen RKPD.

##### **BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini memuat dan menjelaskan Kondisi Umum Daerah saat ini seperti geografis, demografis, sosial ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing, Gambaran pelaksanaan RKPD tahun 2020 dan capaian RPJMD s.d Tahun 2020 serta mengungkapkan permasalahan daerah.

##### **BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini memuat dan menjelaskan tentang kondisi perekonomian tahun 2020 dan perkiraan tahun 2021 dan 2022, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### **BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini memuat dan menjelaskan perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

#### **BAB V : RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN DAERAH**

Bab ini memuat dan menjelaskan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam rancangan awal RPJMD dengan memperhatikan visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Edaran Menteri Dalam Negeri Nomo 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021.

#### **BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini memuat dan menjelaskan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

#### **BAB VII: PENUTUP**

Bab ini memuat dan menjelaskan kaidah pelaksanaan umum dan pengorganisasian pelaksanaan agenda pembangunan di Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2022.

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. Kondisi Umum Daerah

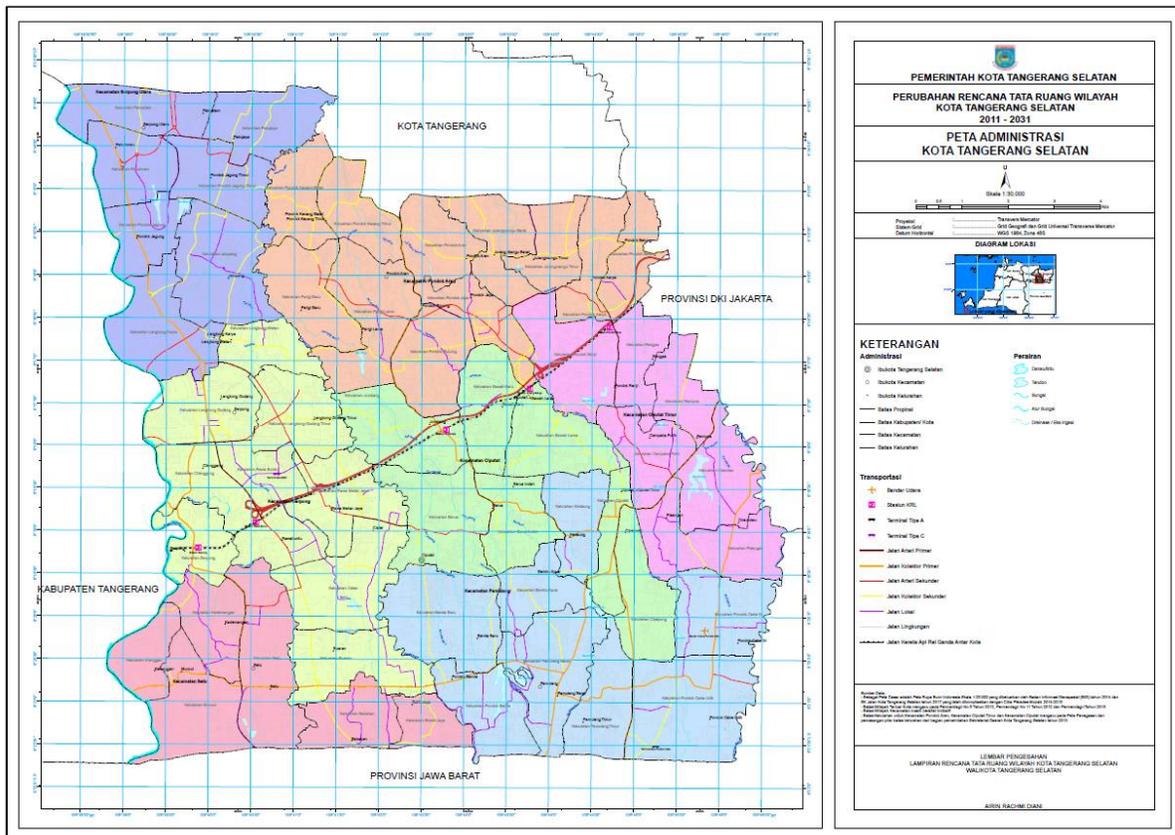
#### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pembentukan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom pada tahun 2008 merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemerintahan, pengembangan potensi daerah, serta pembangunan kota. Kota Tangerang Selatan terbentuk melalui hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

Kota Tangerang Selatan terbagi menjadi 7 (tujuh) Kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan. Terletak di bagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106°38' – 106°47' Bujur Timur dan 06°13'30" – 06°22'00" Lintang Selatan, Kota Tangerang Selatan memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang

Posisi tersebut menjadikan Tangerang Selatan sebagai kota yang berpotensi strategis secara ekonomi karena menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat (termasuk didalamnya kawasan Megapolitan Jabodetabek). Berikut merupakan peta administratif Kota Tangerang Selatan:



Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Kota Tangerang Selatan

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 - 2031

Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah sebesar 164,85 kilometer persegi (km<sup>2</sup>) (Perubahan dari angka 147,9 Km<sup>2</sup> berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031). Kecamatan Pondok Aren menempati posisi dengan luas wilayah terbesar yaitu 29,79 Km<sup>2</sup> sebesar 18,1 persen dari luas kota, sedangkan Kecamatan Setu menempati posisi dengan luas wilayah paling kecil, yaitu sebesar 16,76 Km<sup>2</sup>, sekitar 10,2 persen dari luas kota. Keterangan luas lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Kota (%)
1	Serpong	28,27	17,15%
2	Serpong Utara	22,36	13,56%
3	Ciputat	21,11	12,81%
4	Ciputat Timur	17,81	10,81%
5	Pamulang	28,74	17,43%
6	Pondok Aren	29,79	18,1%
7	Setu	16,76	10,2%
<b>Kota Tangerang Selatan</b>		<b>164,85</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011 – 2031

### a. Topografi

Jika dilihat dari topografi sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan dataran rendah, dimana sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0 – 3% sedangkan ketinggian wilayah antara 0 – 25 m dpl.

Untuk kemiringan pada garis besarnya terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Kemiringan antara 0 – 3% meliputi Kecamatan Ciputat, kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara.
2. Kemiringan antara 3 – 8% meliputi Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Setu.

## b. Geologi

Berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, kawasan Tangerang selatan didominasi oleh kawasan yang termasuk pada zona kerentanan gerakan tanah yang rendah dan sangat rendah untuk di beberapa kawasan yang mendekati daerah Kota Tangerang. Sedangkan zona kerentanan gerakan rendah ditemui pada kawasan tepi sungai. Kondisi geologi menurut Peta Lembar Jakarta dan Kepulauan Seribu Nomor 1209 tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Direktorat Geologi Departemen Pertambangan dan Energi, secara umum dibentuk oleh dua formasi batuan, yaitu :

- Batuan Aluvium (Qa) yang terdiri dari aluvial sungai dan rawa yang berbentuk pasir, lempung, lanau, kerikil, kerakal dan sisa tumbuhan. Jenis tanah ini pada dasarnya merupakan lapisan yang subur bagi tanaman pertanian.
- Batuan Gunung Api yang berupa material lepas yang terdiri dari lava andesit, dasit, breksi tuf dan tuf. Secara fisik Lava Andesit berwarna kelabu hitam dengan ukuran sangat halus, afanitik dan menunjukkan struktur aliran, dan Breksi Tuf dan Tuf pada umumnya telah lapuk, mengandung komponen Andesit dan Desit. Pada umumnya tanah jenis ini digunakan sebagai kebun campuran, perumahan dan tegalan.

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang relatif datar. Adapun pada beberapa Kecamatan terdapat lahan yang bergelombang seperti di perbatasan antara Kecamatan Setu dan kecamatan Pamulang serta sebagian di kecamatan Ciputat Timur. Kondisi geologi Kota Tangerang Selatan umumnya adalah batuan alluvium, yang terdiri dari batuan lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah. Berdasarkan klasifikasi dari *United Soil Classification System*, batuan ini mempunyai kemudahan dikerjakan atau *workability* yang baik sampai sedang, unsur ketahanan terhadap erosi cukup baik oleh karena itu wilayah Kota Tangerang Selatan masih cukup layak untuk kegiatan perkotaan.

Dilihat dari sebaran jenis tanahnya, pada umumnya di Kota Tangerang Selatan berupa asosiasi latosol merah dan latosol coklat kemerahan yang secara umum cocok untuk pertanian/perkebunan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya makin banyak yang berubah penggunaannya untuk kegiatan lainnya yang bersifat non-pertanian. Untuk sebagian wilayah seperti Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu, jenis tanah ada yang mengandung pasir khususnya untuk wilayah yang dekat dengan Sungai Cisadane.

Tabel 2.2. Bentuk Lahan dan Jenis Tanah di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Lahan	Jenis Tanah
1	Serpong	datar	mengandung pasir
2	Serpong Utara	datar	latosol merah dan latosol coklat kemerahan
3	Ciputat	datar	latosol merah dan latosol coklat kemerahan
4	Ciputat Timur	bergelombang	latosol merah dan latosol coklat kemerahan
5	Pamulang	bergelombang	latosol merah dan latosol coklat kemerahan
6	Pondok Aren	datar	latosol merah dan latosol coklat kemerahan
7	Setu	bergelombang	mengandung pasir

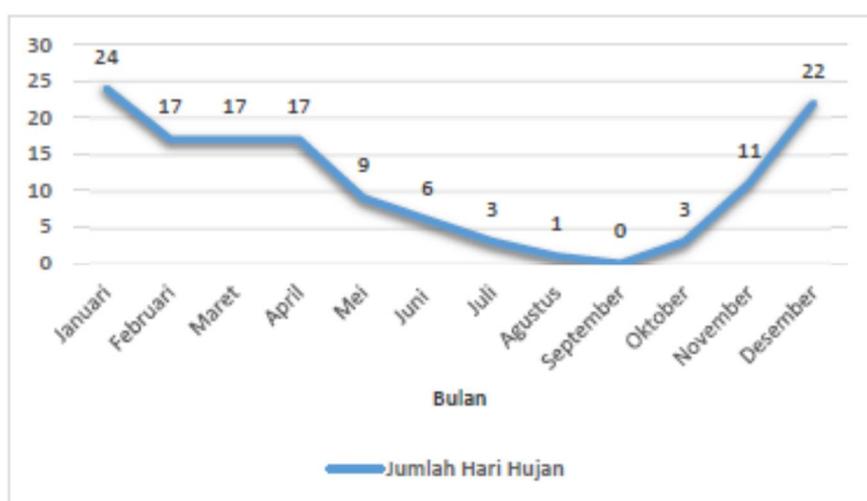
Sumber : Materi Teknis RTRW Kota Tangerang Selatan

### c. Hidrologi

Kota Tangerang Selatan memiliki sumber daya air yang cukup melimpah, baik air tanah maupun air permukaan. Potensi air permukaan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, baik pemanfaatan untuk keperluan penyediaan air bersih domestik maupun non domestik (sebagai alternatif penyediaan yang lebih berkelanjutan tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas air permukaan) maupun kepentingan pembangunan sarana publik seperti ruang terbuka.

### d. Klimatologi

Berdasarkan pengamatan Balai Besar BMKG Wilayah II Tangerang Selatan, bahwa curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Januari, April, dan Desember. Sedangkan pada beberapa bulan lainnya masih tergolong tinggi atau lebat (>38mm), dan terendah adalah pada bulan September dengan tidak terjadinya hujan sepanjang bulan. Rendahnya curah hujan dan hari hujan ini terjadi sepanjang pertengahan tahun sampai dengan sebelum akhir tahun



Gambar 2.2. Jumlah Hari Hujan Kota Tangerang Selatan

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan 2020

### e. Potensi Rawan Bencana

Potensi rawan bencana yang terdapat di Kota Tangerang Selatan adalah rawan bencana longsor, rawan bencana banjir dan rawan bencana gagal teknologi seperti bencana ledakan senjata api dan mesiu dan bencana nuklir. Terdapat beberapa kawasan yang berpotensi mengalami bencana longsor dan banjir seperti daerah yang sering longsor umumnya di sekitar tebing sungai sesuai dengan peta zona kerentanan gerakan tanah Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan daerah yang rawan banjir hanya merupakan titik genangan yang tersebar pada setiap kecamatan. Sedangkan kawasan yang berpotensi mengalami bencana gagal teknologi meliputi:

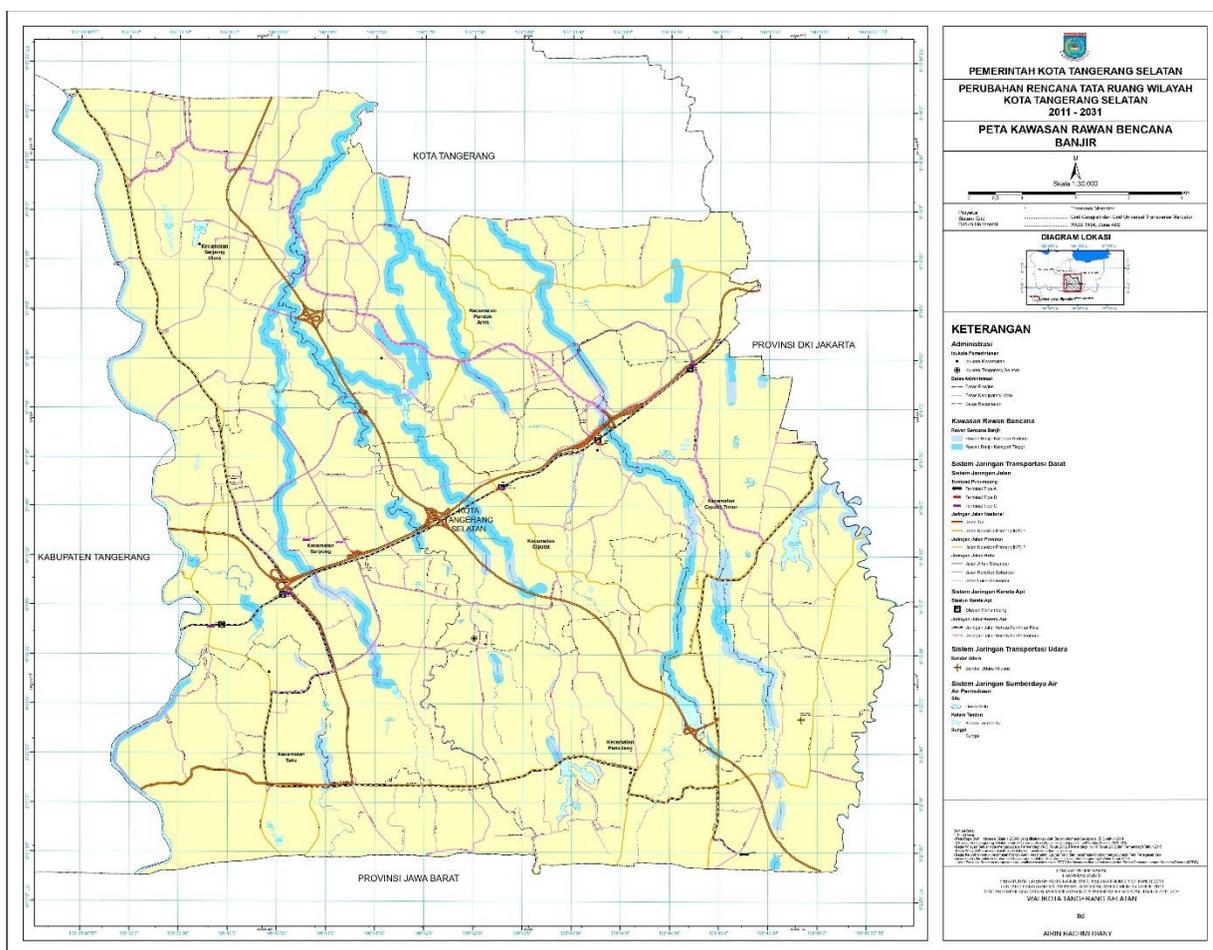
1. Kawasan Rawan radiasi nuklir berpusat di kawasan Puspiptek, Kecamatan Setu dengan sebaran radiasi meliputi 0,5-5 km dari dinding terluar bangunan reaktor meliputi Kecamatan Setu, Serpong dan Pamulang;
2. Kawasan rawan ledakan pipa gas berada pada sepanjang jaringan pipa gas di Kota Tangerang Selatan; dan
3. Kawasan rawan ledakan senjata api dan mesiu berpusat di Resimen Arhanud Kodam Jaya Pesanggrahan DKI Jakarta yang berbatasan dengan Kecamatan Pondok Aren.

Bencana lain yang sering terjadi ketika curah hujan besar adalah angin kencang yang menyebabkan kerusakan bangunan maupun vegetasi. Berikut merupakan rekapitulasi kejadian bencana:

Tabel 2.3. Kejadian Bencana pada Tahun 2020

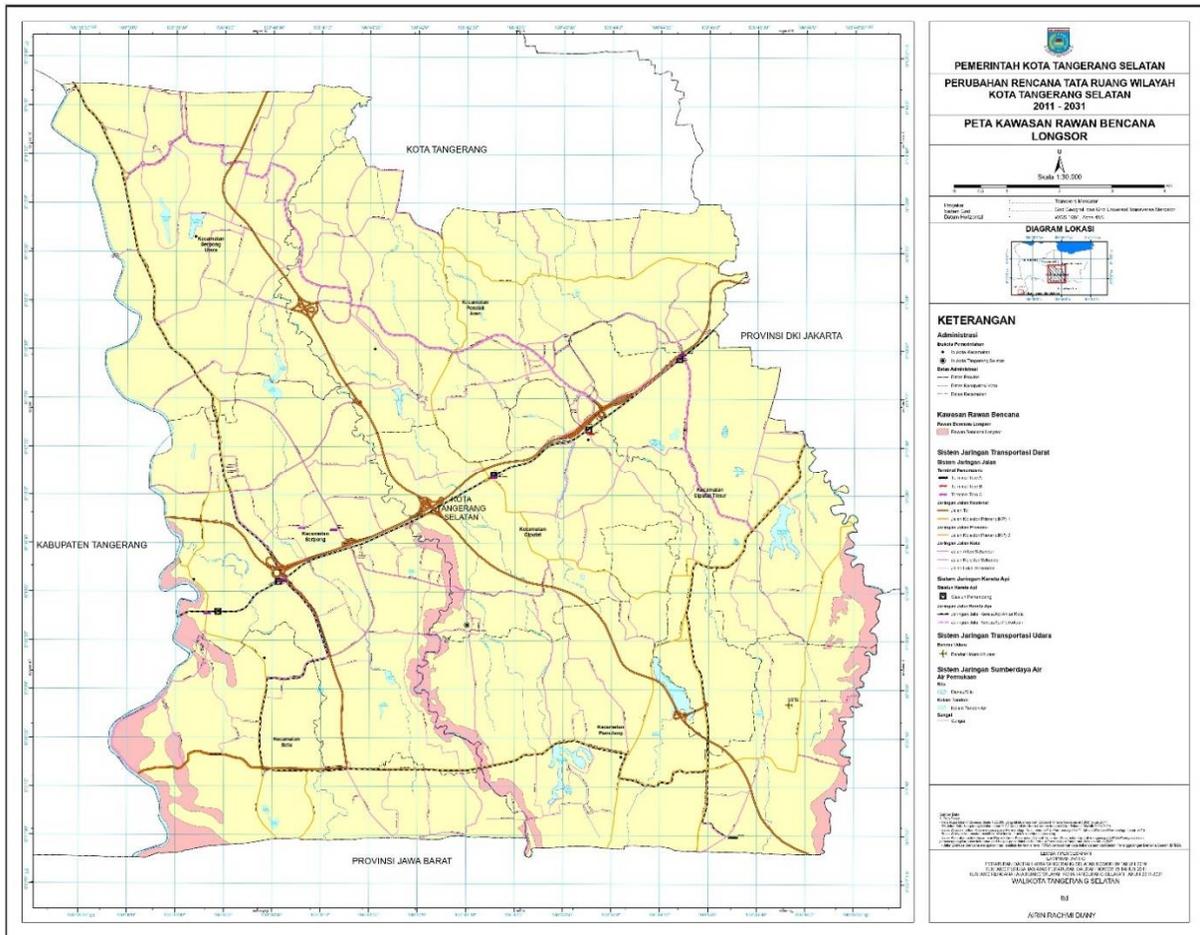
Jenis Bencana	Frekuensi Bencana	Jumlah Korban
Banjir	24 kejadian	4 orang
Tanah Longsor	10 kejadian	Tidak ada korban
Kekeringan	37 kejadian	Tidak ada korban
Angin kencang	0 kejadian	Tidak ada korban
Jumlah	71 kejadian	

Sumber: BPBD Kota Tangerang Selatan tahun 2020



Gambar 2.3. Peta Rawan Bencana Banjir Kota Tangerang Selatan

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031



Gambar 2.4. Peta Rawan Bencana Longsor

Sumber : Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 - 2031

#### f. Potensi Pengembangan Wilayah

Salah satu potensi Kota Tangerang Selatan adalah letak geografisnya yang strategis. Letak geografis Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan provinsi DKI Jakarta pada sebelah utara dan timur memberikan peluang pada Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu daerah yang berbatasan dengan Ibu Kota DKI Jakarta, selain itu juga sebagai daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Kota Tangerang Selatan juga menjadi salah satu daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Dengan posisi sedemikian, Tangerang Selatan memiliki akses yang cukup strategis baik dari udara, karena berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Tangerang yang memiliki Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, maupun dari laut, karena berbatasan dengan DKI Jakarta yang memiliki Pelabuhan Tanjung Priok. Demikian juga akses melalui daratan, Kota Tangerang Selatan dilalui oleh Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/ JORR) yang sekarang sudah terkoneksi baik dari Tangerang – Merak ataupun Tol JORR 2.

Selain infrastruktur jalan tol yang sudah eksis, juga direncanakan akan dibangun beberapa ruas jalan tol. Salah satunya yang sudah terealisasi adalah ruas jalan tol Kunciran - Serpong. Ruas jalan tol ini akan melintasi wilayah-wilayah yang berada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Prasarana dan sarana penunjang lain yang menjadi potensi investasi yang dikembangkan di Kota Tangerang Selatan.

Sebagaimana terdapat dalam Perda RTRW No.9 tahun 2019, kawasan perdagangan dan jasa terus dikembangkan di sepanjang koridor jalan utama kota, yang direncanakan seluas 3.255,32 ha. Arah pusat pemerintahan, kegiatan pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala pelayanan

regional dan nasional perumahan diarahkan di Kecamatan Ciputat sebagai Pusat Pelayanan Kota I, Kecamatan Serpong sebagai Pusat Pelayanan Kota II, dan Kecamatan Pondok Aren sebagai Pusat Pelayanan Kota III.

Potensi pengembangan lainnya adalah di sektor pariwisata. Total kawasan yang disediakan dalam Perda RTRW No.9 tahun 2019 adalah sebesar 5,97 ha di Kecamatan Serpong. Kemudian, arahan pengembangan kawasan pariwisata ini adalah sebagai berikut:

- a. Wisata alam: Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Ciputat, dan Kecamatan Pamulang.
- b. Wisata belanja: Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Ciputat Timur
- c. Wisata kuliner: Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, dan Kecamatan Pondok Aren

Berikutnya adalah kawasan permukiman yang menempati urutan terluas yang disediakan dalam Perda RTRW No.9 tahun 2019, yaitu 15.279,16 hektar atau 93 persen dari total luas kota dan tersebar di seluruh wilayah kota meliputi:

- Kawasan perumahan seluas 10.281,71 hektar meliputi: Kawasan perumahan untuk perumahan vertikal; dan Kawasan perumahan untuk perumahan horizontal.
- Kawasan perdagangan dan jasa pada pusat-pusat bisnis dan sepanjang koridor jalan seluas 3.255,32 hektar.
- Kawasan perkantoran seluas 293,45 Hektar meliputi: 1. kawasan peruntukan perkantoran pemerintah di Kecamatan Ciputat, Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong, kantor Kecamatan tersebar di setiap kecamatan, kantor kelurahan tersebar di setiap kelurahan; dan 2. kawasan Puspipstek di Kecamatan Setu.
- Kawasan pendidikan seluas 306,08 hektar meliputi: 1. kawasan pendidikan yang tersebar di seluruh kecamatan; dan kawasan pendidikan militer di Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara.
- Kawasan kesehatan seluas 11,98 hektar yang tersebar di kecamatan;
- Kawasan RTNH seluas 880,14 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan;
- Tempat evakuasi bencana;
- Kawasan peribadatan seluas 4,75 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan;
- Kawasan olahraga seluas 74,31 hektar yang tersebar di kecamatan; dan
- Kawasan transportasi seluas 171,43 hektar meliputi terminal dan Bandar udara.

Pada kawasan peruntukan industri disediakan seluas 1 persen atau 242,45 hektar dari total luas kota, meliputi kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah, meliputi:

- Peruntukan kawasan industri dipusatkan pada kawasan industri Taman Tekno di Kecamatan Setu dan kawasan industri Multiguna Kecamatan Serpong Utara seluas 220,25 hektar, dan.
- Sentra industri kecil dan menengah seluas kurang lebih 22,20 hektar tersebar di seluruh kecamatan.

#### **g. Demografi**

Kondisi Demografi Kota Tangerang Selatan secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan, Konsep penduduk yang disampaikan adalah mereka yang telah tinggal di Kota Tangerang Selatan 6 bulan atau lebih, atau yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud menetap baik yang memiliki KTP maupun tidak, maka jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2020 berjumlah 1.338.387 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,47 persen, kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2020 Annual Population Growth Rate (%) 2010–2020
(1)	(2)	(3)
Setu	84,178	2,35
Serpong	154,744	1,17
Pamulang	305,563	0,63
Ciputat	208,722	0,80
Ciputat Timur	172,139	-0,37
Pondok Aren	294,996	-0,26
Serpong Utara	134,008	0,56
<b>Kota Tangerang Selatan</b>	<b>1 354,35</b>	<b>0,47</b>

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Kecamatan Subdistrict	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup> Population Density per sq.km
(1)	(7)	(8)
Setu	6,22	5 688
Serpong	11,43	6 437
Pamulang	22,56	11 393
Ciputat	15,41	11 356
Ciputat Timur	12,71	11 156
Pondok Aren	21,78	9 873
Serpong Utara	9,89	7 512
<b>Kota Tangerang Selatan</b>	<b>100</b>	<b>9 201</b>

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/ <i>Gender</i>		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	53 087	50 752	103 839
5-9	57 002	54 389	111 391
10-14	57 069	53 238	110 307
15-19	55 041	52 108	107 149
20-24	54 395	53 606	108 001
25-29	54 527	55 080	109 607
30-34	53 674	56 492	110 166
35-39	56 045	57 599	113 644
40-44	53 942	54 787	108 729
45-49	49 400	50 855	100 255
50-54	42 286	42 403	84 689
55-59	34 732	36 279	71 011
60-64	25 188	25 574	50 762
65-69	18 228	17 650	35 878
70-74	7 289	7 481	14 770
75+	6 254	7 898	14 152
<b>Kota Tangerang Selatan</b>	<b>678 159</b>	<b>676 191</b>	<b>1 354 350</b>

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Tabel 2.6. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/ <i>Gender</i>		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I. Angkatan Kerja/<i>Economically Active</i></b>	526 483	305 940	832 423
1. Bekerja/ <i>Working</i>	481 401	280 450	761 851
2. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	45 082	25 490	70 572
<b>II. Bukan Angkatan Kerja/<i>Economically Inactive</i></b>	142 381	357 187	499 568
1. Sekolah/ <i>Attending School</i>	55 567	57 876	113 533
2. Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	23 353	263 118	286 471
3. Lainnya/ <i>Others</i>	63 371	36 193	99 564
<b>Jumlah/<i>Total</i></b>	<b>668 864</b>	<b>663 127</b>	<b>1 332 991</b>

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Tabel 2.7. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan <sup>1</sup> <i>Educational Attainment<sup>1</sup></i>	Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja <i>Percentage of Working to Economically Active</i>
	Bekerja <i>Working</i>	Pengangguran <sup>2</sup> <i>Unemployment<sup>2</sup></i>	Jumlah Angkatan Kerja <i>Total of Economically Active</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	114 462	3 418	117 880	97,10
1	108 308	5 729	114 037	94,98
2	338 615	41 556	380 171	89,07
3	200 466	198 869	220 335	90,98
<b>Jumlah/Total</b>	<b>761 851</b>	<b>70 572</b>	<b>832 423</b>	<b>91,52</b>

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan <sup>1</sup> <i>Educational Attainment<sup>1</sup></i>	Bukan Angkatan Kerja <i>Not Economically Active</i>	Jumlah Total	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
			<i>Percentage of Economically Active to Working Age Population</i>
(1)	(6)	(7)	(8)
0	108 015	225 895	52,18
1	117 036	231 073	49,35
2	203 807	583 978	65,10
3	70 710	291 045	75,70
<b>Jumlah/Total</b>	<b>499 568</b>	<b>1 331 991</b>	<b>62,49</b>

atatan/Note: <sup>1</sup> 0. ≤ Sekolah Dasar (SD)/≤ *Primary School*  
 1. Sekolah Menengah Pertama/*Junior High School*  
 2. Sekolah Menengah Atas/*Senior High School*  
 3. Perguruan Tinggi/*Collage*  
<sup>2</sup> 1. Mencari pekerjaan/*Looking for work*  
 2. Mempersiapkan usaha/*Establishing a new business/firm*  
 3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/*Hopeless of job*  
 4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja/*Have a job in future start*  
 Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

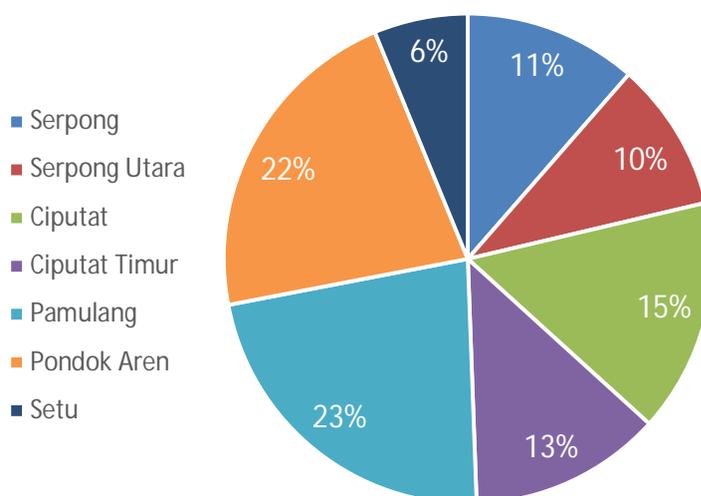
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Tabel 2.8. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan

Status Pekerjaan Utama <i>Main Employment Status</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri <i>Own account worker</i>	117 909	64 669	182 578
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar <i>Employer assisted by temporary worker/unpaid worker</i>	12 851	13 516	26 367
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar <i>Employer assisted by permanent worker/paid worker</i>	20 842	3 560	24 402
Buruh/Karyawan/Pegawai/ <i>Employee</i>	298 613	161 687	460 300
Pekerja bebas <i>Casual worker</i>	22 300	13 486	35 786
Pekerja keluarga/tak dibayar <i>Family worker/unpaid worker</i>	8 886	23 532	324 18
<b>Jumlah/Total</b>	<b>481 401</b>	<b>280 450</b>	<b>761 851</b>

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Kepadatan penduduk di Tangerang Selatan tahun 2020 mencapai 9.201 jiwa/Km<sup>2</sup> dengan persebaran penduduk yang hampir tidak merata, karena sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah Pamulang dan Pondok Aren. Gambar 2.5 menunjukkan bahwa sekitar 23 persen penduduk Tangerang Selatan tinggal di Kecamatan Pamulang. Sementara itu Kecamatan Setu adalah kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit yaitu sebanyak sekitar 6 persen. Sebaran penduduk tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut :



Gambar 2.5. Distribusi Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

## 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

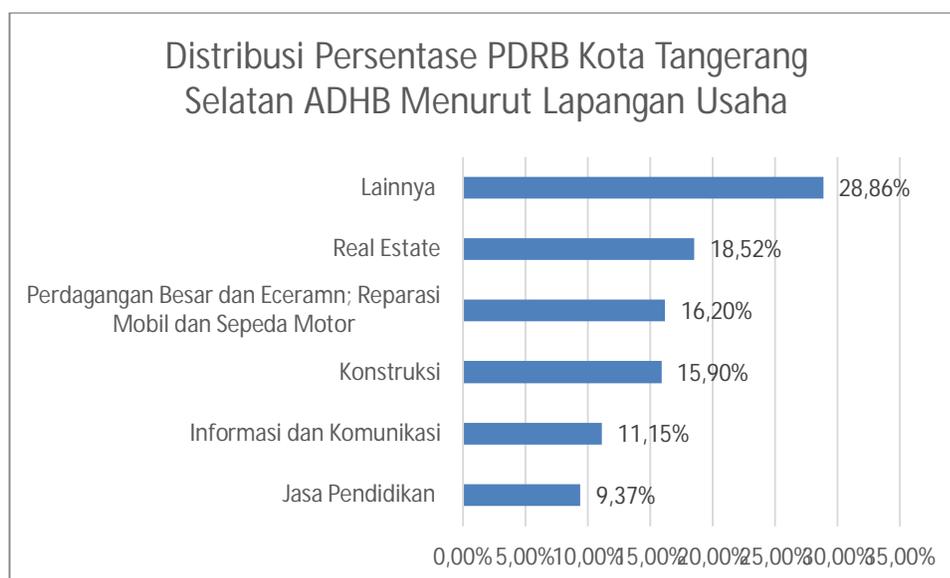
### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### a. Struktur Ekonomi Kota Tangerang Selatan

Selama periode 2016-2020, struktur ekonomi masyarakat Tangerang Selatan telah bergeser dari kelompok lapangan usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier yang terlihat dari besarnya kenaikan/penurunan peranan masing-masing kelompok lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2020, kelompok lapangan usaha tersier memberikan sumbangan sebesar 75,82 persen yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 73,87 persen. Kelompok lapangan usaha primer dan sekunder tahun 2020 memberikan sumbangan masing-masing sebesar 0,22 persen dan 23,96 persen. Kelompok lapangan usaha primer dan sekunder ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2016 yang masing-masing sebesar 0,26 persen dan 25,87 persen.

Apabila dilihat menurut lapangan usahanya, ada tiga lapangan usaha utama yang menopang perekonomian Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020, yaitu lapangan usaha Real Estate, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor, dan Konstruksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2020 terjadi pandemic COVID-19 yang melanda Indonesia, khususnya Kota Tangerang Selatan. Kendati demikian, tiga lapangan usaha tersebut tetap menjadi penopang utama perekonomian Kota Tangerang Selatan, dimana lapangan usaha Real Estate memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 18,52 persen, kemudian disusul lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor sebesar 16,20 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,90 persen. Selanjutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi menyumbang 11,15 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan memberikan sumbangan sebesar 9,37 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya secara keseluruhan menyumbang sebesar 28,86 persen.

Jika kontribusi lapangan usaha tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, ternyata lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan kontribusi dari 8,42 persen tahun 2019 menjadi 7,89 persen di tahun 2020. Ini disebabkan akibat terjadinya penurunan jumlah produksi yang dihasilkan oleh beberapa industri yang ada di Kota Tangerang Selatan sebagai dampak dari pandemic COVID-19. Beberapa lapangan usaha yang juga ikut terkena dampak pandemic COVID-19 sehingga menyebabkan penurunan kontribusi terhadap perekonomian Kota Tangerang Selatan diantaranya adalah Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Perusahaan dan Jasa Lainnya.



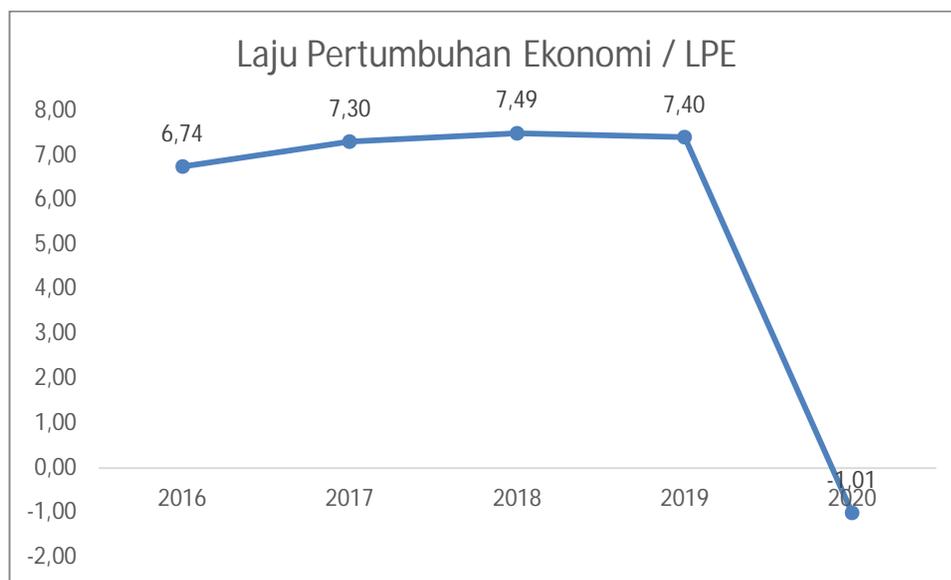
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.6. Distribusi Persentase PDRB Kota Tangerang Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

## b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran hasil pelaksanaan pembangunan yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi dan distribusi beberapa lapangan usaha di Kota Tangerang Selatan. LPE merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan ekonomi di suatu wilayah.

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan Ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir, yakni dari 6,74 persen pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 7,30 persen dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 7,49 persen. Namun pada tahun 2019 sedikit mengalami perlambatan menjadi 7,40 persen. Kemudian turun menjadi -1,01 persen tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia. Ini merupakan resilitan dari sebagian besar sektor yang mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi) sebagai akibat pandemic COVID-19. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2020

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh empat lapangan usaha pada masa pandemi COVID-19, diantaranya lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,21 persen. Disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,88 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,90 persen, dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,55 persen. Ini disebabkan adanya peralihan kegiatan tatap muka menjadi online meeting dalam masa pandemic COVID-19 sehingga meningkatkan permintaan kuota akses internet, pengadaan obat dan alat kesehatan meningkat sebagai upaya pengendalian COVID-19, dan meningkatnya kebutuhan air.

Tabel 2.9. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,03	2,03	0,4	0,94	-3,26
B. Pertambangan dan Pengalihan	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	-2,02	1,37	0,43	0,5	-8,02
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10,71	5,97	9,75	5,39	-7,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,54	7,42	4,61	4,78	7,9

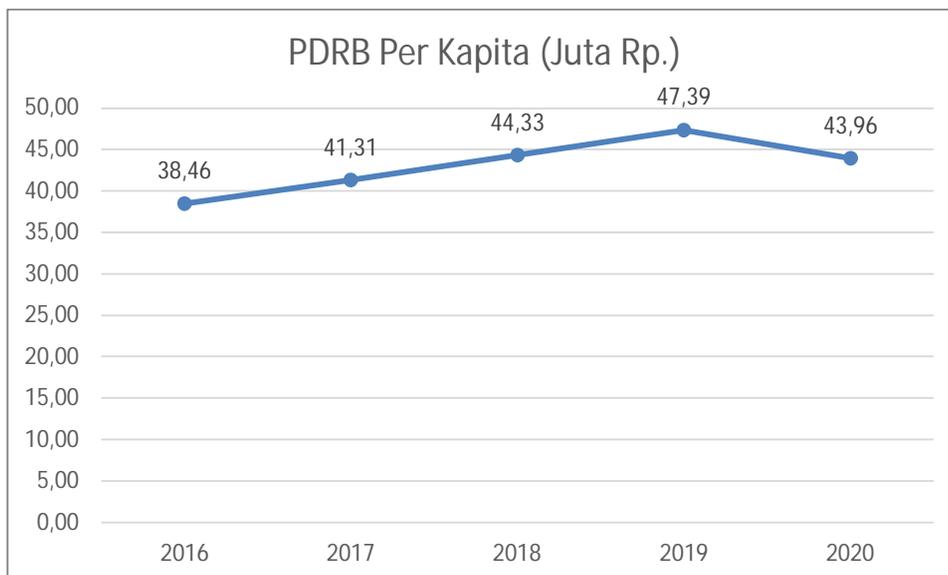
LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
F. Konstruksi	8,08	8,82	9,1	9,64	-4,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,6	6,11	8,37	6,21	-7,65
H. Transportasi dan Pergudangan	9,37	9,73	9,21	9,71	-8,53
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,59	7,83	7,73	7,36	-5,77
J. Informasi dan Komunikasi	8,23	8,41	8,35	8,45	8,88
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,87	8,93	9,3	7,44	7,55
L. Real Estate	9,11	8,47	8,28	8,22	1,91
M,N. Jasa Perusahaan	9,57	9,32	7,24	8,57	-5,52
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,41	7,64	7,44	8,47	-0,71
P. Jasa Pendidikan	7,46	7,84	7,53	7,63	1,07
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,12	7,26	6,47	7,89	9,21
R,S,T,U. Jasa lainnya	8,63	7,92	7,68	9,49	-6,28
<b>PDRB</b>	<b>6,74</b>	<b>7,3</b>	<b>7,49</b>	<b>7,4</b>	<b>-1,01</b>

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Hampir sebagian besar pertumbuhan lapangan usaha di Kota Tangerang Selatan tahun 2020 mengalami kontraksi. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terkontraksi paling dalam yaitu sebesar 8,53 persen. Kemudian disusul lapangan usaha Industri Pengolahan yang terkontraksi sebesar 8,02 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terkontraksi sebesar 7,65 persen, Pengadaan Listrik dan Gas terkontraksi 7,05 persen, Jasa Lainnya terkontraksi sebesar 6,28 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terkontraksi sebesar 5,77 persen, Jasa Perusahaan terkontraksi sebesar 5,52 persen, Konstruksi terkontraksi 4,03 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terkontraksi 3,26 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib terkontraksi sebesar 0,71 persen.

### c. PDRB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. Data BPS menunjukkan bahwa PDRB perkapita Kota Tangerang Selatan berdasarkan harga konstan tahun 2010 meningkat dari Rp38.46 Juta pada tahun 2016 menjadi Rp47,39 juta pada tahun 2019. PDRB per Kapita Kota Tangerang Selatan memiliki tren yang cenderung meningkat sampai pada tahun 2019. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pendapatan per kapita masyarakat Tangerang Selatan turun pada angka 45,87 juta rupiah lebih rendah 1,47 juta rupiah dibandingkan tahun 2019. Penurunan pendapatan per kapita ini karena pertumbuhan ekonomi terkontraksi. Penyebab perekonomian menurun tajam karena sektor penopang seperti konsumsi rumah tangga dan investasi masih tertekan. Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh sektor menurun. Jika tumbuh positif pun, angkanya melambat. Pandemi juga telah mengakibatkan sejumlah perusahaan tutup atau mengurangi tingkat produksinya. Dampak ikutannya adalah ribuan pekerja di-PHK, dan yang lain dirumahkan, sebagian bahkan tak digaji. Sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



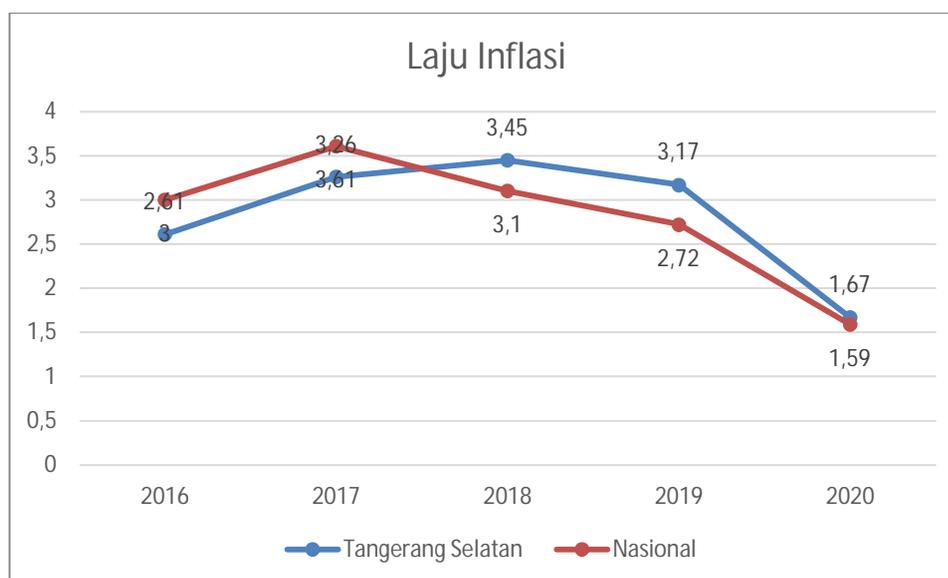
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.8. PDRB Per Kapita di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2020

#### d. Laju Inflasi

Laju inflasi Kota Tangerang Selatan dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian, baik nasional maupun global. Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Kota Tangerang Selatan memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga barang di Kota Tangerang Selatan cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang secara nasional. Data terkini menunjukkan bahwa inflasi Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 adalah sebesar 0,14 persen (yoy).

Laju inflasi yang sangat rendah ini terjadi lantaran pandemi memukul baik dari sisi penawaran dan permintaan. Terutama banyak komoditas yang mengalami penurunan harga, seperti harga kebutuhan pokok salahsatunya beras. Rincian mengenai nilai inflasi Kota Tangerang Selatan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut:



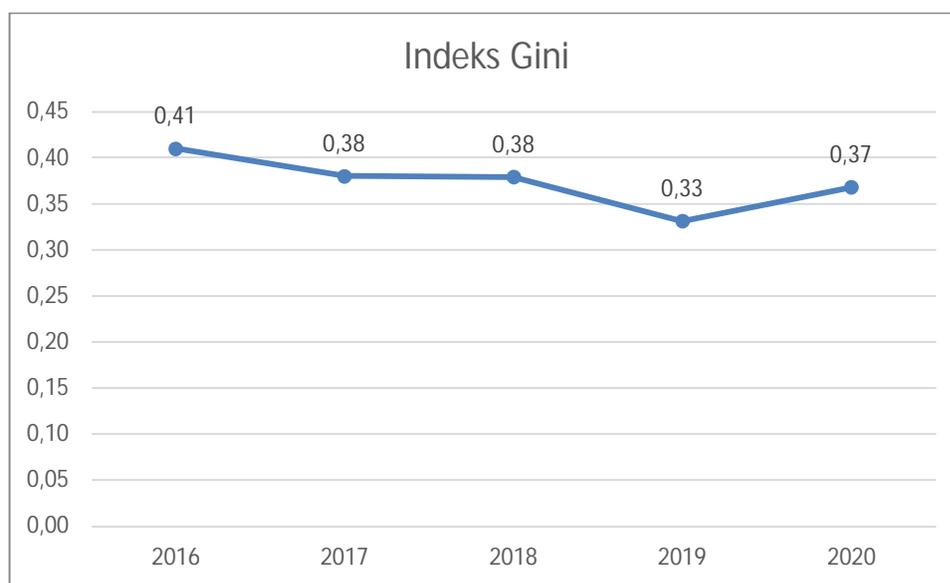
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.9. Angka Inflasi Tahunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2020

**e. Indeks Gini**

Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan terus berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar tercipta pemerataan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Indeks gini (gini ratio) merupakan indikator yang umum digunakan sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Selama periode Tahun 2016-2020, tingkat ketimpangan pendapatan di Tangerang Selatan yang diukur dengan gini ratio menunjukkan angka yang cenderung turun.

Indeks gini Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan dikarenakan adanya upaya dalam mengurangi kemiskinan dengan mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain itu, penurunan indeks gini dikarenakan pula adanya kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah dan kelompok menengah lebih cepat dibandingkan kelompok atas. Akan tetapi pada saat pandemi terjadi kenaikan indeks sebesar 0,04 akibat banyak masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19. Meski ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh rasio gini meningkat, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa porsi tersebut masih termasuk rendah bila dibandingkan dengan patokan yang ditetapkan oleh Bank Dunia (World Bank).



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.10. Indeks Gini Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2020

**2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial**

**a. Kemiskinan**

Pada tahun 2016 – 2019 tren persentase penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan cenderung menurun. Namun, pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kota Tangerang Selatan melonjak naik dari 1,68 persen pada tahun 2019 menjadi 2,29 persen pada tahun 2020. Artinya, penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan bertambah 491.758 orang atau naik sebesar 36,31 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini terjadi lantaran pandemi menyebabkan banyak kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasa, sehingga pendapatan masyarakat pun tertekan.

Tingkat kemiskinan ini berkorelasi dengan meningkatnya rasio gini / ketimpangan ekonomi pada 2020, angka kemiskinan pada tahun tersebut berada di level 2%. Hadirnya pandemi Covid-19 pada tahun lalu membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi yang berdampak pada kemiskinan.

Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan di tahun 2020 naik 36 persen salahsatunya terjadi karena penurunan pendapatan yang dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Meski demikian, masyarakat yang berada dalam lapisan bawah terdampak lebih dalam dibandingkan dengan lapisan atas.

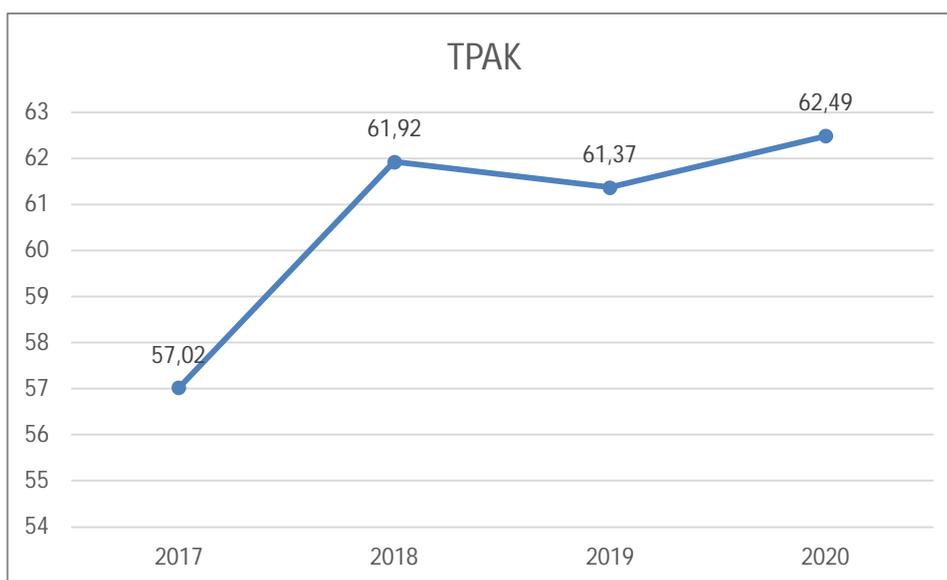


Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.11. Tingkat Kemiskinan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

#### b. Tenaga Kerja

TPAK di Kota Tangerang Selatan tiap tahunnya fluktuatif, nilai TPAK tertinggi ada di tahun 2018 dengan nilai 61,92% dan terendah di tahun 2017 dengan nilai 57,02%. Penurunan nilai TPAK Kota Tangerang Selatan di tahun 2019 dikarenakan adanya perubahan pengambilan data, tahun 2019 pengambilan data dimulai dari bulan Januari – Agustus dan pada tahun 2020 nilai TPAK di Kota Tangerang Selatan sebesar 62,49%. Peningkatan TPAK ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja, baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur. Berikut ini grafik perubahan nilai TPAK di Kota Tangerang Selatan tahun 2019 – 2020.

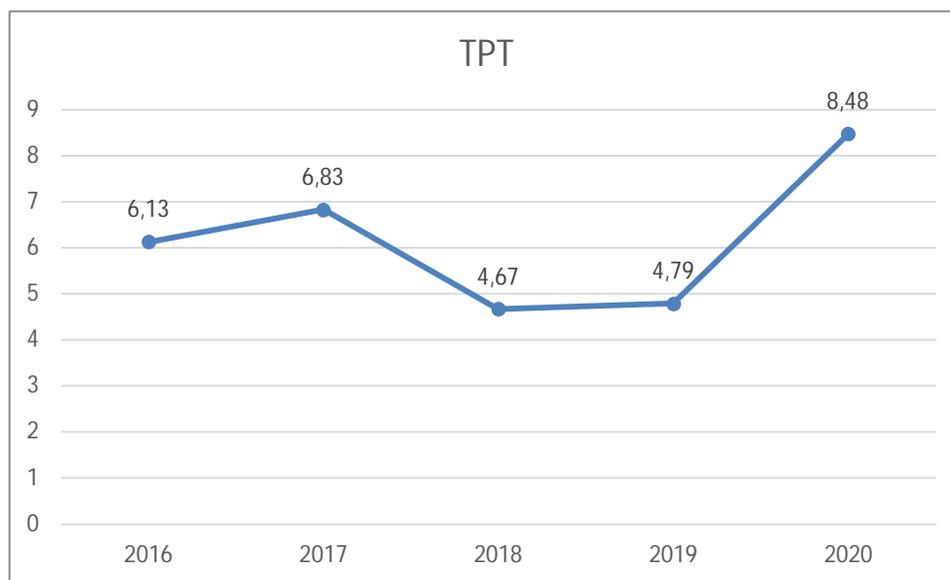


Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.12. Nilai TPAK Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 – 2020

**c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

TPT di Kota Tangerang Selatan mengalami trend yang fluktuatif, terjadi penurunan pada tahun 2018 sebesar 2,16% sedangkan pada tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,12%. Namun saat pandemi di tahun 2020 meningkatkan secara signifikan TPT di Kota Tangerang selatan sebesar 8,48% dan angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2017. Pandemi Covid-19 membuat tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami peningkatan. Peningkatan TPT terjadi lantaran terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja 2020. Meski terjadi kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) namun sebetulnya terjadi penurunan jumlah penduduk yang bekerja. Berikut ini grafik TPT di Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2020

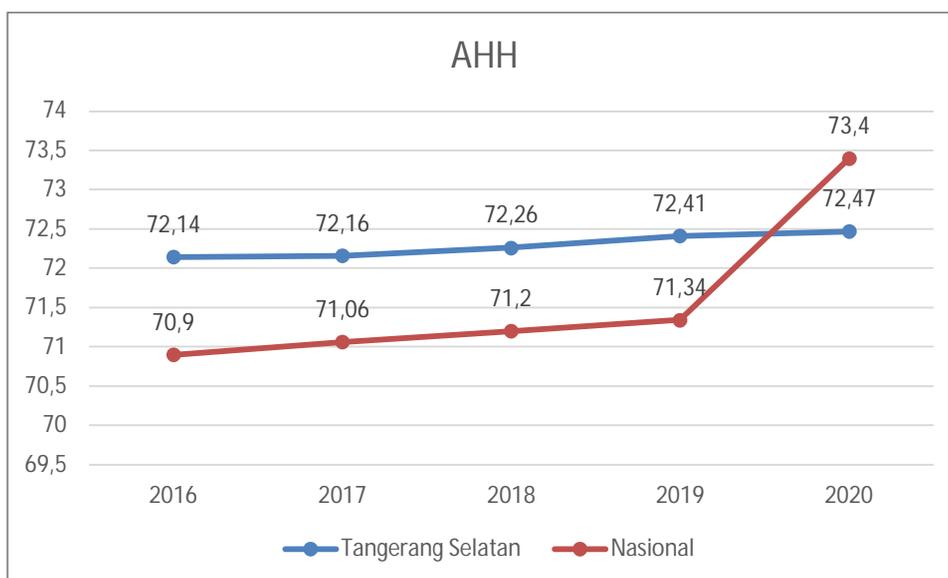


Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.13. TPT Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2020

**d. Angka Harapan Hidup**

Angka usia harapan hidup penduduk di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 masih dibawah angka usia harapan hidup nasional. Tahun 2020 angka usia harapan hidup di Kota Tangerang Selatan mencapai 72,47 tahun, sedangkan angka usia harapan hidup nasional pada tahun 2020 sebesar 73,4 tahun. Adapun angka harapan hidup standar nasional adalah 71 tahun (WHO, 2014). Hal ini bermakna kesehatan penduduk di Kota Tangerang Selatan masih diatas standar nasional. Lebih lanjut, perkembangan usia harapan hidup di Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2020 dapat disimak dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

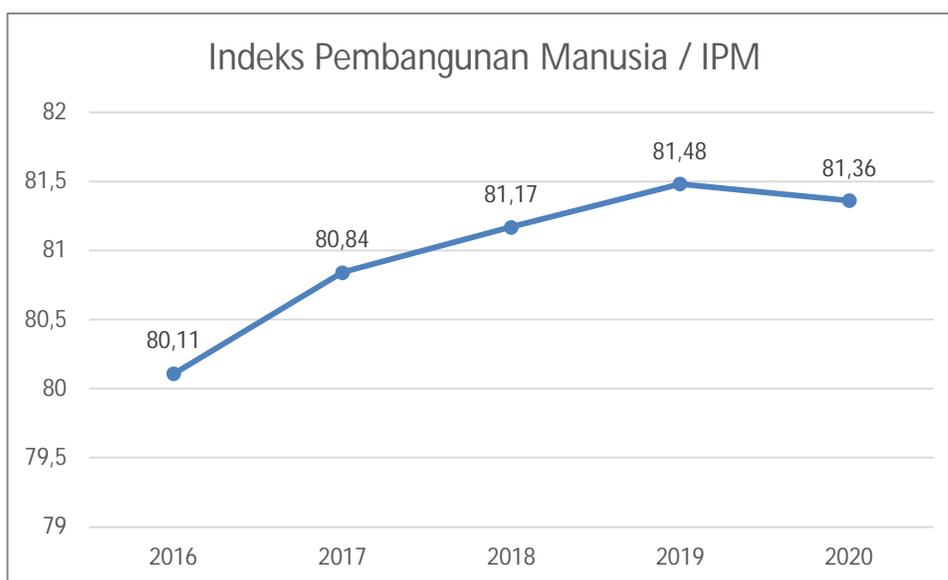
Gambar 2.14. Angka Harapan Hidup di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2020

AHH di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 hingga tahun 2019 berkisar pada angka 72,12 – 72,41 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa bayi yang lahir tahun 2016-2020 di Tangerang Selatan memiliki harapan hidup hingga usia 72 tahun.

#### e. Indeks Pembangunan Manusia

IPM di Kota Tangerang Selatan selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga tahun 2019 yang mana hal ini berarti bahwa Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang cukup berhasil dalam pembangunan dan meningkatkan mutu kualitas hidup masyarakatnya. Peningkatan IPM juga mengindikasikan bahwasanya pembangunan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah Tangerang Selatan semakin meningkat setiap tahunnya.

Namun Indeks Pembangunan Manusia 2020 mengalami penurunan sebesar 0,15 persen dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan ini dibayangi oleh isu pandemi COVID-19 yang mempengaruhi ekonomi masyarakat. COVID ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sehingga bisa dilihat pengeluaran per kapita turun.



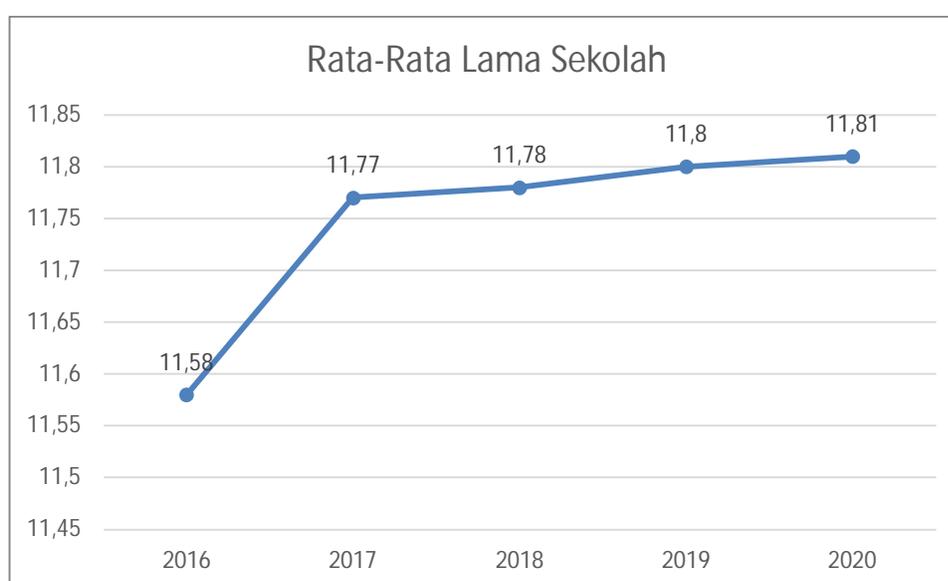
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.15. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

#### f. Rata-rata Lama Sekolah

Nilai RLS Kota Tangerang Selatan Dari tahun 2016 hingga 2020 selalu mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 0,41%. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan masyarakat di Kota Tangerang Selatan masih hampir lulus SMA. Peningkatan RLS disebabkan karena: 1) Adanya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, 2) Adanya peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan, 3) Adanya kebijakan yang mendukung peningkatan seperti pemberian insentif bagi sekolah swasta dan pengelolaan dana BOSNas dan 4) Adanya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di luar jam sekolah.

Nilai RLS yang mencapai 11,81 tersebut belum dapat memenuhi standar upaya wajib belajar 12 tahun yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sehingga RLS Kota Tangerang Selatan masih dapat ditingkatkan. Berikut ini merupakan grafik RLS dari tahun 2016 – 2020:



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.16. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tangerang Selatan 2016-2020

#### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga di Kota Tangerang Selatan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembangunan karakter bangsa dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung/sarana prasarana olahraga yang dimiliki oleh Tangerang Selatan. Tabel dibawah menunjukkan daftar sarana dan prasarana olahraga di Tangerang Selatan.

Tabel 2.10. Daftar Sarana dan Prasarana Olahraga di Tangerang Selatan

NO	SARANA	LOKASI
1.	Lap. Tennis Sektor 3 Bintaro	Jl. Bintaro Utama 3A, Kel. Pd. Karya, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
2.	Lap. Softball Alam Sutera	Jl. Griya Hijau Raya Alam Sutera, Kel. Paku Alam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
3.	Lap. Bola Parigi	Jl. Raya Perigi Lama No.13B, Kel. Parigi, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
4.	Stadion Mini Ciputat	J. Pendidikan, Kel. Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
5.	Lap. Tennis Setu	Jl. Raya Serpong - Puspitek No. 1, Kel. Pagedangan, Kec. Setu,

NO	SARANA	LOKASI
		Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
6.	GOR Ciputat	Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 2 Kel. Ciputat Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
7.	GOR Badminton Ciputat/GSG Vila Mutiara	J. Mirah III No. 27 Rt/Rw 02/02, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
8.	Lap. Bola Rempoa	Jl. Pahlawan, Jl. Anggur 1, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
9.	Lap. Bola Villa Pamulang	Villa Pamulang, Jl. Sinta Raya, Kel. Pd. Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
10.	Kolam Renang Panorama Serpong	Jl. Komplek Panorama Blok A, Kel. Bakti Jaya, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
11.	Sportcenter Panorama Serpong	Jl. Komplek Panorama Blok D, Kel. Bakti Jaya, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
12.	Lap.Tennis Villa Pamulang Mas	Jl. Lele Villa Pamulang Mas, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
13.	Communnity Center	Jl Kenari II No 8 Rt 03 Rw 17 Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Tangerang Selatan, 2020

Di samping itu di bidang seni dan budaya, pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan pengembangan kesenian tradisional melalui pembinaan terhadap lembaga kesenian tradisional. Selain itu fokus budaya akan diarahkan pada peningkatan sarana dan prasana serta akses informasi sejarah lokal, serta revitalisasi museum sejarah dan cagar budaya.

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

##### a. Pendidikan

Prioritas pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan pada RPJMD periode Tahun 2016-2021 adalah bidang Pendidikan. Ukuran keberhasilan program-program pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari ketercapaian indikator Harapan Lama Sekolah, APM PAUD, APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI dan APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTS.

Indikator kinerja urusan pendidikan cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11. Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,08	14,18	14,39	14,36	14,62
APM PAUD	Persen	23,00	30,20	29,54	38,51	32,30
APM (Angka Partisipasi Murni) SD	Persen	72,06	72,44	72,76	72,76	97,98
APM (Angka Partisipasi Murni) SMP	Persen	83,69	83,43	86,04	87,88	87,89
Uji Kompetensi Guru		70	65,12	90	80	85
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	107,72	109,19	104,72	104,14	105,08
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	101,78	88,87	92,13	95,44	93,68
Angka kelulusan SD	Persen	100	100	100	100	100
Angka kelulusan SMP	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa Pada jenjang pendidikan SD, Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami peningkatan pada rentang waktu tahun 2016 ke tahun 2018 dan menurun pada tahun 2020 dengan angka 97,98% yang mana berada di atas APM SD/MI Nasional (97,46%). Persentase tersebut menunjukkan banyaknya peserta didik pada jenjang SD yang

bersekolah di Kota Tangerang Selatan berasal dari wilayah perbatasan, seperti Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD menunjukkan angka yang fluktuatif dengan persentase sebesar 105,08% pada tahun 2020. Angka tersebut menunjukkan dua penyebab yaitu terdapat anak yang tinggal kelas atau terdapat anak yang seharusnya belum masuk usia SD tetapi sudah bersekolah pada jenjang SD.

Pada jenjang pendidikan SMP, Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Persentase APM pada tahun 2020 mencapai 87,89% yang juga berada di atas APM SMP Nasional (79,40%). Angka ini menunjukkan banyaknya peserta didik yang sekolah di Kota Tangerang Selatan berasal dari wilayah perbatasan, seperti Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta. Sedangkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP cukup fluktuatif dengan persentase 93,68% pada tahun 2020. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya terdapat siswa yang tinggal kelas, terdapat siswa yang seharusnya belum masuk usia SMP tetapi sudah bersekolah pada jenjang SMP.

Angka Partisipasi Murni (APM) tersebut mayoritas mengalami peningkatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Peningkatan ini, khususnya pada jenjang SD dan SMP, dipengaruhi oleh banyaknya peserta didik yang bersekolah di Kota Tangerang Selatan berasal dari wilayah perbatasan, seperti Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta.

Berbeda dengan APM, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD, SMP cenderung menunjukkan angka yang fluktuatif dan terjadi penurunan pada tahun-tahun tertentu. Penurunan yang terjadi pada APK dapat disebabkan oleh berkurangnya peserta didik yang mengulang kelas dan berkurangnya Angka Putus Sekolah.

## b. Kesehatan

Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan kesehatan. Keberhasilan program-program pembangunan di bidang kesehatan dapat diukur dari indikator Rasio Kematian Bayi, dan Jumlah Kasus Kematian Ibu dan lainnya.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan, dalam konteks tersebut, Pemerintah kota Tangerang Selatan telah berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan dari belanja daerah. Ini sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sejak awal tahun 2020 yang lalu telah terjadi pandemi COVID-19, yang mengakibatkan adanya perubahan sistem tatanan kehidupan, baik ditingkat global, nasional maupun ditingkat daerah. Dalam upaya menangani penyebaran pandemi COVID-19 yang lebih luas kepada masyarakat Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan melakukan berbagai upaya pencegahan. Penanganan pencegahan penyebaran pandemi COVID19 dilakukan secara komprehensif, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Adapun capaian Kinerja Kesehatan Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2020, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.12. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas	Puskesmas	7	11	10	8	0*
Persentase akreditasi unit Labkesda	Persen	0%	30%	50%	50%	50%
Jenis pelayanan sesuai standar pelayanan minimal rumah sakit	Jenis pelayanan	13	15	15	20	20
Persentase alat kesehatan sesuai standar	Persen	65%	70%	75%	80%	85%
Jumlah puskesmas yang terbangun	Puskesmas	29	29	29	32	33
Jumlah bangunan posyandu yang dibangun	Posyandu	76	78	109	126	139
Jumlah bangunan puskesmas yang dikembangkan	Puskesmas	0	0	0	4	0
Jumlah puskesmas yang perlu adanya Tambah Ruang Sesuai	Puskesmas	4	0	4	0	0

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kebutuhan Pelayanan						
Persentase Gudang terbangun	Persen	0	0	1	1	1
Jumlah Rumah Sakit Tingkat Kecamatan dibangun	Unit	0	0	0	0	2
Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	Puskesmas	3	3	5	1	0
Tingkat instrumen akreditasi rumah sakit	Bab (Level)	4	12	15	15	15
Persentase ketersediaan reagen dan bmhp laboratorium di puskesmas dan labkesda	Persen	95%	95%	95%	95%	99%
Persentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya	Persen	90%	100%	97%	97%	100%
Persentase resep sesuai dengan formularium	Persen	60%	96%	98%	98%	99%
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	1/Per 100.000 kelahiran hidup	1,4	1,5	1,9	1,1	0,8
Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	32/Per 100.000 kelahiran hidup	16	48	42	35	32
Cakupan pelayanan kesehatan balita	Persen	97%	97%	98%	100%	100%
Cakupan pelayanan kesehatan siswa SD/setingkat	Persen	96%	100%	100%	100%	100%
Cakupan pelayanan lansia	Puskesmas Santun Lansia	1	9	9	29	29
Cakupan pelayanan kesehatan remaja	Persen	88%	88%	84%	84%	84%
Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	Persen	50%	88%	95%	96%	100%
Persentase Remaja putri yang mendapat TTD	Persen	15%	21%	31%	33%	30%
Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif	Kelurahan	51	54	54	54	54
Cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	Persen	7%	53%	69%	80%	100%
Persentase pasien yang mengetahui produk pelayanan rumah sakit	Persen	50%	55%	100%	90%	100%
Cakupan SDM Kesehatan yang terlatih	Persen	50%	60%	70%	80%	90%
Persentase SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	Persen	20%	20%	15%	80%	83%
Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar nasional	Persen	70%	69%	82%	100%	100%
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Persen	98%	92%	97%	98%	90%
Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	Persen	75%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan	Persen	55%	80%	100%	100%	80%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan Tk.I dan Rujukan	Persen	0%	56%	59%	83%	78%
Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS	Persen	0%	0%	12%	100%	100%
Cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial, yang memiliki Jaminan asuransi kesehatan	Persen	0%	98%	118%	94%	78%
Cakupan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	Persen	100%	47%	57%	65%	72%
Jumlah puskesmas BLUD	Puskesmas	0	0	0	10	29
Persentase kepuasan pasien yang disurvei	Persen	71%	78%	79%	80%	82%
Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas	Persen	96%	40%	84%	94%	81%
Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	Persen	97%	54%	79%	84%	45%
Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	Persen	95%	65%	90%	95%	81%
Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar	Persen	80%	85%	100%	100%	100%
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM	Kelurahan	10	16	54	54	54
Persentase pengelolaan limbah rumah sakit sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Bangunan RSUD (Gedung 3)	Paket			1	1	1
Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN	Persen	70%	60%	66%	63%	81%

\* Tidak dilakukan karena terkendala Pandemi Covid-19  
Sumber : Capaian Target Program RPJMD, Tahun 2020

### c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan bidang urusan pekerjaan umum menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari capaian beberapa indikator, antara lain Jalan dan jembatan dalam kondisi baik, cakupan pelayanan air minum dan lain-lain. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas

infrastruktur terutama yang terkait dengan infrastruktur pelayanan dasar. Adapun capaian kinerja pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2020, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.13. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persen	82%	96%	97%	98%	97%
Jalan lingkungan dalam kondisi baik	Persen	45%	50%	55%	60%	67%
Pedestrian jalan yang dibangun	Persen	1%	2%	4%	10%	19%
luas genangan yang tereduksi	Persen	32%	34%	36%	38%	67%
Pemanfaatan air sungai, danau, dan penampung air lainnya sebagai layanan air baku	Persen	0%	14%	15%	17%	18%
Kapasitas debit sungai /tandon	Persen	32%	34%	36%	43%	43%
Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	Persen	100%	100%	100%	0%	
persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Persen	86%	86%	92%	88%	89%
Persentase pelayanan air minum	Persen	83%	84%	84%	85%	85%
Tersedianya sarana dan prasarana gedung perkantoran	Gedung	10	26	7	13	22
Tersedianya sarana dan prasarana gedung non perkantoran	Paket	0	8	15	3	3
Terlayannya masyarakat dalam pengurusan kajian dan rekomendasi teknis serta sertifikat laik fungsi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Terlayannya masyarakat dalam pengurusan keterangan peruntukan lahan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Pembangunan Comunity Center/komunitas kreatif skala kecamatan	Paket	0	1	1	4	1
Jumlah Gedung Perpustakaan Skala Kota dan Skala Kecamatan	Paket	0	0	1	1	6
Bangunan Depo Arsip	Paket	0	0	0	1	1
Kapasitas Debit Saluran	Persen	35%	40%	45%	50%	55%

Sumber : Capaian Target Program RPJMD, Tahun 2020

#### d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Tangerang Selatan menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dari capaian indikator Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha), Terbangunnya sarana penunjang permukiman dan lainnya. Adapun capaian kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.14. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha)	Ha	846	327,15	388,75	336,44	36,58
Terbangunnya sarana penunjang permukiman	Unit	81	39	0	41	33
Penyediaan rumah susun sederhana sewa (unit)	twin blok	0	1	1	1	1
Rumah tidak layak huni menjadi layak huni	Unit	0	206	151	206	205
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan sertifikat keahlian perencana dan perancang rumah dan PSU perumahan skala kecil	Persen	0%	100%	0%	0%	93%
Tersedianya data rumah dan perumahan	Dokumen	3	3	3	2	n/a
Tersedianya regulasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman	Perda	0	0	0	0	0

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya regulasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman	Perwal	4	1	1	5	11
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan pengesahan perteleaan rumah susun	Persen	0%	100%	100%	100%	100%
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun	Persen	0%	100%	100%	100%	0%
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak	Persen	20%	100%	100%	100%	100%
tercatatnya PSU perumahan yang dikuasai sepihak ke dalam neraca aset	Perum	0	10	3	2	18
Pengembangan dan Pembangunan TPU	TPU	7	7	8	10	8
Pengembangan dan Pembangunan TPU	TPK	1	1	1	1	1
Terpeliharanya sarana TPU	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Pembinaan kelembagaan pengelolaan TPU	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Penambahan jumlah PJU terbangun	Titik	2000	3509	3153	4990	3700
Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Capaian Target Program RPJMD, Tahun 2020

Kebutuhan akan rumah merupakan kebutuhan pokok hidup bagi setiap manusia namun untuk mendapatkan sebuah rumah sangatlah tidak mudah pada saat ini. Mengingat harganya yang semakin tinggi hingga semakin banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh rumah terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Permasalahan perumahan ini merupakan permasalahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah di setiap daerah, seperti kondisi yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15. Rekapitulasi Cakupan Rumah Layak Huni Per-Kecamatan di Kota Tangerang Selatan, Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Rumah (unit)			Backlog
		Layak Huni	Tidak Layak	Total	
Ciputat	65.015	47.542	407	47.949	17.066
Ciputat Timur	57.795	41.587	255	41.842	15.953
Pamulang	95.603	78.256	546	78.802	16.801
Pondok Aren	106.054	70.463	539	71.002	35.052
Serpong	49.670	35.595	266	35.861	13.809
Serpong Utara	48.014	35.052	641	35.693	12.321
Setu	23.419	19.619	215	19.834	3.585
<b>Total</b>	<b>445.570</b>	<b>328.114</b>	<b>2.869</b>	<b>330.983</b>	<b>114.587</b>

Sumber : Dinas Perumahan, Perumukiman dan Pertanahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat masih banyaknya penduduk Kota Tangerang Selatan yang belum memiliki rumah maupun penduduk yang memiliki rumah yang tidak layak huni, terlihat bahwa dari 330.983 unit rumah yang disebar di tujuh kecamatan dapat diketahui jumlah rumah yang layak huni berjumlah 328.114 atau 99 persen dari total unit rumah dan jumlah rumah yang tidak layak huni sejumlah 2.869 unit rumah atau 1 persennya dari total unit rumah yang ada.

Dalam tabel diatas juga terlihat bahwa jumlah *backlog* perumahan di Kota Tangerang Selatan mencapai 114.587 unit rumah. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan rumah (pertumbuhan rumah tangga) tidak diimbangi dengan kemampuan penyediaan rumah layak huni dan terjangkau khususnya bagi MBR sesuai dengan angka tambahan kebutuhan rumah.

**e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, terbit dan aman. Capaian di bidang urusan ini dapat diketahui dari berbagai indikator, diantaranya adalah pada tahun 2020 Respon time kebakaran telah mencapai 10,96 menit karena banyaknya posko-posko yang dibangun sehingga mempercepat atas tanggap darurat ketika terjadi bencana, Persentase Mitigasi dan Penanggulangan Bencana mencapai 100 persen. Indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16. Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Respon time kebakaran	Menit	23	20	13	11	10,96
Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban serta harta benda	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat waktu tanggap (response time rate) < 20 Menit terhadap Bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal	Persen	95%	98%	100%	100%	100%
Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat	Kali	25	30	43	13	18
Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah penambahan SDM dan sarana prasarana penunjang	Persen	85%	84%	84%	84%	80%
Persentase Aparatur Satpol PP yang diatih	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Capaian Target Program RPJMD, Tahun 2020

**f. Sosial**

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Permasalahan PPKS terbanyak diantaranya yaitu miskin, penyandang cacat, dan lanjut usia terlantar. Sedangkan penyelenggara urusan sosial di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Adapun capaian kinerja urusan sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.17. Capaian Kinerja Urusan Sosial Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabsos sesuai standar dasar	Persen	20%	50%	52%	54%	37%
Persentase PMKS dan LKS yang diberdayakan	Persen	0%	25%	30%	35%	23%
Peningkatan pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan keagamaan	Dokumen	1	2	5	7	4
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Dokumen	0	7	7	13	7
Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS	Dokumen	0	2	2	2	2
Persentase Rumah Tangga/ Individu Sasaran Yang Mendapatkan Bantuan dan Jaminan Sosial	Persen	75%	80%	80%	85%	87%

Sumber : Capaian Target Program RPJMD, Tahun 2020

### 2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

#### a. Pariwisata

Sektor pariwisata Kota Tangerang Selatan memiliki peranan yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha wisata yang tersebar di 7 kecamatan.

Kunjungan wisata di Kota Tangerang Selatan tiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sebanyak 320 ribu jiwa meningkat menjadi 1,9 juta jiwa pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kunjungan wisatawan di Kota Tangerang Selatan menjadi 704 ribu jiwa. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan sosial berskala besar, sehingga terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestic.

Dengan menurunnya jumlah kunjungan wisata di tahun 2020, maka PAD sektor pariwisata mengalami penurunan juga. PAD sektor pariwisata Kota Tangerang Selatan menurun menjadi Rp249 miliar rupiah dari Rp380 miliar rupiah.

Tabel 2.18. Capaian Kinerja Pariwisata Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PAD dari sektor pariwisata	Rupiah	243.038.015.992	283.122.146.291	332.594.762.950	379.727.318.216	248.556.780.636
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisatawan	320.229	544.206	1.388.543	1.951.999	704.857
Jumlah usaha terkait ekonomi kreatif dan icon tangsel	Pelaku ekonomi kreatif	n/a	143	300	50	50

Sumber : Capaian Target Program RPJMD, Tahun 2020

#### b. Pertanian

Kinerja capaian yang dihasilkan dari Program Pengembangan pertanian sudah sesuai target, yaitu sebesar 100%, meliputi nilai tukar petani/pelaku usaha pertanian, presentase kesehatan hewan dan presentase bahan asal hewan yang memenuhi kriteria ASUH.

Tabel 2.19. Capaian Kinerja Pertanian Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Tukar Petani/Pelaku Usaha Pertanian	Persen	101%	102%	114%	115%	100%
Presentase Kesehatan Hewan	Persen	79%	80%	99%	98%	97%
Presentase Bahan Asal Hewan yang Memenuhi Kriteria ASUH	Persen	77%	78%	100%	86%	88%
Penambahan Sarana Prasarana Kawasan Pertanian Terpadu	Persen	0%	0%	100%	20%	100%

Sumber : Capaian Target Program RPJMD, Tahun 2020

### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

#### a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB (derajat keterbukaan) merupakan proporsi volume perdagangan terhadap PDRB. Semakin besar derajat keterbukaan menunjukkan semakin terbukanya perekonomian suatu wilayah. Keterbukaan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan grafik di bawah ini, dari tahun 2016 hingga 2020 nilai ekspor Kota Tangerang Selatan selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor. Apabila dibandingkan nilai volume perdagangan total dengan nilai PDRB, nilai volume perdagangan selalu

lebih tinggi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Nilai volume dari perdagangan Kota Tangerang Selatan didominasi oleh impor.

Derajat keterbukaan perekonomian Kota Tangerang Selatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 secara tren mengalami penurunan. Tabel di bawah ini memberikan gambaran mengenai kondisi derajat keterbukaan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2016 derajat keterbukaan ekonomi Kota Tangerang Selatan adalah 124,26%, derajat keterbukaan ekonomi pada tahun 2017 adalah 114,53%, derajat keterbukaan ekonomi pada tahun 2018 adalah 112,54, derajat keterbukaan ekonomi tahun 2019 adalah 105,26, dan derajat keterbukaan ekonomi pada tahun 2020 adalah 104,47.

Tabel 2.20. Derajat Keterbukaan Ekonomi Kota Tangerang Selatan 2016-2020

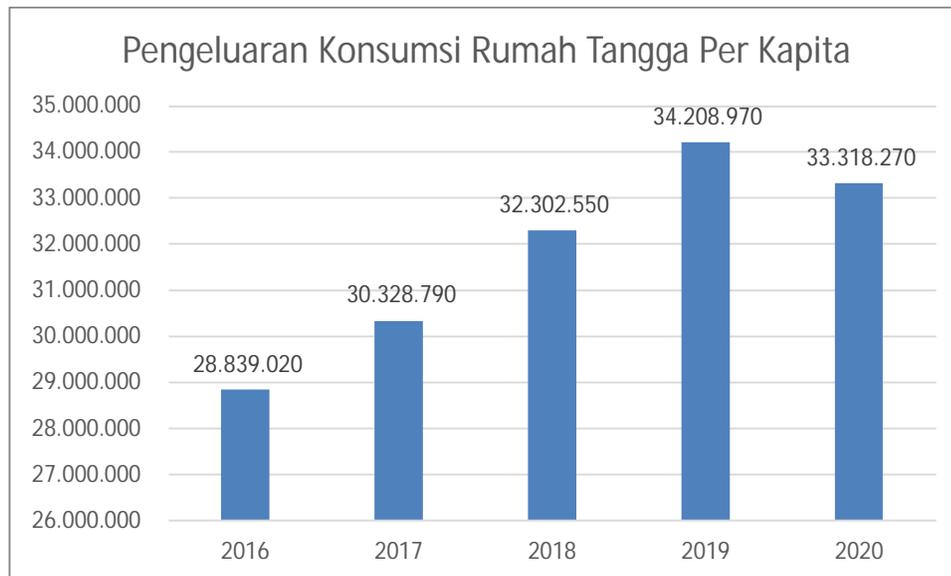
Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Ekpor + Impor (Juta Rupiah)	76.171.206	77.856.664	84.452.610	87.143.278	86.242.212
PDRB (Juta Rupiah)	61.300.797	67.980.904	75.043.782	82.790.484	82.551.233
Rasio (%)	124,26%	114,53%	112,54%	105,26%	104,47%

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan 2020

#### b. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi makanan merupakan faktor yang sangat penting karena makanan merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai macam barang konsumsi (termasuk sandang, perumahan, bahan bakar, dan konsumsi lainnya) yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Banyaknya variasi dari konsumsi tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi.

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Grafik di bawah ini menunjukkan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kota Tangerang Selatan tahun 2016 hingga tahun 2020. Berdasarkan grafik konsumsi rumah tangga di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pengeluaran konsumsi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Jumlah pengeluaran konsumsi pada tahun 2016 adalah 28,83 juta, pada tahun 2017 adalah 30,32 juta, pada tahun 2018 adalah 32,30 juta, pada tahun 2019 adalah 34,20 juta, dan pada tahun 2020 (perhitungan sementara) adalah 33,31 juta.



Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan 2021

Gambar 2.17. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Tangerang Selatan 2016-2020

### c. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Konsumsi akhir rumah tangga memiliki peranan terbesar penggunaan produksi barang dan jasa di Kota Tangerang Selatan. Dalam periode tahun 2016 – 2019 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan akibat terjadinya pandemi Covid-19 di sepanjang tahun tersebut.

Tabel 2.21. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kota Tangerang Selatan, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga/Total of Household Consumption					
a. ADHB / Current Prices (Miliar Rp)	45.963,98	49.887,80	54.795,08	59.794,07	59.959,72
b. ADHK 2010/2010 Constant Prices (Miliar Rp)	37.945,26	40.026,10	42.268,28	44.468,99	43.694,29
Proporsi terhadap PDRB/ Proportion to GRDP					
( % ADHB / Current Prices)	74,98	73,39	73,02	72,22	72,63
Rata-rata konsumsi per-Kapita/ Average of per-capita consumption (Ribu Rp/Thousand Rp)					
a. ADHB / Current Prices (Thousand Rp)	28.839,02	30.328,79	32.302,55	34.208,97	33.318,27
b. ADHK 2013/2013 Constant Prices (Thousand Rp/Trillion Rp)	23.807,87	24.333,47	24.917,81	25.441,29	24.279,93
Jumlah penduduk/Number of population (000 orang/person)	1.593.812	1.644.899	1.696.308	1.747.906	1.799.605

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan 2021

Selama periode 2016 – 2019 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB menurun, yaitu 74,98 persen (2016); 73,39 persen (2017); 73,02 persen (2018); 72,02 persen (2019) dan 72,63 persen (2020). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 74,98 persen dan terendah pada tahun 2019 sebesar 72,02 persen. Peningkatan di tahun 2020 disebabkan oleh turunnya peranan ekspor antar daerah

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong masyarakat untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi perkapita. Secara umum, rata-rata konsumsi perkapita terus meningkat dari

tahun ke tahun, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2016, secara umum setiap individu di Kota Tangerang Selatan menghabiskan dana sekitar 28,84 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 30,33 juta rupiah (2017), 32,30 juta rupiah (2018), 34,21 juta rupiah (2019) dan menurun menjadi 33,32 juta rupiah di tahun 2020.

#### d. Fokus Wilayah/Infrastruktur

Dalam melihat ketaatan pembangunan Kota Tangerang Selatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011 - 2031 maka kita dapat menguraikan apa yang sudah dilakukan dan proyeksi pembangunan Kota Tangerang Selatan terhadap tata ruang wilayahnya berdasarkan RTRW 2011-2031, antara lain prasarana dan sarana penunjang lain yang menjadi potensi investasi yang dikembangkan di Kota Tangerang Selatan, antara lain:

- 1) Kereta Api. Sebagai sarana transportasi massal, kereta api merupakan andalan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang menghubungkan Kota Rangkasbitung - Kota Tangerang Selatan - Kota Jakarta dan sudah dengan jalur rel ganda (double track). Stasiun kereta rel listrik (KRL) berjumlah 5 buah dan tersebar di tiga kecamatan yaitu Serpong, Ciputat dan Ciputat Timur. Wilayah Kota Tangerang Selatan yang dilalui oleh lintasan rel KRL antara lain wilayah Serpong (Stasiun Pasar Serpong), Stasiun Rawa Buntu (BSD), Stasiun Jurang Mangu (Pondok Aren), Ciputat (Stasiun Jombang) dan Ciputat Timur (Stasiun Pondok Ranji). Kereta rel listrik yang melintas adalah KRL penumpang dan kereta api barang. Dalam RTRW, direncanakan pengembangan fasilitas "park and ride" yaitu lahan parkir kendaraan yang terletak pada fasilitas transportasi publik seperti stasiun kereta dan terminal. Fasilitas tersebut memudahkan para penglaju (*commuter*) yang memiliki kendaraan pribadi untuk berpindah ke transportasi publik.
- 2) Bis Antar Kota – Antar Propinsi. Sarana Transportasi ini juga merupakan penggerak mobilitas masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai sarana utama dalam kegiatan yang menghubungkan Kota Tangerang Selatan dengan Kota Jakarta dan kota-kota lainnya. Saat ini juga sudah beroperasi feeder Bus Transjakarta dengan trayek BSD – Jakarta, Pondok Aren (Bintaro Jaya) – Jakarta dan BSD – Balaraja.
- 3) Angkutan Dalam Kota. Sarana Transportasi Dalam Kota merupakan salah satu transportasi yang dijadikan andalan untuk aktivitas sehari-hari masyarakat Kota Tangerang Selatan.
- 4) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih/Air Minum. Masyarakat Kota Tangerang Selatan memakai air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan kegiatan lainnya. Di Kota Tangerang Selatan, cukup banyak sumber air baku yang bisa diolah menjadi sumber air bersih bagi berbagai kebutuhan. Wilayah Kota Tangerang Selatan setidaknya dialiri oleh tiga sungai yang airnya cukup melimpah yaitu Sungai Cisadane, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Kali Angke. Selain itu, masih terdapat sembilan situ dan danau yang memiliki kadar dan kapasitas air yang layak diolah. Untuk itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan diharapkan memiliki instalasi pengolahan air minum yang langsung dikelola atau di bawah pengawasan pemerintah daerah.
- 5) Pembangunan Permukiman Vertikal. Dengan kepadatan penduduk Kota Tangerang Selatan yang mencapai 10.484 jiwa/km<sup>2</sup>, maka akan semakin sulit untuk membangun permukiman yang memakai lahan luas. Sehingga dimungkinkan kawasan permukiman super blok seperti apartemen, kondominium, rusunawa, flat dan sejenisnya untuk dikembangkan karena letak Kota Tangerang Selatan yang berdekatan dengan DKI Jakarta dan dengan akses mudah dari berbagai arah. Pengembangan permukiman vertikal menjadi salah satu alternatif yang dapat membangun kawasan permukiman modern dengan infrastruktur yang memadai dan fasilitas pendukung masyarakat perkotaan modern.
- 6) Kawasan Jasa dan Perdagangan Terpadu. Di sepanjang koridor Jl Pahlawan Seribu, BSD City Serpong mulai banyak bermunculan gedung-gedung baru yang megah. Pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, pusat hiburan dan kuliner, pusat perkantoran, rumah sakit, pusat pendidikan telah dibangun. Lahan untuk pembangunan office tower dan sarana penunjang

lain juga tersedia. Oleh karena itu, sangatlah prospektif apabila para investor dapat menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan kawasan ini.

Kawasan Bintaro juga telah berkembang dan menjadi salah satu kawasan yang diperhitungkan oleh para investor. Berbagai infrastruktur di kawasan SCBD Bintaro Jaya berupa gedung perkantoran, pusat belanja, rumah sakit, pusat pendidikan telah berdiri di kawasan ini. Untuk memperlancar arus lalu lintas, di bundaran Bintaro Sektor IX telah dibangun fly over yang menghubungkan simpul-simpul bisnis dan jasa, termasuk jasa pendidikan, dengan dibangunnya Universitas pembangunan Jaya.

Bidang Jasa dan perdagangan juga terus dikembangkan di kawasan Ciputat-Pamulang. Sebagai kawasan Pusat Pendidikan skala nasional dengan adanya UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Terbuka, maka daerah Ciputat dan Pamulang dapat dikembangkan sebagai kawasan jasa pendidikan.

- 7) Pengembangan Tangsel sebagai pusat MICE (*Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions*). Sebagai kota perdagangan dan jasa, maka salah satu sarana perkotaan dan dapat dijadikan ikon kota Tangerang Selatan adalah pembangunan convention center, atau trade exhibition center atau gedung konser. Sesuai dengan motto cerdas, modern dan religius, maka Kota Tangerang Selatan mencari para investor untuk membangun gedung yang memiliki ciri khas daerah Kota Tangerang Selatan tetapi juga modern. Dimana dapat menjadi pusat kesenian Kota Tangerang Selatan dan dapat digunakan juga untuk berbagai kegiatan pameran, rapat atau forum pertemuan resmi skala nasional dan internasional. Pembangunannya dapat dibangun secara terpadu dengan dilengkapi fasilitas office tower atau hotel bintang lima yang dapat dimanfaatkan juga sebagai tempat penyewaan ruang kantor.
- 8) Sektor Industri dan Pergudangan. Melihat luas lahan yang tersedia, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam arah dan tujuan pembangunan, tidak menempatkan sektor industri dan pergudangan sebagai andalan. Saat ini peruntukan lahan untuk industri hanya 1,14 % saja dari luas lahan Kota Tangerang Selatan, atau sekitar 16,67 hektar. Industri yang dikembangkan pun ditujukan kepada *green industry* dan ramah lingkungan. Pemilihan industri yang cocok untuk itu adalah industri yang tidak mempunyai banyak limbah kimia. Industri pembuatan produk dari bahan setengah jadi seperti pembuatan bola di Pondok Cabe, atau industri garmen serta industri perakitan lainnya yang ramah lingkungan adalah salah satu contoh yang bisa dikembangkan. Selain itu, dengan adanya fasilitas pergudangan di Taman Tekno BSD dan kawasan Multiguna Serpong Utara, melengkapi sarana investasi penanaman modal pada sektor industri maupun pergudangan yang ramah lingkungan.
- 9) Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kreatif ekonomi memiliki potensi yang sangat besar dalam ekonomi saat ini. Inti perekonomian saat ini sedang mengalami pergeseran dari ekonomi berbasis sumber daya alam kepada ekonomi yang berbasis pengetahuan dan inovasi. Hal ini juga sejalan dengan kecenderungan perkembangan "Ekonomi Hijau" atau "Bisnis Hijau" yang menjadikan keberlanjutan lingkungan sebagai hal yang utama di samping pertumbuhan dan keuntungan. Tangerang Selatan sebagai kota yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah namun memiliki sumber daya manusia dengan kualitas yang cukup baik, penduduk berusia muda, dan komunitas kreatif, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonominya.
- 10) Potensi Wisata di Tangerang Selatan terdapat beberapa lokasi kunjungan wisata. Industri pariwisata di Tangsel, terus meningkat seiring dengan kesiapan infrastruktur pendukung sehingga sektor ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan terlihat antara lain dari angka kunjungan wisatawan yang ditargetkan 381.861 per tahun, kini tercatat 1.951.999 wisatawan sampai dengan akhir tahun 2019.

Kawasan pariwisata yang direncanakan dalam RTRW seluas kurang lebih 5,97 hektar. Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi pengembangan wisata alam dan rekreasi diarahkan di Sungai Cisadane, Situ Gintung, Situ Ciledug, Situ Pondok Jagung, taman kota dan hutan kota, pengembangan wisata belanja diarahkan di Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Ciputat Timur serta pengembangan wisata kuliner di Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren

Pertumbuhan sektor pariwisata yang terus menjadi perhatian Pemerintah Daerah akan didukung dengan pusat perbelanjaan dan wisata baru seperti TransStudio di BSD, Community Center di kecamatan Pamulang yang dirancang sebagai ruang luar publik yang mewadahi berbagai aktivitas masyarakat, kedalam tiga fungsi utama yaitu fungsi olahraga, fungsi komunitas dan fungsi kesenian dan kebudayaan, termasuk Tangsel akan memiliki Tangsel HUB dengan nama Gallery Koperasi dan Innovation Centre.

#### e. Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu aspek penting daya saing daerah yaitu stabilitas keamanan. Daerah dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang lebih baik akan memiliki daya saing ekonomi yang lebih tinggi. Pada umumnya untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial faktor keamanan menjadi prasyarat bagi dunia usaha dan masyarakat.

Angka kriminalitas yang tertangani selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 cenderung fluktuatif dan rata-rata dapat tertangani setiap tahunnya. Angka kriminalitas tertangani ini berkaitan dengan cybercrime, terutama penipuan online. Jika dirata-rata terjadi sekitar 4 kasus setiap harinya, secara umum kondisi tersebut masih tergolong kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat. Meskipun demikian, tetap diperlukan upaya untuk menekan meningkatnya angka kriminalitas di Kota Tangerang Selatan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat untuk turut menjaga keamanan lingkungannya.

Nilai Koefisien ICOR Kota Tangerang Selatan tahun 2019 sebesar 5,77 yang berarti bahwa untuk menghasilkan tambahan (increment) Rp. 1 milyar output diperlukan tambahan modal Rp. 5,77 milyar rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan 1 satuan output (NTB) di Kota Tangerang Selatan dibutuhkan investasi sebesar 5,77 milyar rupiah.

Salah satu diantara kegunaan ICOR adalah untuk menghitung kebutuhan investasi riil (PMTB) dalam rangka mewujudkan target indikator ekonomi tertentu yang telah ditetapkan pemerintah dalam dokumen rencana pembangunan.

Tabel 2.22. Nilai Koefisien ICOR Kota Tangerang Selatan, 2010-2019

Tahun	ICOR									
	Leg 0	Leg 1	Leg 2	Leg 3	Leg 4	Leg 5	Leg 6	Leg 7	Leg 8	Leg 9
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)
2010	5,77	5,25	4,91	4,47	4,47	4,63	4,58	3,98	4,63	4,58
2011	5,71	5,34	4,86	4,86	5,03	4,97	4,33	4,00	3,74	
2012	5,54	5,04	5,04	5,22	5,16	4,50	4,15	3,88		
2013	5,27	5,27	5,45	5,39	4,69	4,34	4,05			
2014	5,55	5,74	5,68	4,94	4,57	4,27				
2015	5,94	5,87	5,12	4,57	4,27					
2016	6,14	5,34	4,94	4,61						
2017	5,83	5,38	5,49							
2018*	5,88	5,49								
2019**	5,77									
ICOR Rata-rata	5,74	5,41	5,14	4,91	4,78	4,61	4,35	3,99	4,63	4,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan

Cat: \*) : Angka perubahan

\*\*): Angka sementara

#### f. Fokus Sumber Daya Manusia

Gambaran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat juga dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal yang merupakan gambaran kualitas SDM suatu wilayah. Dengan semakin banyaknya persentase penduduk yang menamatkan pendidikan di

pendidikan menengah keatas maka kualitas SDM suatu wilayah akan semakin baik, karena dengan SDM yang memadai maka akan lebih mudah untuk mengembangkan kemampuan, kreatifitas dan kualitasnya.

Tabel 2.23. Persentase Penduduk Berumur 15 tahun Ke atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Laki-laki+Perempuan (%)
Tidak Mempunyai Ijazah	7,13	7,81	7,47
SD/MI	7,90	13,30	10,59
SMP/MTs	15,02	17,98	16,49
SMA/MA	30,89	27,82	29,36
SMK/MAK	8,16	7,76	7,96
Diploma I dan Diploma II	0,26	0,98	0,62
Akademi/Diploma III	5,55	4,85	5,20
Diploma IV/S1/S2/S3	25,08	19,49	22,30

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2020

## 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

### 2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2020

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja Tahun 2020 dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut tetap dapat memberikan informasi penting mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi terhadap hasil RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Berdasarkan evaluasi hasil RKPD Tahun 2020, maka kelengkapan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 pada tingkat kegiatan di 38 Perangkat Daerah yang telah dilaksanakan pada APBD Tahun 2020 sebanyak 1.316 kegiatan dari 107 program. Hasil pelaksanaan kegiatan oleh perangkat daerah pada Tahun 2020, diperoleh informasi bahwa tingkat capaian kinerja fisik adalah 94,28 persen dan capaian (penyerapan) anggaran adalah 87,60 persen. Berikut ini Rekapitulasi Realisasi Fisik Dan Keuangan RKPD s.d Triwulan IV TA 2020 seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.24. Rekapitulasi Realisasi Fisik Dan Keuangan RKPD s.d Triwulan IV TA 2020

No.	Perangkat Daerah	Pagu Belanja (Rp.)	Realisasi		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	267.089.454.775	235.303.557.075	88,10	92,10
2	DINAS KESEHATAN	314.485.085.096	263.660.084.954	83,84	89,00
3	RUMAH SAKIT UMUM	156.997.681.822	144.634.514.944	92,13	99,68
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	326.432.410.694	291.759.449.935	89,38	97,12
5	DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	514.862.546.294	459.857.571.405	89,32	98,03
6	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	178.350.000.000	138.692.433.291	77,76	84,77
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	17.367.500.000	16.625.528.732	95,73	99,27
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	6.283.860.000	5.455.875.929	86,82	100,00
9	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	16.535.670.000	13.746.650.698	83,13	96,84
10	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.340.525.000	4.109.951.930	94,69	97,78
11	DINAS SOSIAL	6.233.172.500	6.184.391.271	99,22	99,78
12	DINAS KETENAGAKERJAAN	8.066.975.000	7.746.128.735	96,02	96,52
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	14.488.197.085	12.308.178.422	84,95	96,84
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	79.193.114.964	64.331.451.888	81,23	84,33
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.008.216.091	9.706.516.927	96,99	100,00

No.	Perangkat Daerah	Pagu Belanja (Rp.)	Realisasi		
			KEUANGAN		FISIK
			(Rp)	(%)	(%)
16	DINAS PERHUBUNGAN	20.822.087.500	19.778.932.178	94,99	96,89
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	59.399.785.508	52.486.514.728	88,36	88,96
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	8.055.024.188	6.035.795.841	74,93	82,30
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	9.826.350.000	9.008.977.344	91,68	98,93
20	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	9.246.460.829	8.520.501.076	92,15	93,49
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	6.387.425.000	5.719.041.121	89,54	97,94
22	DINAS PARIWISATA	13.850.772.303	9.832.973.794	70,99	79,00
23	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	6.282.802.050	4.724.355.765	75,20	74,00
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	9.756.110.000	9.187.754.934	94,17	98,46
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	13.892.632.400	12.159.466.464	87,52	97,45
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	31.183.136.522	24.262.005.228	77,80	90,44
27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.445.812.456	13.388.543.442	86,68	98,14
28	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	12.655.144.854	10.063.817.979	79,52	98,20
29	SEKRETARIAT DPRD	88.822.789.360	83.196.905.358	93,67	99,15
30	SEKRETARIAT DAERAH	74.240.078.000	64.225.859.440	86,51	98,44
31	INSPEKTORAT	11.789.550.500	10.574.943.362	89,70	97,99
32	KECAMATAN CIPUTAT	15.393.790.650	14.652.204.599	95,18	98,63
33	KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	14.769.876.800	14.168.784.144	95,93	99,00
34	KECAMATAN PAMULANG	18.957.161.550	17.998.805.992	94,94	98,71
35	KECAMATAN SERPONG	17.084.804.956	15.673.845.530	91,74	97,43
36	KECAMATAN SERPONG UTARA	15.010.898.970	14.174.545.763	94,43	96,13
37	KECAMATAN PONDOK AREN	22.691.840.600	21.607.865.139	95,22	99,30
38	KECAMATAN SETU	14.604.525.157	13.796.206.283	94,47	97,93
<b>JUMLAH</b>		<b>2.430.903.269.474</b>	<b>2.129.360.931.640</b>	<b>87,60</b>	<b>94,28</b>

Sumber : Monitoring dan Evaluasi RKPD, PDEP Bappeda, Per 18 Februari 2021

Tahun 2020 merupakan awal masuknya pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan dampak terhadap kinerja keuangan dan fisik, sampai dengan Triwulan IV realisasi keuangan keseluruhan terealisasi sebesar Rp2.129.360.931.640,- (87,60%) dari total anggaran Rp2.430.903.269.474,- atas realisasi tersebut maka, Kinerja Keuangan Belanja Langsung secara umum dapat dikategorikan "TINGGI", sedangkan untuk kinerja fisiknya termasuk "SANGAT TINGGI" dengan capaian fisik 94,28%. Tabel berikut memperlihatkan skala nilai peringkat kinerja keuangan dan output kegiatan program di 38 Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut.

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah Perangkat Daerah (Keuangan)	Jumlah Perangkat Daerah (Fisik)
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	18	30
2	76% ≤ 90%	Tinggi	17	8
3	66% ≤ 75%	Sedang	3	0
4	51% ≤ 65%	Rendah	0	0
5	≤ 50%	Sangat Rendah	0	0
<b>JUMLAH</b>			<b>38</b>	<b>38</b>

Sumber : Monitoring dan Evaluasi RKPD, PDEP Bappeda, 2021.

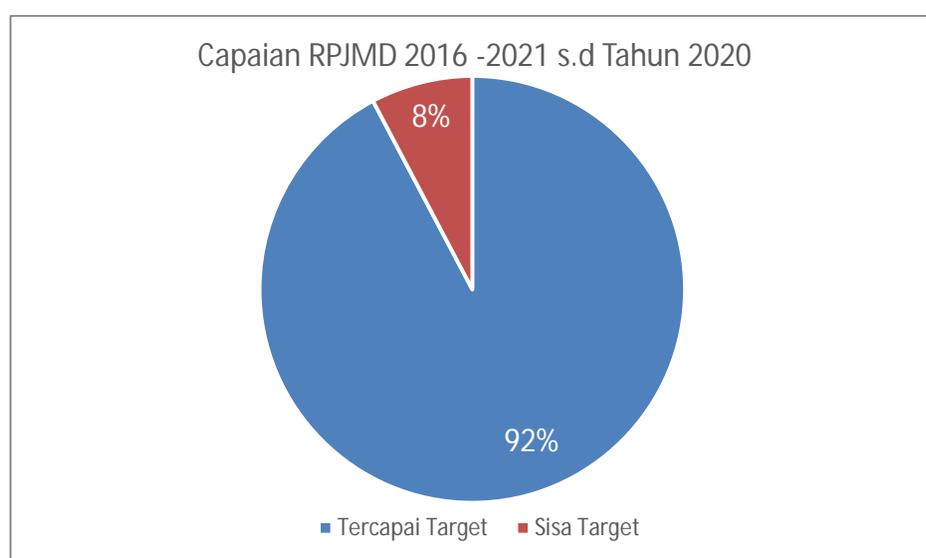
Berdasarkan hasil evaluasi telah teridentifikasi tidak adanya Perangkat Daerah yang kinerja keuangan dan fisiknya masih Rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masing-masing Perangkat Daerah telah mengoptimalkan serapan anggaran sehingga realisasi fisiknya turut meningkat.

Untuk menjaga masyarakat dan perekonomian, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan stimulus melalui Instruksi Walikota No.910/1154/BPKAD tentang Rasionalisasi dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan TA 2020. Kebutuhan anggaran tersebut digunakan untuk pencegahan COVID-19, Jejaring Pengaman Sosial dan Pemulihan Perekonomian yang dialokasikan pada Belanja Tidak Terduga sebesar Rp80.168.392.168,51 dengan realisasi sebesar Rp77.146.226.583,00 atau 96,23% dari anggaran.

Seiring dengan dampak COVID-19 yang semakin meluas, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan upaya penanganan melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBD TA 2020. Kondisi ini telah berpengaruh kepada realisasi Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD) seperti penundaan dan peniadaan kegiatan dalam rangka mengurangi dan mencegah angka penyebaran COVID-19.

### 2.2.2. Evaluasi Capaian RPJMD sampai Tahun 2020

Berdasarkan hasil evaluasi capaian RPJMD sampai Tahun 2020, menunjukkan kinerja yang sangat baik, dimana dari 299 indikator program RPJMD 2016-2021 telah tercapai 92 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan *output* kegiatan telah optimal dalam mendukung pencapaian RPJMD sesuai dengan target yang ditetapkan. Hubungan kinerja pembangunan menunjukkan kondisi yang selaras, artinya program dan kegiatan dalam masing-masing urusan yang dilaksanakan telah berhasil dijaga keterkaitan dan kontribusinya dalam pelaksanaan program. Sedangkan untuk beberapa indikator program yang belum optimal dalam pencapaian target, maka melalui **APBD Tahun Anggaran 2021 telah menganggarkan** untuk mengejar target pencapaian RPJMD 2016-2021 melalui program dan kegiatan, yang diprediksi mencapai diatas 99 persen sampai dengan akhir tahun 2021.



Secara rinci dapat disampaikan bahwa program yang memiliki prioritas untuk tahun anggaran 2021 serta mendukung pencapaian sisa target RPJMD 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

BIDANG URUSAN	PROGRAM
Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat Daerah	Program Administrasi Umum

BIDANG URUSAN	PROGRAM
Urusan Pemerintahan Bidang Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
	Program pendidik dan tenaga kependidikan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Penanganan Bencana
	Program Rehabilitasi Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Program penataan bangunan gedung
	Program penyelenggaraan penataan ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Permukiman
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan
Urusan Pemerintahan Bidang lingkungan Hidup	Program Pengembangan Perumahan
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Urusan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)
	Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Pelayanan Penanaman Modal
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

BIDANG URUSAN	PROGRAM
	Program Pengembangan UMKM
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Urusan Pemerintahan Bidang Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
	Program Pengembangan Ekspor
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata

Sumber : RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2021

Merujuk pada rencana serta hasil pencapaian pelaksanaan RPJMD 2016-2021, kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang akan dilaksanakan sebagaimana disebutkan diatas, antara lain:

1. Meningkatkan peran koordinasi dan kerjasama berkelanjutan untuk mencapai perencanaan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan dinamika perubahan lingkungan strategis daerah dan nasional.
2. Mewujudkan perencanaan dan konsistensi penganggaran serta pengendalian rencana pembangunan daerah sesuai target RPJMD.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pencaian target akhir RPJMD tahun 2021.
4. Melakukan percepatan implementasi Visi dan Misi kepala Daerah Terpilih tahun 2020, guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2022, yang dijabarkan dalam arah pembangunan, sebagai berikut:
  - a. Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan
  - b. Pengembangan sistem jaringan transportasi publik masal perkotaan
  - c. Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan
  - d. Peningkatan daya beli masyarakat melalui konsep pemberdayaan masyarakat, koperasi dan program padat karya
  - e. Efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan dan penguatan kualitas pelayanan publik

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.25. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD s.d Tahun 2020

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
1	PAUD dan Pendidikan NonFormal	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,62	14,36	5.025.151.032	14,50	4.187.340.000	14,62	3.748.893.694	100%	90%	100%	Disdikbud
	PAUD dan Pendidikan NonFormal	APM PAUD	Persen	32,30%	38,51%		30,30%		32,30%		100%		100%	Disdikbud
2	Pendidikan Sekolah Dasar	APM SD/MI	Persen	99,99%	99,99%	112.490.752.817	99,99%	11.889.677.873	99,99%	8.477.463.479	100%	71%	100%	Disdikbud
3	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM SMP/MTS	Persen	97,50%	97,50%	47.271.599.027	97,35%	2.287.750.840	97,50%	818.605.463	100%	36%	100%	Disdikbud
4	Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Uji Kompetensi Guru		85,00	80	78.341.649.830	85,00	78.650.434.800	85	75.946.966.380	100%	97%	100%	Disdikbud
5	Pengembangan pelayanan kesehatan	Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas	Puskesmas	58	8	2.410.865.878	11	2.380.905.800	-	1.633.254.700	0%	69%	62%	Dinkes
	Pengembangan pelayanan kesehatan	Persentase akreditasi unit Labkesda	Persen	60%	50%		55%		50%		91%		83%	Dinkes
	Pengembangan pelayanan kesehatan	Jenis pelayanan sesuai standar pelayanan minimal rumah sakit	Jenis pelayanan	21	20		21		20		95%		95%	RSU
6	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Persentase alat kesehatan sesuai standar kesehatan	Persen	85%	80%	24.790.516.900	85%	21.776.910.349	85%	11.683.595.150	100%	54%	100%	Dinkes
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan	Jumlah puskesmas yang	Puskesmas	35	32		34		33		97%		94%	Disbangtar ung

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
	prasarana pelayanan kesehatan	terbangun												
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Jumlah bangunan posyandu yang dibangun	Posyandu	151	126		132		139		100%		92%	Disbangtarung
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Jumlah bangunan puskesmas yang dikembangkan	Puskesmas	3	4		1		-		0%		100%	Disbangtarung
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas yang perlu adanya Tambah Ruang Sesuai Kebutuhan Pelayanan	Puskesmas	10	-		-		-				100%	Disbangtarung
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Jumlah Bangunan PPKT	Sarana dan prasarana Olahraga	100%	100%		0%		-				100%	Disbangtarung
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Persentase Gudang terbangun	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%	Disbangtarung
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Tingkat Kecamatan dibangun	Unit	2	-		1		2		100%		100%	Disbangtarung
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	Puskesmas	14	1		-		-				86%	Disbangtarung
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Tingkat instrumen akreditasi rumah sakit	Bab (Level)	12	15		12		15		100%		100%	RSU

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
7	Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan reagen dan bmhp laboratorium di puskesmas dan labkesda	Persen	95%	95%	21.717.608.746	95%	17.742.275.720	99%	16.144.457.122	100%	91%	100%	Dinkes
	Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya	Persen	99%	97%		98%		100%		100%		100%	Dinkes
	Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan	Persentase resep sesuai dengan formularium	Persen	90%	98%		85%		99%		100%		100%	RSU
8	Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	1/Per 100.000 kelahiran hidup	1,0	1,1	928.698.500	1,0	708.294.900	0,8	603.038.100	80%	85%	100%	Dinkes
	Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	32/Per 100.000 kelahiran hidup	32	35		34		32		94%		100%	Dinkes
	Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga	Cakupan pelayanan kesehatan balita	Persen	97%	100%		97%		100%		100%		100%	Dinkes
	Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga	Cakupan pelayanan kesehatan siswa SD/setingkat	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		83%	Dinkes
	Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga	Cakupan pelayanan lansia	Puskesmas Santun Lansia	32	29		30		29		97%		91%	Dinkes

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
	Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	Persen	80%	84%		80%		84,23%		100%		83%	Dinkes
9	Program perbaikan gizi masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100%	100%	3.021.002.040	100%	1.205.095.900	100%	1.100.498.700	100%	91%	83%	Dinkes
	Program perbaikan gizi masyarakat	Persentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	Persen	95%	96%		95%		100%		100%		100%	Dinkes
	Program perbaikan gizi masyarakat	Persentase Remaja putri yang mendapat TTD	Persen	40%	33%		35%		30%		87%		75%	Dinkes
10	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif	Kelurahan	54	54	10.695.355.500	54	8.319.679.727	54	7.659.662.500	100%	92%	100%	Dinkes
	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	Persen	100%	80%		100%		100%		100%		100%	Dinkes
	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase pasien yang mengetahui produk pelayanan rumah sakit	Persen	75%	90%		70%		100%		100%		100%	RSU

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
11	Pengembangan SDM kesehatan	Cakupan SDM Kesehatan yang terlatih	Persen	90%	80%	533.404.000	90%	163.330.000	90%	132.776.736	100%	81%	100%	Dinkes
	Pengembangan SDM kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	Persen	50%	80%		40%		83%		100%		100%	RSU
12	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar nasional	Persen	100%	100%	5.129.201.210	100%	3.588.793.003	100%	2.449.465.359	100%	68%	83%	Dinkes
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Persen	94%	98%		93,5%		89,78%		96%		100%	Dinkes
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspn	Persen	92%	100%		92%		100%		100%		100%	Dinkes
13	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer	Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	Persen	100%	100%	155.755.170.336	100%	145.451.477.783	100%	130.486.003.576	100%	90%	83%	Dinkes
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan	Cakupan Pelayanan kesehatan	Persen	80%	100%		80%		80%		100%		100%	Dinkes

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
	komplementer	rujukan												
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer	Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan Tk.I dan Rujukan	Persen	40%	83%		38%		78%		100%		100%	Dinkes
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer	Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS	Persen	85%	100%		80%		100%		100%		100%	Dinkes
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer	Cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial , yang	Persen	77%	94%		77%		77,78%		100%		100%	Dinkes

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
		memiliki Jaminan asuransi kesehatan												
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	Persen	72,0%	65%		72%		72%		100%		100%	Dinkes
14	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas BLUD	Puskesmas	10	10	550.000.000	3	27.318.201.405	29	20.947.098.341	100%	77%	100%	Dinkes
	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persentase kepuasan pasien yang disurvei	Persen	76%	80%		75%		82%		100%		100%	RSU
15	Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas	Persen	60%	94%	2.003.017.228	55%	354.557.000	81,15%	302.996.800	100%	85%	100%	Dinkes
	Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	Persen	62%	84%		60%		45%		75%		100%	Dinkes
	Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	Persen	80%	95%		80%		80,92%		100%		100%	Dinkes

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
	Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%	Dinkes
	Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM	Kelurahan	54	54		40		54		100%		100%	Dinkes
	Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	Persentase pengelolaan limbah rumah sakit sesuai standar	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%	RSU
16	Pembangunan jalan dan jembatan	Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persen	90%	98%	195.219.521.326	90%	168.324.865.213	97%	152.234.876.470	100%	90%	100%	Dinas PU
	Pembangunan jalan dan jembatan	Jalan lingkungan dalam kondisi baik	Persen	70%	60%		65%		67%		100%		96%	Dinas PU
	Pembangunan jalan dan jembatan	Pedestrian jalan yang dibangun	Persen	7%	10%		6%		19%		100%		100%	Dinas PU
17	Pengendalian banjir	luas genangan yang tereduksi	Persen	42%	38%	16.614.233.634	40%	15.972.800.000	67%	15.899.267.820	100%	100%	100%	Dinas PU
18	Pengembangan pengelolaan dan konversi sungai danau dan sumber daya air lainnya	Pemanfaatan air sungai, danau, dan penampung air lainnya sebagai layanan air baku	Persen	20%	17%	59.039.325.390	18%	36.619.486.008	18%	30.639.551.296	100%	84%	90%	Dinas PU
	Pengembangan pengelolaan dan konversi sungai danau dan sumber	Kapasitas debit sungai /tandon	Persen	42%	43%		40%		43%		100%		100%	Dinas PU

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
	daya air lainnya													
19	Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	Persen	100%	100%	1.250.377.000	100%	551.120.000	100%	525.170.000	100%	95%	100%	Bappeda
	Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai rencana rinci tata ruang beserta rencana teknisnya melalui peta analog dan peta digital	Persen	100%	91%		95%		4%		4%		95%	Disbangtar ung
20	Pengelolaan sarana air minum dan air limbah	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Persen	89,85%	87,73%	7.676.974.258	88,80%	4.982.015.100	88,80%	2.113.334.150	100%	42%	100%	Disbangtar ung
	Pengelolaan sarana air minum dan air limbah	Persentase pelayanan air minum	Persen	85,5%	84,50%		85,00%		84,50%		99%		85%	Disbangtar ung
21	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung	Tersedianya sarana dan prasarana gedung perkantoran	Gedung	80	13	253.620.725.911	4	224.163.383.049	22	187.880.907.739	100%	84%	100%	Disbangtar ung
	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung	Tersedianya sarana dan prasarana gedung non perkantoran	Paket	26	3		2		3		100%		100%	Disbangtar ung

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan kajian dan rekomendasi teknis serta sertifikat laik fungsi	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		83%	Disbangtar ung
22	Pengendalian dan pemanfaatan ruang	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan keterangan peruntukan lahan	Persen	100%	100%	1.433.095.000	100%	1.198.340.000	100%	1.197.990.000	100%	100%	83%	Disbangtar ung
23	Penataan Lingkungan Terpadu	Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha)	Ha	-	336	27.131.727.620	335	28.071.509.530	37	22.505.384.540	11%	80%	100%	Dinas Perkim
	Penataan Lingkungan Terpadu	Terbangunnya sarana penunjang permukiman	Unit	328	41		30		33		100%		100%	Dinas Perkim
	Penataan Lingkungan Terpadu	Penyediaan rumah susun sederhana sewa (unit)	twin blok	4	1		1				0%		100%	Dinas Perkim
	Penataan Lingkungan Terpadu	Rumah tidak layak huni menjadi layak huni	Unit	1.275	206		75		205		100%		100%	Dinas Perkim

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
24	Pengembangan infrastruktur permukiman	Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan sertifikat keahlian perencana dan perancang rumah dan PSU perumahan skala kecil	Persen	100%	100%	4.643.877.000	75%	2.495.534.700	93%	1.986.394.300	100%	80%	100%	Dinas Perkim
	Pengembangan infrastruktur permukiman	Tersedianya data rumah dan perumahan	Dokumen	12	2		-						100%	Dinas Perkim
	Pengembangan infrastruktur permukiman	Tersedianya regulasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman	Perda	1	-		1		-		0%			Dinas Perkim
	Pengembangan infrastruktur permukiman	Tersedianya regulasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman	Perwal	11	5		1				0%		100%	Dinas Perkim
	Pengembangan infrastruktur permukiman	Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan pengesahan pertelaan rumah susun	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		60%	Dinas Perkim

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
	Pengembangan infrastruktur permukiman	Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		60%	Dinas Perkim
	Pengembangan infrastruktur permukiman	Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		80%	Dinas Perkim
	Pengembangan infrastruktur permukiman	tercatatnya PSU perumahan yang dikuasai sepihak ke dalam neraca aset	Perum	70	2		10		18		100%		66%	Dinas Perkim
25	Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman	Pengembangan dan Pembangunan TPU	TPU	10	10	7.893.788.708	10	16.678.932.000	8	10.817.027.030	80%	65%	80%	Dinas Perkim
	Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman	Pengembangan dan Pembangunan TPU	TPK	1	1		1		1		100%		100%	Dinas Perkim
	Penyediaan dan	Terpeliharanya	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		83%	Dinas

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
	Pengelolaan Areal Pemakaman	sarana TPU												Perkim
	Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman	Pembinaan kelembagaan pengelolaan TPU	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		83%	Dinas Perkim
26	Pengembangan Penyediaan Dan Pengelolaan PJU	Penambahan jumlah PJU terbangun	Titik	39.383	4.990	67.800.339.241	2.250	64.771.743.416	3.700	50.739.292.093	100%	78%	100%	Dinas Perkim
	Pengembangan Penyediaan Dan Pengelolaan PJU	Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		83%	Dinas Perkim
27	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	Respon time kebakaran	Menit	10	11	13.202.355.800	10	12.464.848.400	10,00	12.317.343.798	100%	99%	100%	Dinas Damkarmat
	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban serta harta benda	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		83%	Dinas Damkarmat
28	Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	Persen	100%	100%	1.597.373.790	100%	2.434.221.000	100%	1.795.657.133	100%	74%	83%	BPBD
	Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat waktu tanggap (response time rate) < 20 Menit terhadap Bencana	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		83%	BPBD

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
29	Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota	Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal	Persen	100%	100%	445.425.000	100%	575.766.000	100%	130.366.200	100%	23%	100%	Satpol PP
30	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat	Kali	201	13	7.785.794.700	26	10.165.621.500	18	9.381.223.075	69%	92%	82%	Satpol PP
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		83%	Satpol PP
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah penambahan SDM dan sarana prasarana penunjang	Persen	76%	84%		72%		80%		100%		100%	Satpol PP
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Aparatur Satpol PP yang diatih	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		83%	Satpol PP
31	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabsos sesuai standar dasar	Persen	58%	54%	1.117.946.000	56%	571.091.800	37%	553.454.375	66%	97%	93%	Dinsos
32	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS dan LKS yang diberdayakan	Persen	45%	35%	781.083.770	40%	205.185.500	23%	205.185.500	57%	100%	78%	Dinsos

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Peningkatan pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan keagamaan	Dokumen	24	7		4		4		100%		95%	Setda
	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Dokumen	24	13		7		7		100%		97%	Setda
	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS	Dokumen	10	2		2		2		100%		80%	Setda
<b>B</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>													
33	Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja siap pakai	Persen	20%	16%	1.292.790.000	17%	1.147.950.000	16,87%	1.014.565.250	99%	88%	84%	Disnaker
34	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69%	68%	949.784.000	68%	142.358.000	54%	140.402.000	79%	99%	99%	Disnaker
35	Kerjasama Hubungan Industrial dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Menurunnya Angka perselisihan Industrial	Kasus	17	23	1.513.899.000	20	1.311.450.000	35	1.308.330.000	100%	100%	49%	Disnaker
36	Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Orang	743	2.268	1.855.763.328	715	774.233.500	2.512	482.194.000	100%	62%	100%	DPMP3AKB

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
37	Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	Persen	100%	100%	322.516.100	100%	399.775.750	100%	340.980.750	100%	85%	100%	DPMP3AKB
38	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	IPG dan IDG	Persen IPG	94,53%	93%	2.981.144.900	93%	1.557.116.000	94%	1.081.037.900	100%	69%	100%	DPMP3AKB
	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	IPG dan IDG	Persen IDG	65,27%	70,72%		66%		74%		100%		100%	DPMP3AKB
	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Jumlah Kelurahan Ramah Anak	Kelurahan	19	16		17		17		100%		89%	DPMP3AKB
39	Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Pemanfaatan Inovasi TTG Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Inovasi	11	9	2.218.108.634	11	351.783.500	11	297.716.500	100%	85%	100%	DPMP3AKB
	Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Peran serta Lembaga/Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	85%	100%		80%		100%		100%		100%	DPMP3AKB
40	Peningkatan Ketahanan Pangan	Penguatan cadangan pangan	Ton	100	40	1.501.684.200	10	881.866.000	100%	377.517.100	10%	43%	100%	DKP3
	Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	Persen	100%	95%		100%		95%		95%		95%	DKP3
	Peningkatan Ketahanan	AKG dan AKP	Persen	93%	94%		92%		94%		100%		100%	DKP3

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
	Pangan													
	Peningkatan Ketahanan Pangan	Keamanan Pangan	Persen	85%	86%		84%		73%		87%		86%	DKP3
	Peningkatan Ketahanan Pangan	Terlaksananya koordinasi ketahanan pangan	Persen	100%	100%		100%		24%		24%		83%	DKP3
41	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersusunnya laporan kebutuhan lahan	Dokumen	1	5	200.287.035.576	-	54.286.991.094		45.883.576.474		85%	100%	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersusunnya laporan kebutuhan lahan	Kegiatan	1	5		-						100%	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terfasilitasinya dan pendampingan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan	Paket pengadaan	15	9		-						100%	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya pengadaan tanah untuk : kantor kelurahan, kawasan pertanian terpadu, dan Kantor Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	Paket	3	-		-						100%	Dinas Perkim

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya pengadaan tanah untuk : Infrastruktur Dasar, Kawasan Perdagangan dan Lapangan Olah Raga	Paket	3	-		-						100%	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran	Paket	10	4		2		6		100%		100%	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar dan Non Gedung Perkantoran	Paket	10	4		2		5		100%		100%	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran /	Paket	10	5		2		5		100%		100%	Dinas Perkim

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
		fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan Non infrastruktur dasar												
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Pengadaan Tanah Gedung Perkantoran/ fasilitas pemerintah bagi masyarakat dan Non Infrastruktur Dasar	Paket	10	6		2		4		100%		100%	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan tanah	Paket	5	1		1		1		100%		100%	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersusunnya dokumen teknis rencana pengadaan tanah	Paket	5	1		1		1		100%		100%	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersusunnya laporan kebutuhan lahan Pemerintah Kota Tangerang	Paket	5	1		1		-		0%		80%	Dinas Perkim

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
		Selatan Untuk Pembangunan												
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersusunnya laporan Monitoring dan Evaluasi Tahapan Pengadaan Tanah	Paket	5	1		1		-		0%		80%	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terfasilitasinya Aparatur di Bidang Pertanahan lingkup Pemerintah Kota tangerang Selatan dalam mengikuti Bimtek di Bidang Pertanahan	Kegiatan	15	3		3		-		0%		61%	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terfasilitasinya Aparatur di Bidang Pertanahan lingkup Pemerintah Kota tangerang Selatan dalam mengikuti Bimtek di Bidang Pertanahan	Orang	900	180		180		200		100%		84%	Dinas Perkim
42	Pengendalian pencemaran	persentase	Titik pantau	390	96	4.373.225.933	78	3.127.992.350	86	2.994.040.701	100%	96%	100%	Dinas LH

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
	dan perusakan lingkungan hidup	penanganan terhadap pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan												
	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%	Dinas LH
	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengendalian dan pengawasan terhadap B3 dan limbah B3	Perusahaan	280	50		50		50		100%		93%	Dinas LH
	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi analisis laboratorium lingkungan hidup	Alat terkalibrasi	190	50		30		30		100%		84%	Dinas LH
	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi analisis laboratorium lingkungan hidup	Alat laboratorium terpelihara	70			10		10		100%		61%	Dinas LH
	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi analisis laboratorium lingkungan hidup	Parameter terakreditasi	34	5		5		5		100%		85%	Dinas LH

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
43	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Luas lahan yang dikonservasi dan pelaksanaan program kali bersih di tiap kecamatan	Kecamatan	7	2	456.306.534	1	232.288.000	2	231.586.040	100%	100%	100%	Dinas LH
	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Luas lahan yang dikonservasi dan pelaksanaan program kali bersih di tiap kecamatan	M3	3.500	721		500		10.273		100%		100%	Dinas LH
	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Pilot Project kampung iklim (kampung Hijau di 7 kecamatan)	Kampung hijau kecamatan	7	4		1		2		100%		100%	Dinas LH
44	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	Jumlah peningkatan partisipasi aktif masyarakat terkait pelestarian lingkungan hidup	Persen	80%	60%	892.222.000	70%	568.022.000	70%	567.417.000	100%	100%	88%	Dinas LH
	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	Fasilitasi Peningkatan Nilai ADIPURA	Poin	76	-		76		0%		0%		92%	Dinas LH
	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	Jumlah penghargaan Nasional maupun lokal terkait pelestarian lingkungan hidup	Orang (mendapat kan penghargaan)	7	48		1		1		100%		100%	Dinas LH

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	Jumlah penghargaan Nasional maupun lokal terkait pelestarian lingkungan hidup	Sekolah	3	23		3		16		100%		100%	Dinas LH
45	Pengembangan pengelolaan persampahan	Persentase pengangkutan sampah	Persen	70%	71%	40.284.729.984	65%	50.980.379.759	89%	38.751.757.903	100%	76%	100%	Dinas LH
46	Pengelolaan Sampah terpadu	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	Persen	10%	10%	35.173.224.848	10%	7.753.209.308	11,56%	7.007.338.799	100%	90%	83%	Dinas LH
47	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan KK	Persen	100,00%	125%	5.215.464.266	98%	4.579.929.400	134,71 %	4.318.705.374	100%	94%	100%	Disdukcapil
	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan KTP	Persen	99,62%	89,07%		97%		100,27 %		100%		100%	Disdukcapil
	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Persen	96,27%	97,73%		92,15%		107,46 %		100%		100%	Disdukcapil
	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	Persen	83,01%	82%		73%		98,17%		100%		100%	Disdukcapil
	Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Pasangan Berakta Perkawinan	Persen	76,96%	72%		71%		78,98%		100%		100%	Disdukcapil
	Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Dokumen Kependudukan	Persen	100,00%	14%		14%		14,00%		100%		88%	Disdukcapil
	Penataan Administrasi	Jumlah Data	Penduduk	1.364.09	1.274.9		1.328.2		1.279.9		96%		94%	Disdukcapil

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
	Kependudukan	dan Informasi Pendudukan Yang Tersedia		9	72		74		72					
48	Pengendalian Penduduk	Pengendalian Urbanisasi Penduduk	Orang	3.247	1.516	435.146.000	400	6.140.000	1.614	5.090.000	100%	83%	100%	Disdukcapil
49	Keluarga Berencana	Proporsi Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 Tahun	Persen	1,8%	0,8%	3.898.776.400	1,8%	3.633.686.500	0,8%	2.995.462.761	42%	82%	100%	DPMP3AKB
	Keluarga Berencana	Menurunnya Unmet Need	Persen	6,1%	6,3%		6,2%		6,1%		98%		100%	DPMP3AKB
	Keluarga Berencana	Meningkatnya Kesertaan ber-KB	Persen	71,5%	75,3%		71,5%		76,9%		100%		100%	DPMP3AKB
	Keluarga Berencana	Meningkatnya Anggota Tribina ( BKB, BKR, BKL) yang Ber-KB	Persen	92,66%	90,8%		92,7%		94,9%		100%		100%	DPMP3AKB
	Keluarga Berencana	Meningkatnya Produk Unggulan UPPKS	Persen	70,0%	70,6%		67,0%		70,6%		100%		100%	DPMP3AKB
50	Pengembangan pelayanan angkutan	Jumlah uji kir	Unit	386.794	40.171	646.934.000	37.000	753.990.000	35.586	733.178.180	96%	97%	48%	Dishub
51	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Titik	40	40	8.064.244.000	40	9.648.910.000	40	9.428.520.000	100%	98%	83%	Dishub
52	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas Perhubungan	Persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapat berfungsi	Persen	90%	73%	209.966.850	85%	463.371.500	50%	447.239.000	59%	97%	83%	Dishub

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
53	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Peningkatan jumlah sarana prasarana lalu lintas	Persen	100%	71%	8.064.244.000	85%	9.648.910.000	94%	9.428.520.000	100%	98%	94%	Dishub
54	Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa	Peningkatan Penerapan Keterbukaan Sistem Informasi Publik	Persen	100%	20%	8.277.091.200	20%	17.966.773.748	14,8%	15.793.555.027	74%	88%	76%	Diskominfo
	Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa	Persentase Penyebaran Informasi	Persen	100%	19%		20%		20%		100%		83%	Diskominfo
	Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa	Cakupan pembangunan , operasional dan pemeliharaan sistem di SKPD	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		83%	Seluruh OPD
55	Pengembangan Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang dibina	SDM Koperasi	9.675	2.128	1.400.493.500	1.715	838.384.625	1.995	674.628.125	100%	80%	100%	Dinas KUKM
	Pengembangan Koperasi	Jumlah usaha koperasi simpan pinjam dan ijin pembukaan kantor cabang / pembantu / kantor kas KSP	Koperasi	249	231		240		251		100%		100%	Dinas KUKM
	Pengembangan Koperasi	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta penilaian KSP atau USP	Koperasi	640	600		640		749		100%		100%	Dinas KUKM
	Pengembangan Koperasi	Jumlah koperasi yang	Koperasi	300	52		50		110		100%		100%	Dinas KUKM

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
		terfasilitasi												
56	Pengembangan UMKM	Jumlah fasilitasi sertifikasi produk UMKM	Produk UMKM	325	376	3.586.290.669	300	3.125.158.750	456	1.558.119.409	100%	50%	100%	Dinas KUKM
	Pengembangan UMKM	Pengembangan pemasaran produk dan inovasi promosi UMKM	Produk UMKM	3.250	615		700		869		100%		91%	Dinas KUKM
	Pengembangan UMKM	Pembinaan wirausaha UMKM dan Calon Wirausaha UMKM	SDM UMKM	9.980	1.497		1.390		1.720		100%		100%	Dinas KUKM
	Pengembangan UMKM	Pembangunan dan Operasional sarana dan Prasarana pengembangan UMKM	Galeri UMKM	40	8		7		3		43%		100%	Dinas KUKM
	Pengembangan UMKM	Pembangunan dan Operasional sarana dan Prasarana pengembangan UMKM	Gedung	1	1		1		1		100%		100%	Dinas KUKM
	Pengembangan UMKM	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	UMKM	2.139	434		311		335		100%		100%	Dinas KUKM
	Pengembangan UMKM	Pengawasan, Pengembangan Data, Inovasi,	Dokumen	3	3		3		3		100%		83%	Dinas KUKM

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
		Informasi dan Teknologi												
57	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Lokasi	8	1	551.197.750	1	246.967.000	1	101.729.000	100%	41%	100%	Dinas KUKM
	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi	Lokasi	5	1		1		1		100%		100%	Dinas KUKM
58	Pengembangan investasi	Peningkatan Jumlah Investasi PMA & PMDN	PMA	210	301	1.150.084.800	52	402.491.600	301	385.393.000	100%	96%	100%	DPMPSTP
	Pengembangan investasi	Peningkatan Jumlah Investasi PMA & PMDN	PMDN	70	146		18		158		100%		100%	DPMPSTP
59	Pengembangan Pelayanan Perijinan	Penerapan Pelayanan dan Perijinan Satu Pintu dan Satu Atap	Jenis Ijin	60	121	4.315.248.575	55	1.917.210.850	121	1.853.198.100	100%	97%	100%	DPMPSTP
	Pengembangan Pelayanan Perijinan	Jumlah layanan perizinan yang bersertifikasi ISO	Jenis Ijin	22	121		22		121		100%		100%	DPMPSTP
60	Pengembangan peran serta kepemudaan	Peningkatan Kualitas Organisasi Kepemudaan	OKP	100	20	2.319.302.571	15	1.042.474.000	15	817.621.880	100%	78%	95%	Dispota
61	Pengembangan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah Calon Wirausaha Muda	Kelompok Calon Wirausaha	42	7	515.079.000	7	250.000.000	7	238.495.000	100%	95%	83%	Dispota

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
			Muda											
62	Pengembangan manajemen dan pemasyarakatan olahraga	Pembinaan Manajemen dan Pengembangan Olahraga di Masyarakat	Cabor	22	20	3.109.291.800	20	834.955.051	18	628.413.716	90%	75%	100%	Dispora
63	Pengembangan sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Sarana dan prasarana Olahraga	93	18	3.853.485.735	15	1.460.235.000	14	1.335.913.400	93%	91%	78%	Dispora
	Pengembangan sarana dan prasarana olahraga	Pemeliharaan sarana dan prasarana Olahraga	Sarana dan prasarana Olahraga	10	10		10		12		100%		100%	Dispora
64	Pengembangan data dan informasi	Cakupan data dan informasi SKPD	Persen	100%	100%	2.068.002.500	100%	1.112.104.700	100%	653.431.000	100%	59%	83%	Seluruh OPD
	Pengembangan data dan informasi	Ketersediaan data pendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Tangerang Selatan	Dokumen	28	4		4		4		100%		79%	Bappeda
65	Optimalisasi Sistem Persandian	Cakupan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi	Persen	100%	40%	547.430.000	20%	165.900.000	20%	162.950.000	100%	98%	100%	Diskominfo

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
	Optimalisasi Sistem Persandian	Cakupan Penyiapan, Pemanfaatan dan Pengembangan SDM Sandi, Materil Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi	Persen	100%	93%		20%		35%		100%		100%	Diskominfo
66	Pengembangan dan Pengelolaan kebudayaan	Jenis Budaya Yang Dilestarikan	Jenis	4	4	2.414.190.200	4	1.495.191.000	4	794.975.500	100%	53%	100%	Disdikbud
67	Pengembangan budaya baca	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	Orang	910.000	873.487	1.609.797.600	880.000	653.212.960	268.045	502.365.460	30%	77%	98%	Perpus Arsip
	Pengembangan budaya baca	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	Judul	40.000	24.419		37.500		25.597		68%		64%	Perpus Arsip
68	Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan	Tertatanya arsip seluruh perangkat daerah dan unit kerja	Persen	75%	53%	654.312.800	65%	630.615.300	65%	519.506.000	100%	82%	87%	Perpus Arsip
<b>C</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>													
69	Pengembangan Perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya/Pelaku Usaha Perikanan	Persen	103%	116%	928.174.190	103%	344.263.900	100%	76.981.500	98%	22%	100%	DKP3
70	Pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah PAD dari sektor pariwisata	Rupiah (miliar)	420	380	3.687.061.500	385	2.455.515.303	249	1.182.935.500	65%	48%	90%	Dispar

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
71	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisatawan	436.413	1.951.999	2.205.528.984	409.137	3.537.120.000	704.857	2.238.459.899	100%	63%	100%	Dispar
72	Pengembangan pertanian	Nilai Tukar Petani/Pelaku Usaha Pertanian	Persen	103%	115%	1.448.573.050	103%	731.425.500	100%	492.895.900	98%	67%	100%	DKP3
	Pengembangan pertanian	Presentase Kesehatan Hewan	Persen	84%	98%		83%		97%		100%		100%	DKP3
	Pengembangan pertanian	Presentase Bahan Asal Hewan yang Memenuhi Kriteria ASUH	Persen	82%	86%		81%		88%		100%		100%	DKP3
73	Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu	Penambahan Sarana Prasarana Kawasan Pertanian Terpadu	Persen	40%	20%		30%		100%		100%		100%	DKP3
74	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Pengawasan Barang dan Jasa	Persen	100%	100,00%	2.384.894.456	100%	433.966.800	100,00%	376.437.308	100%	87%	100%	Disperindag
	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Stabilitas harga kebutuhan pokok	Komoditas	54	9		9		9		100%		83%	Disperindag
	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Peningkatan Kesadaran Perijinan Perdagangan	Pelaku usaha	301	50		40		30		75%		100%	Disperindag
	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah UTTP yang diawasi	UTTP	37.500	13.427		8.500		10.321		100%		100%	Disperindag

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah Rapat Koordinasi TPID dan Jumlah pendataan/pencahan Indeks harga Konsumen	Dokumen	32	4		4		4		100%		100%	Setda
75	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah produk yang dipasarkan	Produk	300	60	1.893.289.680	2	33.952.000	10	33.952.000	100%	100%	100%	Disperindag
76	Pengembangan Industri	Cakupan binaan kelompok industri	Kelompok IKM	210	50	840.543.900	50	268.181.900	22	260.417.600	44%	97%	100%	Disperindag
	Pengembangan Industri	Cakupan binaan kelompok industri kreatif	Kelompok Industri Kreatif	106	30		20		8		40%		100%	Disperindag
	Pengembangan Industri	Jumlah pelaporan informasi industri	Semester	12	2		2		2		100%		80%	Disperindag
<b>E</b>	<b>PROGRAM STRATEGIS KEWILAYAHAN</b>													
	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung	Jumlah Pembangunan Community Center/komunitas kreatif skala kecamatan	Paket	7	4		2		1		50%		100%	Disbangtar ung
	Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar terbangun	Sekolah	138	34		25		25		100%		78%	Disbangtar ung
	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama terbangun	Sekolah	3	-		1		1		100%		100%	Disbangtar ung
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	Bangunan RSUD (Gedung 3)	Paket	3	2		1				0%		100%	Disbangtar ung

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
	kesehatan													
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Bangunan Gedung 2 RSUD Tangsel	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%	Disbangtarung
	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung	Jumlah Gedung Perpustakaan Skala Kota dan Skala Kecamatan	Paket	4	1		-		6				100%	Disbangtarung
	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung	Bangunan Depo Arsip	Paket	3	1		-		1				100%	Disbangtarung
101	Peningkatan Transportasi Massal	Peningkatan sarana prasarana transportasi massal	Persen	100%	124%	383.281.256	90%	62.000.000	8%	59.046.600	9%	95%	100%	Dishub
102	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha terkait ekonomi kreatif dan icon tangsel	Pelaku ekonomi kreatif	150	50	1.151.671.000	30	1.814.848.000	50	987.939.000	100%	54%	100%	Dispar, Dinas KUKM, Disperindag
103	Pengelolaan RTH	Jumlah RTH Publik yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	Kecamatan	7	7	15.095.591.094	7	9.103.174.081	1	8.075.815.357	14%	89%	83%	Dinas LH
	Pengelolaan RTH	Persentase taman terpelihara	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		83%	Dinas LH
	Pengelolaan RTH	Persentase penanaman terhadap Ruang Terbuka Hijau yang harus	Km	6,6	3,8		1,3		1,77		100%		100%	Dinas LH

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
		ditanami												
104	Pengelolaan Pasar dan Kawasan Perdagangan Tradisional	Jumlah kawasan perdagangan tradisional yang dikelola	Pasar	5	5	1.518.187.469	5	3.309.336.400	5	3.220.163.100	100%	97%	83%	Disperindag
	Pengelolaan Pasar dan Kawasan Perdagangan Tradisional	Jumlah Revitalisasi Pasar	Pasar	3	2		1		1		100%		100%	Disbangtarung
	Peningkatan Ketahanan Pangan	Manajemen Logistik	Dokumen	14	2		2		2		100%		86%	DKP3, Disperindag
105	Pelayanan jaminan kesehatan nasional	Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN	Persen	70%	63%	55.518.136.800	65%	23.473.770.521	80,50%	18.742.997.423	100%	80%	100%	Dinkes
106	Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong	Kapasitas Debit Saluran	Persen	60%	50%	122.421.677.019	55%	88.980.236.273	55%	79.764.262.300	100%	90%	92%	Dinas PU
107	Pengembangan Teknologi dan Informasi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi dan Informasi	Persen	100%	81%	36.643.072.991	20%	33.002.668.600	31,12%	29.870.513.110	100%	91%	92%	Diskominfo
	Pengembangan Teknologi dan Informasi	Peningkatan Tata Kelola Teknologi dan Informasi	Persen	100%	86%		20%		47%		100%		100%	Diskominfo
	Pengembangan Teknologi dan Informasi	Peningkatan SDM Teknologi dan Informasi	Persen	100%	30%		20%		20,5%		100%		100%	Diskominfo

No	Program	Indikator Program	Satuan	Target Akhir RPJMD Tahun 2021	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020 (%)	Perangkat Daerah
				Kinerja	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	
108	Bantuan dan Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga/Individu Sasaran Yang Mendapatkan Bantuan dan Jaminan Sosial	Persen	90%	85%	708.764.000	85%	699.735.000	87%	698.476.000	100%	100%	97%	Dinsos
	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Jumlah Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Publik	Urusan	35	35		35		35		100%		100%	Kecamatan

### 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan yang tidak diatasi. Dari sekian banyak permasalahan yang telah diidentifikasi, dapat dirumuskan ke dalam 4 (empat) permasalahan pokok, yaitu :

1. Sumber daya manusia
2. Ekonomi
3. Tata Kelola Pemerintahan dan
4. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Gambar 2.18. Permasalahan Pokok Kota Tangerang Selatan



Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026

#### 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan khususnya program pembangunan daerah RPJMD dengan prioritas pembangunan daerah RKPd pada tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional provinsi yang bersifat *mandatory*. Permasalahan pembangunan Kota Tangerang Selatan yang akan dihadapi di tahun 2022 yang berhubungan dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana adalah sebagai berikut:

1. Upaya Kinerja pembangunan kualitas sumber daya manusia belum optimal, ditandai dengan lambatna kenaikan laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
  - Upaya kinerja peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal, ditandai dengan lambatna kenaikan laju pertumbuhan Angka Harapan Hidup (AHH).
  - Penyelenggaraan pendidikan belum optimal ditandai dengan rata – rata lama sekolah (RLS) belum mampu mencapai 12 tahun.
  - Daya Beli masyarakat masih perlu ditingkatkan dengan memperhatikan kondisi perekonomian pada Tahun 2020.
  - Upaya Peningkatan Pengarusutamaan Gender (Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender masih kurang)
2. Upaya kinerja laju pertumbuhan ekonomi daerah sering mengalami kontraksi ditandai dengan naik turunnya laju pertumbuhan

- Upaya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi belum optimal
  - Upaya peningkatan mutu pelayanan transportasi umum belum optimal
  - Menurunnya pengeluaran konsumsi masyarakat
  - Belum efektifnya penanaman modal/investasi daerah
  - Daya saing produk lokal masih belum kompetitif
  - Upaya penanganan kriminalitas belum optimal, ditandai dengan terus meningkatnya kejadian kriminal tiap tahunnya
  - Terjadi peningkatan trend Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
  - Upaya peningkatan jumlah tenaga kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka belum optimal.
3. Kinerja pelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan hal ini ditunjukkan dengan fluktuatifnya nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
- Pencemaran di Kota Tangerang Selatan baik air, udara, tanah mengalami peningkatan.
4. Kinerja pemerintahan di bidang tata kelola pemerintahan masih perlu ditingkatkan.
- Pelayanan masyarakat masih harus ditingkatkan hal tersebut ditunjukkan dengan IKM yang belum mencapai target
  - Belum optimalnya upaya pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tangerang Selatan
  - Belum optimalnya upaya Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  - Belum optimalnya upaya pemerintah dalam menjaga Ketentraman, ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat
  - Belum optimalnya pelayanan pemerintah dalam melakukan penelitian dan pengembangan
  - Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendapatkan opini BPK WTP berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 namun masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki
  - Belum optimalnya pengelolaan Keuangan Pemerintah
  - Belum optimalnya penyelenggaraan Penataan Ruang
  - Belum optimalnya pengelolaan tanah di Kota Tangerang Selatan
  - Belum optimalnya pelayanan Komunikasi dan Informatika
  - Belum optimalnya penggunaan sistem Persandian
  - Belum optimalnya pengelolaan Kearsipan
  - Belum optimalnya pelayanan Energi dan sumber daya mineral
  - Belum optimalnya pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
  - Kebutuhan peningkatan kualitas Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
  - Masih terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan
  - Belum optimalnya pembinaan berbangsa, bernegara, dan politik yang diberikan kepada masyarakat.

### 2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam RKPD 2022 adalah sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 diberbagai sektor.
2. Upaya penanggulangan dampak COVID-19 terutama perekonomian masyarakat.
3. Upaya memberikan pelayanan Kesehatan berkualitas sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Upaya agar semua penduduk usia sekolah di Tangerang Selatan harus mendapatkan akses Pendidikan Dasar sehingga angka partisipasi murni untuk tingkat SD dan SMP dapat mencapai 100%.
5. Upaya mengendalikan banjir dan tanah longsor terutama pada lokasi rawan bencana.
6. Upaya meningkatkan nilai tambah daya beli masyarakat
7. Upaya penanganan kemacetan untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi ketimpangan daerah
8. Upaya mengurangi timbulan sampah ditingkat produsen maupun di TPA
9. Upaya menyediakan ruang publik perkotaan yang nyaman dan aman
10. Permukiman kumuh perkotaan harus menjadi permukiman layak huni dan dapat memberikan nilai tambah kepada penghuninya.
11. Upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas Kerjasama dan Invertasi dalam menciptakan iklim investasi
12. Upaya meningkatkan profesionalitas ASN dan reformasi birokrasi.
13. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap resiko bencana.

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2022 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2020 dan awal tahun 2021, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2021 dan 2022. Pada triwulan-I 2020, dunia dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang membuat kondisi ekonomi global memburuk hingga turut berdampak pada terkontraksinya perekonomian Kota Tangerang Selatan.

Diharapkan pelaksanaan vaksinasi menjadi titik tolak pemulihan perekonomian. Selain vaksinasi, implementasi UU Cipta Kerja menjadi salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi. Melalui UU Cipta Kerja terkait peningkatan ekosistem investasi, pemberdayaan UMKM, kemudahan untuk berusaha, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Hal tersebut dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi dasar pemulihan ekonomi daerah.

#### 3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pembatasan aktivitas sosial sebagai upaya antisipatif penyebaran COVID-19 tentu saja berimbas pada penurunan aktivitas ekonomi yang berujung pada penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020

TW I		TW II		TW III		TW IV		LPE 2020
Q to Q	Y On Y	Q to Q	Y On Y	Q to Q	Y On Y	Qto Q	YOnY	C to C
-2,41	2,97	- 4,19	- 5,32	5,05	- 3,49	-0,49	-2,19	-2,07

Sumber: RKPD Provinsi Banten 2022

Tabel diatas memperlihatkan bahwa meskipun Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang diikuti dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru dikeluarkan pada bulan April 2020 namun perekonomian nasional sudah mengalami dampak dari Pandemi Covid-19 mulai dari Triwulan I (Januari-Februari-Maret). Hal ini disebabkan karena diterapkannya kebijakan *Lockdown* secara ketat di beberapa negara tujuan ekspor komoditas atau pun barang yang dihasilkan dari perusahaan di Indonesia. Selain Tiongkok sebagai negara tempat berasalnya penyebaran virus Corona beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia dan Korea Selatan menerapkan kebijakan *Lockdown* mulai periode triwulan I.

Selain berpengaruh pada ekspor komoditas, diterapkannya kebijakan *Lockdown* juga berpengaruh pada kurangnya pasokan bahan baku industri dalam negeri yang selama ini mengandalkan pada pasokan import. Karena kurangnya bahan baku inilah yang mengakibatkan banyak perusahaan di dalam negeri mengurangi kapasitas produksinya dan bahkan sebagian diantaranya menutup pabriknya. Dalam laporan Bank Dunia disebutkan Volume impor Indonesia menyusut sebesar 2,2 persen di Q1 tahun 2020, setelah turun sebesar 8,0 persen di Q4 tahun 2019

(Q1 tahun 2019: -7,5 persen). Perlambatan kontraksi impor ini terutama didorong oleh impor minyak dan gas yang lebih tinggi karena importer mengambil keuntungan dari jatuhnya harga minyak untuk meningkatkan persediaan. Selain itu, impor non migas mengalami kontraksi yang lebih kecil dari impor di Q4 tahun 2019, sebagian karena peningkatan pertumbuhan ekspor yang membutuhkan masukan bahan baku impor, yang mengimbangi laju impor bahan baku yang lebih lambat untuk konsumsi dalam negeri.

Kebijakan *Lockdown* yang diterapkan diberbagai Negara serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga mempengaruhi sector transportasi dan pariwisata karena adanya pembatasan penerbangan dari negara-negara asing, meningkatnya kehati-hatian para pelancong, dan penangguhan operasi dari banyak operator asing ke Indonesia. Kedatangan pengunjung manca negara turun 64,9 persen yoy pada bulan Maret dan 31,1 persen untuk triwulan tersebut.

Bank Dunia menyebutkan bahwa dengan berbagai langkah antisipatif Pemerintah serta kondisi Global yang membaik seiring dengan asumsi efektivitas vaksinasi yang berjalan sesuai dengan yang diharapkan, proyeksi pertumbuhan Indonesia diperkirakan akan pulih selama dua tahun kedepan, dengan asumsi bahwa ekonomi akan dibuka kembali secara bertahap dan stabil. Konsumsi swasta diperkirakan pulih lebih cepat, diikuti oleh investasi sector swasta. PDB riil diproyeksikan akan tumbuh sebesar 4,8 persen pada tahun 2021 yang ditunjang oleh pemulihan konsumsi swasta. PDB diperkirakan tumbuh 6,0 persen pada tahun 2022 karena pertumbuhan investasi yang tinggi dan rendahnya basis PDB (*base effect*) di tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.2. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Lembaga	2020	2021	2022
Bank Dunia	0,0	4,8	6,0
IMF	-1,5	6,1	6,0

Sumber: RKPD Provinsi Banten 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa, berdasarkan asumsi yang terjadi dalam lingkup global, IMF memberikan proyeksi yang lebih rendah terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2020. Berdasarkan proyeksi IMF yang dikeluarkan dalam laporan di Bulan Oktober, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih negative atau mengalami kontraksi 1,5% dan berdasarkan baseline tersebut IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,1% ditahun 2021.

### 3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten

Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global memberikan dampak langsung bagi perekonomian Banten terutama sektor transportasi dan industri pengolahan. Rilis BPS Provinsi Banten terkait pertumbuhan Ekonomi Banten triwulan I-2020 memberikan gambaran bahwa kondisi perekonomian wilayah ini sangat dipengaruhi oleh keadaan global. Meski penerapan PSBB di provinsi Banten baru diterapkan pada pertengahan April 2020 namun karena kebijakan pengetaan di beberapa negara di dunia sudah dilakukan sejak bulan Februari, dampak terhadap perekonomian di Triwulan I sudah mulai terlihat. Ekonomi Banten triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 tumbuh 3,09 persen (y-on-y), melambat dibanding capaian triwulan I-2019 yang sebesar 5,45 persen. Karena itu berdasarkan perkembangan kondisi yang ada, target LPE provinsi Banten tahun 2020 sebesar 5,80 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2017-2022 diperkirakan tidak akan tercapai.

Rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Banten triwulan I-2020 terhadap triwulan IV-2019 (q-to-q) diwarnai faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 2,02 persen. Artinya angka pertumbuhan tersebut lebih disebabkan karena pada bulan Februari Maret beberapa komoditas pertanian memasuki masa panen. Pertumbuhan positif juga terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,78 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,68 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 1,16 persen; Jasa Perusahaan sebesar 1,15 persen; dan beberapa lapangan usaha lainnya. Namun, pertumbuhan lapangan usaha tersebut di atas tidak cukup menahan terjadinya penurunan laju pertumbuhan ekonomi Banten di triwulan I-2020 (Q to Q) sebesar 3,01 persen. Hal ini disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar seperti: Industri Pengolahan (turun 2,3%); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan (turun 14,52%); Jasa Pendidikan (3,14); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Pengadaan Listrik dan Gas.

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Banten triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 (y-on-y) terjadi hampir pada semua komponen pengeluaran, kecuali komponen Total Net Ekspor. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,19 persen; diikuti pengeluaran komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,36 persen; konsumsi Lembaga Non Profit (LNPR) sebesar 3,14 persen; dan komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 0,47 persen. Sedangkan komponen Total Net Ekspor berkontraksi hingga sebesar 5,01 persen. Berdasarkan penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan I-2020 (y-on-y), Konsumsi Rumah Tangga masih sebagai sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,40 persen, diikuti komponen PMTB sebesar 1,05 persen; serta Konsumsi Lembaga Non Profit dan Konsumsi Pemerintah yang memiliki andil sama sebesar 0,02 persen.

Berbeda dengan kondisi Triwulan I tahun 2020, rilis BPS Provinsi Banten terkait perekonomian Provinsi Banten menunjukkan pengaruh besar pandemi Covid-19 di Provinsi ini sangat terasa signifikan. Selain laju pertumbuhan ekonomi yang negatif, laju pertumbuhan ekonomi provinsi Banten dibawah capaian laju ekonomi nasional.

Tabel 3.3. Realisasi LPE Triwulanan dan Tahunan Nasional dan Banten

Tahun	TW I		TW II		TW III		TW IV		Banten	Nasional
	Banten	Nasional	Banten	Nasional	Banten	Nasional	Banten	Nasional		
2015	5,69	4,71	5,26	4,67	5,18	4,73	4,87	5,04	5,37	4,79
2016	5,15	4,92	5,16	5,18	5,35	5,02	5,53	4,94	5,26	5,02
2017	5,9	5,01	5,52	5,01	5,62	5,06	5,75	5,19	5,71	5,07
2018	5,95	5,06	5,59	5,27	5,89	5,17	5,98	5,18	5,81	5,17
2019	5,42	5,07	5,35	5,05	5,41	5,02	5,9	4,97	5,53	5,02
2020	3,09	2,97	-7,4	-5,32	-5,77	-3,49	-3,93	-2,19	-3,38	-2,07

Sumber: RKPDP Provinsi Banten 2022

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dalam jangka waktu lima tahun terakhir sebelum kejadian Pandemi Covid-19, LPE tahunan provinsi Banten selalu berada diatas nilai LPE nasional atau dengan kata lain perkembangan perekonomian di wilayah provinsi Banten selalu lebih baik dibandingkan dengan kondisi perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong provinsi Banten menjadi magnet bagi para investor menanamkan investasi di wilayah ini (Pembahasan lebih mendetail tentang investasi akan disajikan pada bagian berikutnya). Selain data tahunan yang memperlihatkan kondisi laju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari nasional, data LPE triwulanan juga menunjukkan hal yang serupa. Selama lima tahun terakhir, hanya data LPE triwulan IV tahun 2015 dan Triwulan II tahun 2016 yang menunjukkan capaian di bawah nasional. Meski demikian, capaian LPE provinsi Banten di kedua triwulan tersebut tidak tepaut jauh dimana LPE Triwulan IV tahun 2015 provinsi Banten sebesar 4,87 (nasional 5,07) dan Triwulan II tahun 2016 LPE Banten 5,16 sedangkan nasional 5,18.

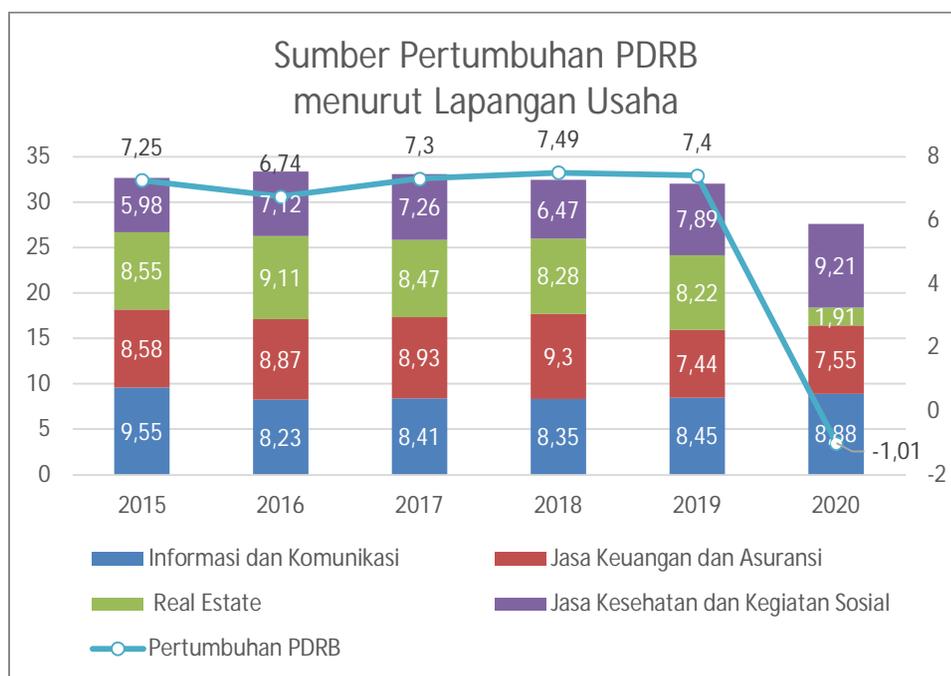
Penurunan drastis terkait kondisi perekonomian tahun 2020 baik global, nasional termasuk provinsi Banten terjadi pada Triwulan kedua. Sebagaimana disajikan pada tabel diatas, LPE provinsi Banten mengalami kontraksi sampai 7,4% dan berada di bawah nasional yang mengalami kontraksi 5,3%. Mulai diterapkannya PSBB dengan pada April membawa dampak berkurangnya aktifitas masyarakat yang menggunakan jasa transportasi serta adanya pembatasan aktivitas di sektor industri. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Banten triwulan II-2020 (*y-on-y*), sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,59 persen; diikuti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,21 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,08 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,04 persen; serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Tetapi karena sebagian besar lapangan usaha lainnya tumbuh negatif sehingga ekonomi Banten berkontraksi 7,40 persen. Penyumbang negatif terbesar adalah Industri Pengolahan sebesar -3,09 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar -2,98 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -0,80 persen dan Konstruksi sebesar -0,57 persen.

### 3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan

Kondisi ekonomi daerah pada tahun 2020, Awal Tahun 2021 dan Perkiraan Tahun 2022 merupakan Gambaran indikator makro Kota Tangerang Selatan yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi, ekspor dan impor, inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan yang diuraikan sebagai berikut.

#### a. Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha

Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan triwulan IV tahun 2020 (*y-o-y*), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 9,21 persen, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 8,88 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi 7,55 persen dan Real Estate sebesar 1,91. Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh tinggi seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam penerapan *Work from Home* (WFH) dan *School from Home* (SFH) atau sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) membuat lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh ekspansif. Lapangan Usaha terkait penanganan COVID-19 dan *new normal*, seperti Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta LU Real Estat, juga tumbuh positif.



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

## b. Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi

Perkiraan membaiknya perekonomian dunia dan domestik serta didukung penyediaan vaksin COVID-19 hingga meningkatnya pembangunan infrastruktur di Tangerang Selatan pada tahun 2021 dan 2022, ekonomi Tangerang Selatan diperkirakan akan tumbuh positif. Tabel 3.4 menunjukkan proyeksi pertumbuhan Tangerang Selatan bahwa proyeksi untuk tahun 2022 di angka 5,81 - 6,08 persen. Proyeksi LPE 5,81 - 6,08 dapat terjadi ketika konsumsi rumah tangga perekonomian Tangerang Selatan mulai membaik. Asumsi ini didasarkan pada perbaikan konsumsi masyarakat yang mulai terjadi pada tahun 2021 terus berlanjut seiring dengan pemberian vaksin penanggulangan COVID-19 yang mulai dilaksanakan di triwulan pertama tahun 2021 serta pelaksanaan program peningkatan nilai tambah terhadap pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat berjalan optimal.

Dari sisi produksi, LPE 5,81 - 6,08 dimungkinkan dengan kembali normalnya kondisi perekonomian Pasca Pandemi Covid-19 (dampak positif program vaksin) diharapkan dapat memicu bangkitnya beberapa sektor seperti perdagangan dan jasa yang pada tahun 2020 lalu mengalami kontraksi. Dampak program vaksin massal, diharapkan sektor tersebut dapat *rebound* di tahun 2021 dan berlanjut di tahun 2022.

Tabel 3.4. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 (dalam Persen)

Uraian	2020	2021	2022
Dunia	3,5	2,9	6,0*
Nasional	-0,4 -1,0	4,5-5,5	5,7 - 6,0**
Banten	-3,92	5,5	5,6***
Tangerang Selatan	-1,01	3,01-4,00	5,81 - 6,08 ****

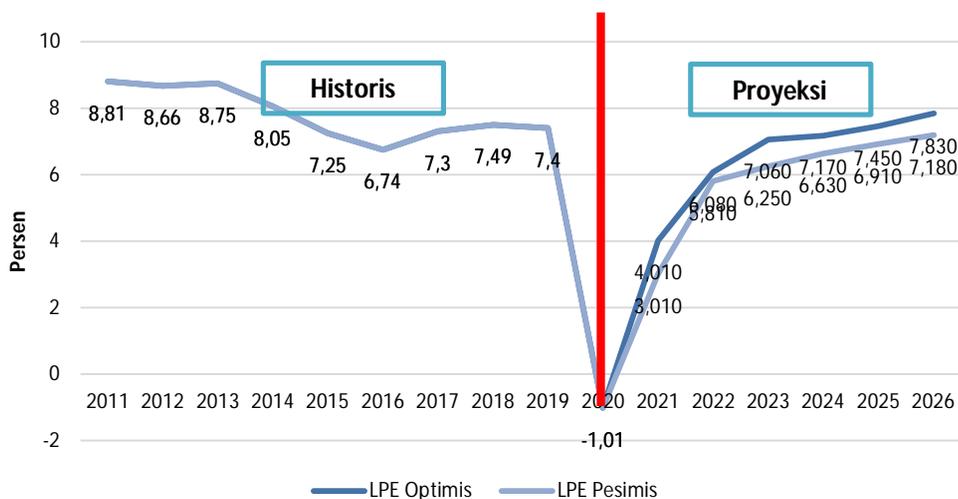
\*) Prediksi Bank Dunia

\*\*) PMDN 17/2021

\*\*\*) RKPDP Provinsi Banten

\*\*\*\*) Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026

Pada tahun 2021, Kota Tangerang Selatan diperkirakan tumbuh sekitar 3,01-4,00 persen, dan meningkat pada tahun 2022 dan 2026 sekitar 5,81 - 7,18 persen.



Gambar 3.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 - 2026

Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

Pemulihan ekonomi diperkirakan akan ditopang oleh pemulihan konsumsi masyarakat sejalan dengan peningkatan mobilitas, perbaikan pendapatan, dan ekspektasi konsumen yang membaik. Selain itu, kegiatan investasi juga diperkirakan meningkat seiring berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur utama dan peningkatan konsumsi masyarakat yang mendorong meningkatnya utilisasi kapasitas terpasang dan implementasi UU Cipta Kerja.

### c. Kondisi dan Proyeksi Inflasi

Pada tahun 2021-2026, berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional, serta seiring pemulihan ekonomi, inflasi Kota Tangerang Selatan diperkirakan meningkat namun terjaga dalam kisaran 2,75-2,92 (yoy), sejalan dengan sasaran inflasi provinsi dan nasional.



Gambar 3.2. Proyeksi Inflasi Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 - 2026

Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

Secara tahunan, inflasi pada tahun 2020 diperkirakan lebih rendah dibanding tahun 2019. Masih berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga pertengahan triwulan III dan masih tertahannya konsumsi masyarakat menjadi *downside factor* yang menahan laju inflasi lanjutan sehingga inflasi pada tahun 2020 diperkirakan masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 3,0% ± 1%. (Laporan Bank Indonesia 2020). Data bulan November 2020 dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan 1,67 persen dengan sebelumnya 1,9 persen di bulan Oktober 2020.

Hingga akhir tahun 2020, tingkat Inflasi Kota Tangerang Selatan masih dibawah 2 persen. Hal yang sama akan terjadi di tahun berikutnya dimana Inflasi di Kota Tangerang Selatan belum akan kembali pada posisi semula sebelum terjadinya COVID-19. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Hal ini akan tetap mendorong kenaikan yang tidak secara drastis pada tahun 2021 dan 2022 yang akan diperkirakan pada tingkat 3,29 persen.

Tabel 3.5. Proyeksi Inflasi Nasional, Banten dan Kota Tangerang Selatan

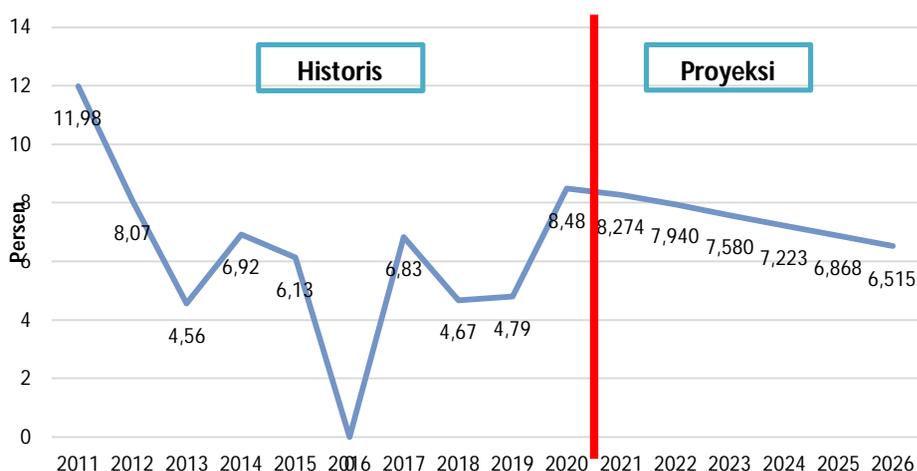
Uraian	2020	2021	2022
Nasional	n/a	n/a	n/a
Banten	2.85-3.2*	2.85-3.8*	3.4-4*
Tangerang Selatan	1,67	2,75	3,29**

\*) Proyeksi RKPD 2022 Provinsi Banten

\*\*\*) Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026

#### d. Kondisi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tangerang Selatan diperkirakan akan terjadi penurunan dari tahun 2020 di angka 8,48 persen menjadi 7,9 persen pada tahun 2022 dan 6,5 persen pada tahun 2026. Berikut ini adalah proyeksi Pengangguran Terbuka Kota Tangerang Selatan.



Gambar 3.3. Proyeksi Angka Pengangguran Terbuka (%) Kota Tangerang Selatan

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

Data Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan yang rilis pada bulan November 2020 disebutkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tangerang Selatan adalah 8,48 persen di bulan Agustus.

Apabila pemerintah berhasil menyiapkan skema untuk mengantisipasi ledakan pengangguran di 2021 maka Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tangerang Selatan diasumsikan sebesar 7.94 prosen.

Tabel 3.6. Perkiraan TPT Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 (dalam persen)

Uraian	2020	2021	2022
Nasional	7,07	7,7 – 9,1	6.24 - 5.52*
Banten	10,64	9,2 – 9,7	9,2 – 9,7**
Tangerang Selatan	6,54-8,48	8,27	7,94***

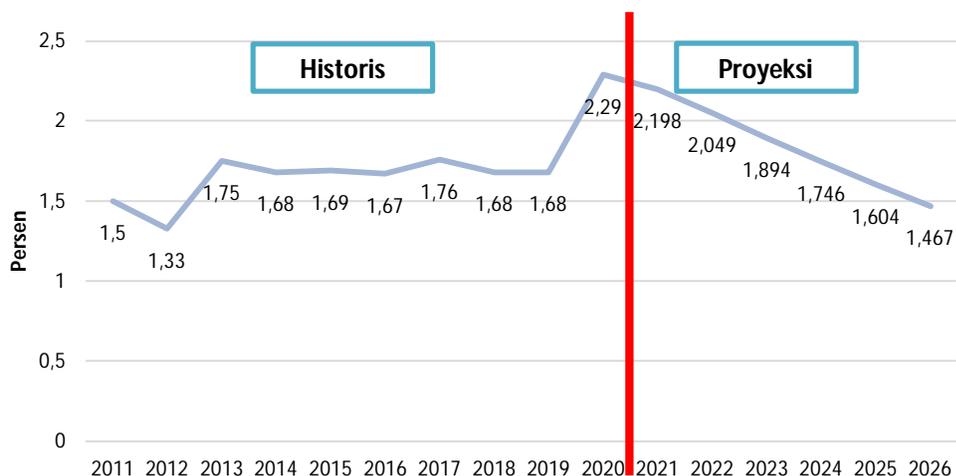
\*) PMDN 17/2021

\*\*\*) Proyeksi RKPD 2022 Provinsi Banten

\*\*\*\*) Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026

**e. Kondisi dan Proyeksi Kemiskinan**

Jika dalam kondisi baseline tidak terjadi pandemi, Tangerang Selatan seharusnya mampu menurunkan angka kemiskinan dari 1.68 persen di tahun 2019 menjadi 1.53 persen di tahun 2020. Namun, jika dibuatkan dengan skenario mengalami perekonomian yang berat maka angka kemiskinan di Kota Tangerang Selatan dipredikai sebesar 2,049 persen pada tahun 2022. Berikut ini adalah hasil proyeksinya dari tahun 2021 s.d 2026.



Gambar 3.4. Proyeksi Angka Tingkat Kemiskinan Kota Tangerang Selatan

Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

Proyeksi ini menunjukkan bahwa apabila angka kemiskinan (dalam persen) berkurang maka pemerintah kota Tangerang Selatan lebih mudah untuk menjaga masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan tidak masuk menjadi kategori miskin dan tingkat kedalaman dan keparahan masyarakat miskin tidak bertambah.

Tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 tercatat meningkat menjadi 2,29 dan pasca program vaksin pada tahun 2021 diharapkan akan terjadi perbaikan perekonomian yang berdampak positif kepada tingkat kemiskinan sehingga pada tahun 2022 menjadi 1.8 - 2 persen.

Tabel 3.7. Proyeksi Persentase Kemiskinan Nasional, Banten dan Kota Tangerang

Uraian	2020	2021	2022
Nasional	9,78	9,2 – 9,7	8,5 – 9,0*
Banten	5,92	5,06	4,99 – 5,4**
Tangerang Selatan	2,29	2,20	1.8-2,06***

\*) PMDN 17/2021

\*\*) Proyeksi RKPD 2022 Provinsi Banten

\*\*\*) Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026

**3.1.4. Penanggulangan COVID-19**

Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam upaya pemulihan ekonomi ini akan bergantung kepada kondisi perkembangan kasus COVID-19, tetapi skema pemulihan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat dengan kebijakan program padat karya (*work for cash*) yang diarahkan ke perangkat daerah yang menangani urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perumahan dan permukiman khususnya pekerjaan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pemeliharaan PSU sederhana. Selain itu, kebijakan alokasi anggaran satu miliar setiap kelurahan yang dikelola kelurahan untuk melakukan pekerjaan dengan pendekatan Pemberdayaan Masyarakat yang bertujuan memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat juga merupakan salah satu kebijakan yang akan dilakukan.

Salain program pemulihan ekonomi dengan pola padat karya dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kota Tangerang Selatan secara simultan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha dalam upaya membuka beberapa lapangan usaha agar tetap bergeliat dengan batasan ketat protokol kesehatan yang proporsional.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kota Tangerang Selatan tetap melakukan upaya preventif terhadap COVID-19 melalui peran serta masyarakat, kelurahan sampai ketingkat Kota Tangerang Selatan dan termasuk upaya kuratif berupa penyediaan kebutuhan penanganan medis yang dipusatkan di Rumah Lawan Covid (RLC) dan rumah sakit Serpong Utara sebagai tempat karantina di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 3.8. Rencana Aksi Penanggulangan COVID-19

No	Uraian	Urusan	Perangkat Daerah	Rencana Aksi
1	Penanggulangan COVID-19	Kesehatan	Dinas Kesehatan	- Upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. - Melakukan edukasi masyarakat door to door oleh Tenaga Kesehatan - Menyediakan fasilitas Kesehatan, pusat Karantina, dan vaksinasi masal
		Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	- Pemakaman khusus pasien COVID-19
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembantuan pelaksanaan penegakan disiplin Prokes
			BPBD	Koordinator Satgas COVID-19
		Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyebarluasan informasi
		Perhubungan	Dinas Perhubungan	Pembantuan pelaksanaan penegakan disiplin Prokes
		Lintas Urusan	Lintas Perangkat Daerah	Penegakan Prokes.
2	Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemerintahan Umum	Kecamatan	Pelaksanakan program Padat Karya
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman	
		Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Kebijakan Relaksasi Pajak
		Pariwisata	Dinas Pariwisata	Pengetatan prokes semua tempat hiburan dan tempat wisata.
		Kesehatan	Dinas Kesehatan	Perluasan cakupan UHC
		Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM	Pemberian bantuan permodalan UMKM
		Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	Pertanian perkotaan (Urban Farming)
3	Jaring Pengaman Sosial	Sosial	Dinas Sosial	Pemberian Bantuan Sosial

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran sebelumnya, struktur pendapatan daerah masih berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sedangkan untuk proyeksi/target pendapatan daerah mulai tahun anggaran 2021 dan seterusnya struktur Pendapatan Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah dimutakhirkan menjadi Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020.

Pada tahun 2022 pendapatan daerah diasumsikan mengalami penurunan sebesar 12,85 persen apabila dibandingkan dengan target pendapatan hasil refocusing Tahun Anggaran 2021, penurunan tersebut

karena proyeksi pendapatan transfer diprediksi mengalami penurunan 24,42 persen meskipun pendapatan asli daerah diproyeksi meningkat sebesar 5,16 persen. Asumsi penurunan tersebut ditunjang oleh beberapa faktor antara lain kebijakan pemerintah masih berfokus kepada penanganan COVID-19, menu kegiatan Dana Alokasi Khusus regular maupun penugasan untuk kota Tangerang Selatan berkurang, pendapatan pemerintah provinsi Banten dan DKI sebagai pemerintah daerah yang memberikan Bantuan Keuangan masih berfokus kepada penanganan COVID-19. Asumsi kenaikan pendapatan asli daerah ditunjang oleh beberapa faktor diantaranya adalah sarana dan prasarana kota yang menunjang terciptanya perekonomian, data investasi di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2021 mengalami peningkatan, jumlah masyarakat yang telah mendapatkan vaksin, pertumbuhan dan kontribusi beberapa kelompok lapangan usaha pada sektor perdagangan dan jasa masih tinggi dengan catatan pembatasan aktivitas dilakukan secara cermat.

Target dan proyeksi APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 secara rinci disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.9. Target/Proyeksi APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 - 2022

URAIAN	TARGET dan PROYEKSI	
	2021*	2022
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.513.969.455.500</b>	<b>1.592.042.998.050,00</b>
a. Hasil Pajak Daerah	1.307.579.000.000	1.390.300.000.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah	45.809.060.000	35.283.616.050,00
c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	160.581.395.500	166.459.382.000,00
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.578.952.512.121</b>	<b>1.193.366.499.437,00</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>959.094.844.000</b>	<b>724.328.692.000,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak		154.102.684.000,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
Dana Alokasi Umum		570.226.008.000,00
Dana Alokasi Khusus Fisik		Dialokasikan setelah menerima Keputusan Menteri Keuangan
Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Dialokasikan setelah menerima Keputusan Menteri Keuangan
<b>Transfer Dana Pemerintah Pusat Lainnya</b>		
Dana Otonomi Khusus		
Dana Penyesuaian		Dialokasikan setelah menerima Keputusan Menteri Keuangan
<b>Transfer Antar-Daerah</b>	<b>619.857.668.121</b>	<b>469.037.807.437,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil		<b>469.037.807.437,00</b>
Bantuan Keuangan		
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>103.099.230.000</b>	
Pendapatan Hibah		Dialokasikan setelah menerima Keputusan Menteri Keuangan
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.196.021.197.621</b>	<b>2.785.409.497.487,00</b>
<b>BELANJA DAERAH</b>		
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.499.449.704.587</b>	<b>2.923.874.824.226,00</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>783.255.631.401</b>	
Belanja Modal Tanah	77.677.000.000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.308.241.212	

URAIAN	TARGET dan PROYEKSI	
	2021*	2022
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	325.589.526.741	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	264.581.840.448	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.099.023.000	
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>52.175.474.625</b>	<b>22.812.883.515,00</b>
Belanja Tidak Terduga	52.175.474.625	
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>21.715.356.000</b>	
Belanja Bantuan Keuangan	21.715.356.000	
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>3.356.596.166.613</b>	<b>2.946.687.707.741,00</b>
Total Surplus/(Defisit)	(160.574.968.992)	(161.278.210.254,00)
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>160.574.968.992</b>	<b>161.278.210.254,00</b>
SILPA	160.574.968.992	161.278.210.254,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		
Penyertaan Modal Daerah		
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>160.574.968.992</b>	<b>161.278.210.254,00</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* APBD Tahun 2021, Hasil Refocussing

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan

Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian yang dinamis dan penuh dengan tantangan. Pandemi Covid-19 menyebabkan tekanan yang cukup besar dari sisi ekonomi hingga menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah. Pendapatan dan konsumsi masyarakat mengalami kontraksi sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat dan 'aksi tahan' untuk membeli. Pembatasan pergerakan masyarakat juga mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja di berbagai sektor, serta penurunan indikator makro ekonomi, di antaranya konsumsi dan produksi rumah tangga, investasi riil, dan penyerapan tenaga kerja. Gejolak perekonomian ini berdampak pada penurunan pendapatan daerah.

Dari sisi pajak daerah, masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan melaporkan data pajak yang sebenarnya menjadi permasalahan tersendiri, disusul dengan ketetapan wajib pajak (SPPT) yang belum akurat, tingkat kesadaran wajib pajak yang belum baik, perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berimplikasi terhadap penerimaan di daerah.

Dengan melihat koreksi atas realisasi makro ekonomi Kota Tangerang Selatan tahun 2020, proyeksi makro ekonomi Tangerang Selatan tahun 2021 dan 2022 serta melihat performa pendapatan daerah tahun sebelumnya, diharapkan Pendapatan daerah tidak mengalami penurunan pada masa yang akan datang, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut:

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Mempertimbangkan analisis dan proyeksi dari penerimaan pendapatan asli daerah, mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2019 dan tahun 2020, asumsi pendapatan tahun 2021, dan tahun 2022. Maka PAD diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 5,16 persen dibandingkan dengan target Tahun 2021, kenaikan tersebut diasumsikan dari Hasil Pajak Daerah ditargetkan naik sebesar 6,33 persen, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah naik 3,66 persen, sementara untuk Retribusi masih terkoreksi diangka 22,98 persen.

Faktor membaiknya perekonomian menjadi dasar asumsi kenaikan PAD tahun 2022, antara lain faktor *base effect* yang rendah di 2020 mendorong kinerja perekonomian tumbuh tinggi di 2021.

Angka basis yang rendah ini menyebabkan berbagai komponen pertumbuhan ekonomi seperti konsumsi, dan investasi tumbuh tinggi di atas rata-rata pertumbuhan periode normal. Dukungan APBN dan APBD dalam bentuk bantuan sosial atau jaring pengaman sosial masih berlanjut menambah kecepatan pemulihan konsumsi di masyarakat. Agenda pemulihan ekonomi berjalan relatif cepat, mengingat dampak terhadap pengangguran dan sektor riil yang tidak terlalu parah, sehingga dunia usaha dapat kembali beraktivitas dengan relatif cepat.

Berlakunya Peraturan Pemerintah turunan Undang-Undang Cipta Kerja terkait Ijin Mendirikan Bangunan yang diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi salah satu penyumbang hilangnya potensi PAD dari sektor retribusi IMB sebesar 60 – 70%.

Faktor berikutnya adalah pemanfaatan potensi lain seperti pemanfaatan barang milik daerah yang dapat digali dan dioptimalkan kembali sehingga diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan ini diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan PAD pada tahun 2022, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan melalui pendayagunaan data dan system informasi pajak daerah yang terintegrasi.
- 2) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan serta kepercayaan masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi.
- 3) Menjaring potensi wajib pajak.
- 4) Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan *Online System* terhadap empat jenis Pajak Daerah, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.
- 5) Penagihan piutang pajak daerah bekerja sama dengan instansi terkait dan pemutakhiran data
- 6) Inovasi berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas Pelayanan serta untuk menghindari hilangnya potensi pendapatan pajak daerah dan retribusi Daerah.
- 7) Penguatan fungsi pelayanan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela.
- 8) Ekstensifikasi data potensi sebagai upaya penggalian potensi dengan pendekatan efektivitas ekstensifikasi melalui pendekatan *end-to end*.
- 9) Peningkatan Efektifitas pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 10) Pemanfaatan Barang Milik Daerah (lahan).
- 11) Peningkatan secara komprehensif atas kompetensi petugas pajak dan retribusi daerah.
- 12) Koordinasi secara berkala dengan OPD penghasil dalam rangka upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
- 13) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sah.

## **b. Pendapatan Transfer**

### **(1) Dana Alokasi Umum (DAU)**

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2022 digunakan target sesuai target tahun 2021 yaitu sebesar Rp.570.226.008.000,- meskipun pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp.558.077.884.000.

### **(2) Dana Transfer Khusus**

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan pendapatan dari dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- (a) DAK Fisik, pada Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp19.583.114.628,- dan Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp20.000.000.000,-.
- (b) DAK Non Fisik, pada Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp136.366.813.180,- dan pada Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 144.617.005.377,-.
- (c) Dana Penyesuaian (DID) pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp70.765.756.000,- dan Tahun 2022 sementara direncanakan sebesar Rp30.240.000.000,- .

### **(3) Pendapatan Hibah BOSNAS**

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan pemerintah Kota Tangerang Selatan pada APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimana pada Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp96.822.900.000, -.

Dengan program BOS tersebut, sekolah diharapkan dapat lebih fokus pada upaya peningkatan mutu pembelajaran tanpa terkendala biaya untuk kebutuhan operasional.

### **(4) Bantuan Keuangan**

Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah Propinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan Keuangan yang di terima dari Provinsi Banten dan DKI Jakarta untuk tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp35.000.000.000,-

Secara keseluruhan upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mencapai target pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana perimbangan dan sumber-sumber penerimaan dari sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah secara intensif.
- 2) Mengoptimalkan penerimaan Dana Perimbangan dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik wilayah kepada Pemerintah Pusat.
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
- 4) Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10. Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Tangrang Selatan Tahun 2018 s.d. Tahun 2022

PP 58/2005				PP 12/2020		
URAIAN	REALISASI			URAIAN	TARGET	PROYEKSI
	2018	2019	2020		2021	2022
<b>PENDAPATAN</b>						
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.621.710.653.274,00</b>	<b>1.817.505.710.180,00</b>	<b>1.538.705.693.438</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.513.969.455.500</b>	<b>1.592.042.998.050,00</b>
Hasil Pajak Daerah	1.422.942.943.166,00	1.603.186.593.934,00	1.345.141.128.042	a. Hasil Pajak Daerah	1.307.579.000.000	1.390.300.000.000,00
Hasil Retribusi Daerah	84.604.588.401,00	48.607.067.026,00	62.630.682.276	b. Hasil Retribusi Daerah	45.809.060.000	35.283.616.050,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	114.163.121.707,00	165.712.049.220,00	130.933.883.120	c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	160.581.395.500	166.459.382.000,00
<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>889.139.727.314,00</b>	<b>901.915.592.499,00</b>	<b>907.142.937.242</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.578.952.512.121</b>	<b>1.193.366.499.437,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	176.107.104.689,00	152.596.723.637,00	193.115.125.434	<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>959.094.844.000</b>	<b>724.328.692.000,00</b>
Dana Alokasi Umum (DAU)	571.874.988.075,00	609.575.078.000,00	558.077.884.000	Dana Bagi Hasil Pajak		154.102.684.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	141.157.634.550,00	139.743.790.862,00	155.949.927.808	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
				Dana Alokasi Umum		570.226.008.000,00
				Dana Alokasi Khusus Fisik		
				Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
				<b>Transfer Dana Pemerintah Pusat Lainnya</b>		
				Dana Otonomi Khusus		
				Dana Penyesuaian		
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>699.862.117.863,00</b>	<b>724.819.354.656,00</b>	<b>558.667.834.798</b>			
Pendapatan Hibah	89.877.795.000,00	91.094.680.000,00	158.843.949.435	<b>Transfer Antar-Daerah</b>	<b>619.857.668.121</b>	<b>469.037.807.437,00</b>
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	509.984.322.863,00	564.569.204.656,00	284.058.129.363	Pendapatan Bagi Hasil		469.037.807.437,00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.000.000.000,00	29.155.470.000,00	70.765.756.000	Bantuan Keuangan		
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	65.000.000.000,00	40.000.000.000,00	45.000.000.000	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>103.099.230.000</b>	
				Hibah		
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.210.712.498.451,00</b>	<b>3.444.240.657.335,00</b>	<b>3.004.516.465.478</b>	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.196.021.197.621</b>	<b>2.785.409.497.487,00</b>

\* APBD Tahun 2021, Hasil Refocussing

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan dalam pengelolaan belanja daerah tahun anggaran 2022 Kota Tangerang Selatan adalah:

a. Belanja *Mandatory spending*

*Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan *mandatory spending* ini untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Selain itu, *mandatory spending* merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan perintah Undang-undang.

*Pertama*, alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBD. Alokasi anggaran ini dianggarkan sebesar Rp. 699 Miliar atau 23 persen sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4).

*Kedua*, alokasi anggaran fungsi kesehatan sebesar 10,13% atau setara dengan Rp. 299 miliar yang mana ketentuannya sesuai dengan ketentuan UU Nomor 36 tahun 2009.

. Adapun belanja lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11. *Mandatory spending* Kota Tangerang Selatan TA 2022

Fungsi	Urusan		Pagu Indikatif		Keterangan
	Urusan	Perangkat Daerah	(Rp)	(%)	
Fungsi Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	699.913.360.000	23.7%	Termasuk asumsi DAK bidang Pendidikan, Pendapatan Hibah BOSNAS
	Kebudayaan	Dinas Pemuda dan Olahraga			
	Pemuda dan Olahraga	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			
	Perpustakaan				
Fungsi Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	299,197,450,000	10.13%	Tidak termasuk Gaji Tenaga Kesehatan, DID dan DAK Kesehatan
	Pengendalian Penduduk dan KB	Dinas PMPPPAKB			
Belanja Infrastruktur	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PU	946.834.550.000	32.13%	Belum termasuk DAK Fisik
		Dinas BPR			
	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
	Lingkungan Hidup	Dinas LH			
Kebencanaan	Ketentraman dan Ketertiban Umum	BPBD	36.800.000.000	1.25%	Belum termasuk DAK Fisik
		Dinas Damkar			
Belanja Pendidikan dan Pelatihan	Pemerintahan Umum	BKPP	8.000.000.000	0.27%	Belum termasuk Pendidikan dan Pelatihan di Perangkat Daerah Teknis
Fungsi Pengawasan	Pemerintahan Umum	Inspektorat	25.094.550.000	0.85%	
Dana Kelurahan	Pemerintahan Umum	Kecamatan	54.000.000.000	1.83%	

b. Rencana program/kegiatan bersumber dari anggaran yang bersifat *reward* dan *proposal based* (a.l. DID, DAK Fisik dan Bantuan Keuangan).

Program / Kegiatan	Indikasi Rencana Tindak Tahun 2022			
	DAK Fisik	Dana Penyesuaian (acuan PermenKeu No. 167/PMK.07/2020)	Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta (acuan Surat Karo Kerjasama Daerah No. 852/072.3 ahun 2021)	Bantuan Keuangan Provinsi Banten (acuan Pergub Banten No. 6 Tahun 2021)
Program penanggulangan bencana			1. Pengadaan Sarana Penanggulangan Bencana	

Program / Kegiatan	Indikasi Rencana Tindak Tahun 2022			
	DAK Fisik	Dana Penyesuaian (acuan PermenKeu No. 167/PMK.07/2020)	Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta (acuan Surat Karo Kerjasama Daerah No. 852/072.3 ahun 2021)	Bantuan Keuangan Provinsi Banten (acuan Pergub Banten No. 6 Tahun 2021)
1. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			2. Pengadaan Sarana – Prasarana Pencegahan Penyebaran Covid-19	
Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.  Kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun dalam daerah Kab./Kota			Pengadaan Mobil Pemadam kemakaran dan APD	Pembangunan Posko Damkar
Program Pengelolaan Sampah  Kegiatan Pengelolaan Sampah			Pengadaan alat berat dan sarana penyiapan PLTSa Cipeucang.	
Program Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			Penyediaan fasilitas utama dan penunjang Terminal	
Program Pemenuhan UKP dan UKM  1. Kegiatan Penyediaan Fasyankes untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab./Kota	1. Telekonsultasi (Kesehatan) 2. Penguatan promosi, surveillance dan tatalaksana gizi 3. Bahan Pakai Habis. 4. Prasarana Puskesmas. 5. Penyediaan prasarana RS 6. Penyediaan alat kesehatan RS. 7. Pengediaan obat dan BMHP 8. Pengadaan Sarana Prasarana Percepatan penurunan Stunting.		1. Penyediaan Alkes, BMHP dan Obat untuk RSU Pondok Betung. 2. Penyediaan sarana – prasarana penanganan COVID-19 untuk RSU Pamulang.	Penyediaan sarana – prasarana penanganan COVID-19 untuk RSU Pamulang.
Program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.  Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kab./Kota			1. Pembangunan Tandon Puri Bintaro 2. Pembangunan Kali Ciater Segmen Ciater Hilir 3. Penataan Egram Gintung Segmen Griya Mandiri 4. Perbaikan inlet Kali Seru Pondok Kacang 5. Pembangunan Drainase Kota (4 lokasi) 6. Pembangunan Jembatan Kali Pesanggrahan Villa Cinere	1. Pembangunan Tandon Puri Bintaro 2. Pembangunan Kali Ciater Segmen Ciater Hilir 3. Penataan Egram Gintung Segmen Griya Mandiri 4. Perbaikan inlet Kali Seru Pondok Kacang 5. Pembangunan Drainase Kota (4 lokasi) Pembangunan Jembatan Kali Pesanggrahan Villa Cinere
Program Pengelolaan Pendidikan	1. Pembangunan Toilet SD beserta Sanitasinya 2. Pegadaan peralatan TIK SD. 3. Rehab Ruang Kelas SMP tingkat kerusakan Sedang beserta perabotannya. 4. Pembangunan Toilet SDM beserta Sanitasinya. 5. Pembangunan ruang Lab. Komputer SMP beserta perabotannya. 6. Pembangunan ruang TU SMP beserta perabotannya. 7. Pengadaan peralatan TIK SMP.			Rehabilitasi Prasarana Sekolah Dasar dan Menengah Tahap 1
Program Pengelolaan Pendidikan	1. Rehabilitasi Gedung Fas. Layanan			

Program / Kegiatan	Indikasi Rencana Tindak Tahun 2022			
	DAK Fisik	Dana Penyesuaian (acuan PermenKeu No. 167/PMK.07/2020)	Bantuan Keuangan Provinsi DKI Jakarta (acuan Surat Karo Kerjasama Daerah No. 852/072.3 ahun 2021)	Bantuan Keuangan Provinsi Banten (acuan Pergub Banten No. 6 Tahun 2021)
	Perpustakaan. 2. Pengadaan perabot da/atau TIK Layanan Perpustakaan. 3. Pengembangan bahan perpustakaan.			

- c. Rencana belanja Program / kegiatan bersumber dari anggaran Pendapatan hibah BOSNAS. Alokasi belanja program/kegiatan yang bersumber dari pendapatan BOSNAS yang diberikan kepada Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Operasional Sekolah untuk Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	48.710.607.260
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	33.428.735.250
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.815.607.970
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	950.000.000

- d. Belanja Program Prioritas Perangkat Daerah

Belanja program prioritas Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2022 diimplementasikan melalui program prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Urusan/Program	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	90.904.950.480	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	81.562.106.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	131.522.499.692	Dinas Kesehatan
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	37.424.030.000	Dinas Kesehatan
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	147.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.336.042.000	Dinas Kesehatan
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	50.987.250.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.100.000.000	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.950.000.000	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	130.312.500.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	222.435.400.000	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100.000.000	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang

Urusan/Program	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	119.319.937.271	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.895.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	7.154.245.195	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.759.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	17.870.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	11.500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	31.535.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.045.505.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	6.176.000.000	Badan Penanggulangan Bencana
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	9.903.380.000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	610.000.000	Dinas Sosial
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	900.000.000	Dinas Sosial
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	725.000.000	Dinas Sosial
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	350.000.000	Dinas Sosial
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	250.000.000	Dinas Sosial
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.380.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	820.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.260.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	557.089.050	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	752.885.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	834.930.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	70.550.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	460.994.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	413.425.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Urusan/Program	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		
2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	50.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	625.510.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	172.760.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.961.050.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	16.841.856.277	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	390.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	130.513.325.659	Dinas Lingkungan Hidup
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	430.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	365.800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	584.691.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	258.212.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	55.511.810.000	Dinas Perhubungan
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.718.361.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	25.867.038.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	300.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	300.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	750.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	500.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Urusan/Program	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.547.086.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.382.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.450.800.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	190.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	300.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	600.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	150.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	150.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.568.000.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	10.955.276.138	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	865.000.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	374.516.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	311.153.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	15.738.450.000	
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.007.941.420	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	846.012.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	3.988.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	35.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	800.093.875	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	117.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.459.859.000	Dinas Pariwisata
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	350.000.000	Dinas Pariwisata
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	275.000.000	Dinas Pariwisata
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	725.000.000	Dinas Pariwisata
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	261.650.000	Dinas Ketahanan Pangan,

Urusan/Program	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
PERTANIAN		Pertanian Dan Perikanan
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	370.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	155.200.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	39.412.780	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	951.759.200	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	131.553.460	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	163.723.816	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	82.619.650	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	48.648.300	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		
3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.802.565.204	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	116.255.890	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	16.020.800	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	22.440.900	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	125.661.000.000	
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.350.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.000.000.000	Sekretariat Daerah
4.02 SEKRETARIAT DPRD		
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	44.111.760.000	Sekretariat DPRD
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01 PERENCANAAN		
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.584.547.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.074.889.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02 KEUANGAN		
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	26.016.395.425	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.817.955.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.999.999.999	Badan Pendapatan Daerah
5.03 KEPEGAWAIAN		
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.320.000.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.212.745.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	904.855.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01 INSPEKTORAT DAERAH	25.094.550.000	
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.943.794.700	Inspektorat
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	78.348.000	Inspektorat
7 UNSUR KEWILAYAHAN		

Urusan/Program	Jumlah Pagu Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
7.01 KECAMATAN	215.199.000.000	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.785.153.600	Kecamatan
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.044.999.999	Kecamatan
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	995.000.000	Kecamatan
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	360.000.000	Kecamatan
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	59.143.477	Kecamatan
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
8.01.02 PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	490.971.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	2.822.112.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	450.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	900.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.075.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

e. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai yang meliputi Gaji dan Tunjangan yang melekat untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPR serta ASN dialokasikan penuh 1 Tahun anggaran, Tambahan Penghasilan PNS dan Honorarium pegawai Non PNS untuk sementara dialokasikan cukup.

f. Belanja Hibah

Implementasi pengaturan tentang Belanja Hibah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dimana didalamnya memberikan definisi tersendiri penerima hibah kepada Lembaga dan Badan. Pemberian hibah tersebut ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2022, belanja Hibah yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Walikota nomor 2 Tahun 2021. Dialokasikan Hibah uang kepada 2 (dua) Lembaga dibawah binaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dan untuk Hibah barang dialokasikan pada beberapa Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas Kepala Daerah, seperti antara lain perbaikan rumah umum tidak layak huni pada program kampung membangun.

g. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dialokasikan pada program dan kegiatan di perangkat daerah yang mampu urusan sosial, adapun belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dialokasikan sebesar 50% dari alokasi belanja bantuan sosial yang direncanakan.

Pada Tahun 2022, usulan belanja bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan belum dapat dialokasikan karena belum memenuhi syarat pengusulan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Walikota nomor 2 Tahun 2021.

h. Belanja Bantuan Keuangan Kepada partai Politik

Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan dengan alokasi sebesar Rp1.958 miliar. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan dan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

i. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk mengantisipasi kejadian luar biasa diluar kewenangan daerah atau kondisi darurat/ mendesak diluar perencanaan. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Beberapa hal yang menjadi arah kebijakan belanja sebagai berikut:

- 1) Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan belanja mandat undang-undang, prioritas dan kinerja.
- 2) Mengedepankan belanja untuk pemenuhan cakupan layanan Kesehatan termasuk pencegahan, penanganan dan penanggulangan COVID-19, akses Pendidikan, yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional.
- 3) Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**.
- 4) Memperbesar peluang kerja untuk masyarakat dengan pola padat karya (*work for cash*) melalui Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Urusan Kecamatan.
- 5) Mengalokasikan belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dilakukan setelah kebutuhan belanja wajib pelayanan dasar dipenuhi.
- 6) Mengurangi belanja untuk kegiatan yang bersifat ceremonial.
- 7) Membatasi belanja modal tanah selain untuk pelebaran jalan, belanja modal peralatan dan mesin seperti kendaraan dinas jabatan, belanja penunjang kegiatan seperti ATK, Fotocopy, Cetak, Perlengkapan peserta, Pakaian dan lainnya.
- 8) Memanfaatkan teknologi informatika dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak seperti seminar, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, lokakarya (*workshop*), simposium dan diskusi termasuk untuk kegiatan belajar dan mengajar pada pendidikan formal maupun non formal.
- 9) Pengelolaan belanja dilakukan dengan azas efektif dan efisien

Realisasi, Rencana dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Tangrang Selatan Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12. Realisasi dan Rencana Belanja Daerah Kota Tangrang Selatan Tahun 2018 s.d. Tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

PP 58/2005				PP 12/2020		
URAIAN	REALISASI			URAIAN	RENCANA	PROYEKSI BELANJA
	2018	2019	2020		2021*	2022
<b>BELANJA DAERAH</b>		-		<b>BELANJA DAERAH</b>		
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>895.220.100.668,00</b>	<b>875.304.296.062,00</b>	<b>1.007.261.456.879</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.499.449.704.587</b>	<b>2.923.874.824.226,00</b>
Belanja Pegawai	801.513.472.363,00	824.017.933.552,00	788.113.190.002	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>783.255.631.401</b>	
Belanja Hibah	91.572.265.835,00	49.292.985.061,00	143.930.231.505			
				<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>52.175.474.625</b>	22.812.883.515,00
Belanja Bantuan Sosial			618.000.000	Belanja Tidak Terduga	52.175.474.625	
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dan Partai Politik	1.812.891.000,00	1.861.285.000,00	1.825.629.000	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>21.715.356.000</b>	
Belanja Tidak Terduga	321.471.470,00	132.092.449,00	72.774.406.372	Belanja Bantuan Keuangan	21.715.356.000	
<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2.376.221.898.773,65</b>	<b>2.759.454.352.711,00</b>	<b>2.136.135.760.092</b>			
Belanja Pegawai	801.513.472.363,00	824.017.933.552,00	419.997.227.047			
Belanja Barang dan Jasa	962.021.406.599,65	1.149.001.626.782,00	890.454.713.751			
Belanja Modal	1.019.928.803.901,00	1.206.419.178.583,00	825.683.819.294			
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>3.271.441.999.441,65</b>	<b>3.634.758.648.773,00</b>	<b>3.143.397.216.971</b>	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>3.356.596.166.613</b>	<b>2.946.687.707.741,00</b>

\* APBD Tahun 2021, Hasil Refocussing

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 didapat dari prediksi hasil pelampauan pendapatan dan efisiensi penerimaan anggaran tahun anggaran 2021 serta Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Terkait dengan pengeluaran pembiayaan, dapat diarahkan untuk penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah/ badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal kebutuhan wajib pelayanan dasar terpenuhi.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Adapun realisasi, rencana dan proyeksi pembiayaan daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2018 s.d. tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.13. Realisasi, Rencana dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Tangrang Selatan tahun 2018 s.d. tahun 2022

PP 58/2005				PP 12/2020		
URAIAN	REALISASI			URAIAN	RENCANA	PROYEKSI
	2018	2019	2020		2021*	PEMBIAYAAN
					2022	
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>544.436.370.041,24</b>	<b>461.868.262.542,35</b>	<b>249.350.271.104,35</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>160.574.968.992</b>	<b>161.278.210.254,00</b>
Sisa Lebih Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	544.436.370.041,24	461.868.262.542,35	249.350.271.104,35	SILPA	160.574.968.992	161.278.210.254,00
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>22.000.000.000,00</b>	<b>22.000.000.000,00</b>		<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>		
Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	22.000.000.000,00	22.000.000.000,00		Penyertaan Modal Daerah		
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>522.436.370.041,24</b>	<b>439.868.262.542,35</b>	<b>249.350.271.104,35</b>	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>160.574.968.992</b>	<b>161.278.210.254,00</b>
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>461.706.869.050,59</b>	<b>249.350.271.104,35</b>	<b>110.469.519.611,35</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* APBD Tahun 2021, Hasil Refocussing

### 3.3. Inovasi Daerah

#### 3.3.1. Pemanfaatan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama OPD	Bentuk Inovasi	Aplikasi	Non Aplikasi	Keterangan
1.	Bapenda	Prakmatis (Proses Balik Nama Otomatis)	√		
		ETA (Easy To Acces)	√		
		E-SPTPD	√		Aplikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara elektronik yang dikelola oleh BAPENDA Kota Tangerang Selatan
		Simpel (Sistem Penyampaian SPPT PBB Elektronik)	√		Aplikasi Sistem Penyampaian SPPT PBB Elektronik (SIMPEL) yang dikelola oleh BAPENDA Kota Tangerang Selatan
		e-Pajak Daerah	√		Aplikasi e-Pajak Daerah KOTA TANGERANG SELATAN
2.	DPMTSP	Simponie (Sistem Manajemen Perijinan)	√		Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online (Simponie) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan
		IMB ON The SPOT	√		
		Laris (Layanan Arsitek Gratis)	√		
3.	Dishub	ATCS	√		Area Traffic Control System (ATCS) atau yang lebih dikenal dengan istilah ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan
		sipencatra.tangerangselatankota.go.id			Sistem Pemilihan Calon Mitra Sewa (Sipencatra) yang dikelola oleh Dinas Perhubungan untuk memilih vendor yang mengelola lahan parkir
4.	Disdukcapil	Melipir di Mall	√		
		Simpelin	√		
		Siduta (Sistem Informasi Penduduk Kota Tangerang Selatan)	√		
		KIA (Kartu Identitas Anak) KU Beda		√	
		AKM (Anjungan Kia Mandiri)	√		
5.	Diskominfo	Sisumaker (Sistem Informasi Surat Masuk Dan Keluar)	√		Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar (Sisumaker) digunakan untuk mengirim surat antar OPD
		Siaran Tangsel	√		Halaman backend aplikasi

No.	Nama OPD	Bentuk Inovasi	Aplikasi	Non Aplikasi	Keterangan
					Sistem Pelaporan & Penugasan (Siaran Tangsel)
6	Dinkes	Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	√		Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus)
7	PU	Simanja (Sistem Informasi Manajemen Jalan & Jembatan)	√		Sistem Informasi Manajemen Jalan dan Jembatan (Simanja) yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan
8	Dinas Lingkungan Hidup	Maskot Pelitas (Penyelamat Lingkungan Tangerang Selatan)		√	
9	Kec. Ciputat	Jumari (Pelayanan Jumat Malam Hari)		√	
		Gang Cantik		√	
10	Kel. Pd. Ranji	Smart Village (Desa Cerdas)		√	
11	Bappeda	E-Musrenbang	√		
12	RSUD	Sistem Pendaftaran Online (SIPOLIN) yang terintegrasi dengan NIK dan Aplikasi SIMRS di RSUD Tangsel	√		<a href="https://daftaronlinersud.tangerangselatankota.go.id/home/daftar">https://daftaronlinersud.tangerangselatankota.go.id/home/daftar</a> Aplikasi daftar online di RSUD Kota Tangerang Selatan
		Sistem SMS Gateway RSUD Kota Tangsel (SIMARSEL)	√		
		System Pelaporan Kesehatan Ibu dan Anak (SIPIA) pada RSUD Kota Tangsel	√		
13	BKPP	LASIK (Layanan Administrasi & Informasi Kepegawaian)	√		Aplikasi Layanan Administrasi dan Informasi Kepegawaian Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dikelola oleh BKPP
14	Disperindag	Pagar Tangsel	√		
15	Kec. Pamulang	Jumantik		√	
16	Perpustakaan	iTangsel	√		
17	Perkim	Sistem Informasi Pengaduan Dan Layanan PJU Kota Tangerang Selatan (SIMPEL PJU TANGSEL)	√		
18	DPMP3AKB	SIPADUKEREN (Sistem Pengaduan Kekerasan Online)	√		
19	Dinas Bagunan	Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang	√		

### 3.3.2. Potensi Pengembangan Inovasi Daerah

Sistem inovasi daerah diwujudkan untuk menunjang sistem inovasi nasional. Sistem inovasi yang berorientasi kewilayahan menjadi kunci sukses keberhasilan pengembangan riset dan aplikasinya. Dengan orientasi kewilayahan maka dapat ditentukan fokus pengembangan daerah. Selain itu, pemerataan pembangunan dapat diupayakan melalui pengoptimalan kapasitas daerah. Penguatan sistem inovasi daerah merupakan wahana dalam memperkuat pilar-pilar penumbuhkembangan kreativitas dan inovativitas di daerah yang menjadi bagian integral penguatan sistem inovasi nasional.

Regulasi yang membahas khusus mengenai sistem inovasi daerah tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi No. 3 tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri No. 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Eksistensi regulasi ini semakin memperkuat sistem inovasi daerah kota Tangerang Selatan untuk fokus mengembangkan SiDA yang telah dibangun dalam meningkatkan perekonomian dan daya saing nasional. Termasuk dalam hal ini membuat sebuah terobosan yang dinamakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Elektronik (e-LPPD) yaitu sistem aplikasi yang dibuat untuk mempermudah Perangkat Daerah dalam pengisian

Indikator Kinerja Kunci (IKK), kemudian untuk mendokumentasikan data pendukung dari masing-masing elemen data capaian kinerja, secara *online* oleh seluruh OPD. Inovasi tersebut dinilai akan memiliki kelebihan seperti disiplin waktu input Elemen Data (ED) dan Data Pendukung (aplikasi memiliki limit waktu).

Tidak dipungkiri bahwa keterlambatan dalam penyampaian data capaian kinerja oleh OPD, menyebabkan proses pengolahan menjadi terlambat. Kemudian pengumpulan dan pengarsipan arsip data pendukung yang tidak teratur dan terkesan sulit dicari saat dibutuhkan. Keberadaan berkas Arsip memerlukan ruang yang besar, serta tenaga yang dibutuhkan terlalu banyak karena harus jempot bola ke setiap OPD yang tidak proaktif. Belum lagi kualitas data yang disampaikan juga masih rendah karena tidak ada verifikasi mandiri, sehingga kurangnya akuntabilitas, dan penyusunan LPPD tidak fokus karena bersamaan dengan penyusunan LKPJ Kepala Daerah.

Diharapkan dengan mengembangkan inovasi e-LPPD ini pola kerja penyusunan LPPD akan lebih cepat, efektif dan efisien waktu dan tenaga, dan dapat dipastikan dalam waktu 1 bulan (Februari), elemen data dan data pendukungnya sudah terverifikasi dan lampiran LPPD siap disampaikan oleh kepala daerah.

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Kota Tangerang Selatan, dimana tahun 2022 merupakan tahapan terakhir dari rangkaian periode waktu pembangunan jangka panjang yang mana dalam tahap pembangunan ini pembangunan diarahkan untuk meningkatkan pemeliharaan hasil-hasil capaian pembangunan dan pengembangan di segala bidang sebagai kota maju (*pro-poor, pro-growth, pro-job, pro-environment*). Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah:

1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial:

Penumbuh kembangan Kewirausahaan, perlindungan tenaga kerja, fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan berorientasi global.

2. Pengembangan lanjut kompetensi Sumber Daya Manusia:

Penumbuhkembangan dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, perluasan peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan, focus pembangunan bidang pendidikan pada peningkatan APM, APK, RLS, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang bermutu serta pola perilaku hidup sehat.

3. Pengembangan Daya Saing Perekonomian.

Pengembangan daya saing melalui pengembangan lanjut pemanfaatan teknologi, pengembangan dan peningkatan kualitas jasa produk, pengembangan kemitraan antara pelaku usaha.

4. Pemeliharaan dan pengembangan lanjut infrastruktur kota.

Mempertahankan pemeliharaan penyediaan seluruh infrastruktur kota dengan menitikberatkan peran pembagian tugas antara peran pemerintah dengan masyarakat/swasta dalam penyelenggaraannya.

5. Pemeliharaan Kualitas Penyelenggaraan Tata Pemerintahan.

Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

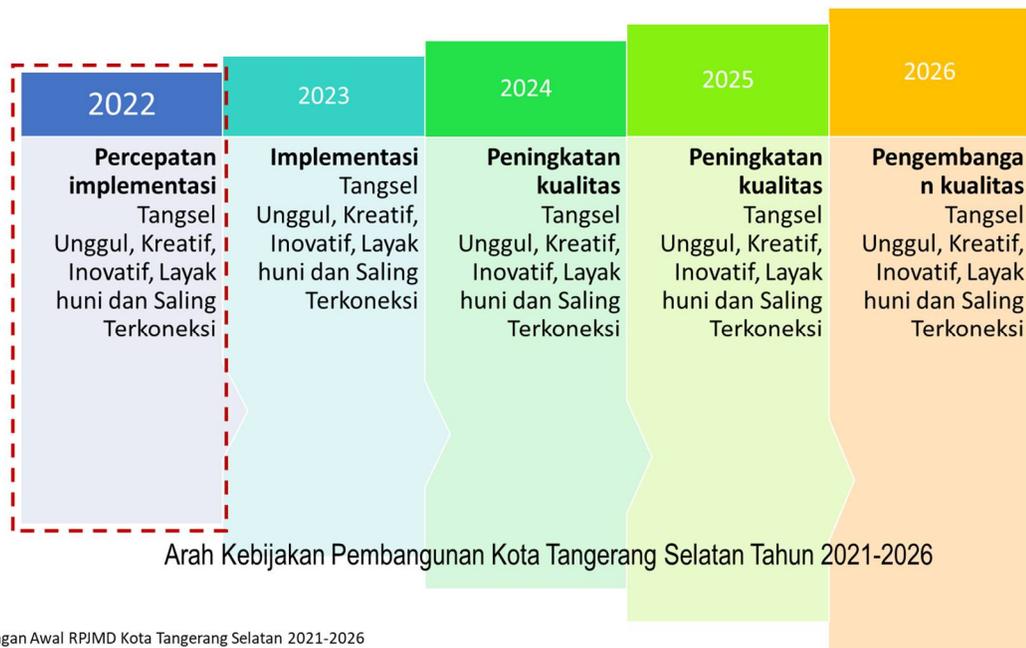
Tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Tangerang Selatan periode 2021-2026, yang ditujukan untuk mencapai Visi dan Misi pembangunan dalam RPJMD 2021-2026. Visi pembangunan sebagaimana tertuang saat ini dalam Rancangan Awal RPJMD 2021-2026 adalah "TERWUJUDNYA **TANGSEL UNGGUL** MENUJU KOTA LESTARI, SALING TERKONEKSI, EFEKTIF DAN EFISIEN". Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJMD, dirumuskan 5 (lima) misi pembangunan, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul
2. Pembangunan Infrastruktur yang Saling Terkoneksi

3. Membangun Kota yang Lestari
4. Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif
5. Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien



Visi dan Misi tersebut menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah, serta dasar keselarasan dan pencapaian kinerja pembangunan daerah, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah, dan saat ini RKPD tahun 2022 merupakan tahun pertama dari RPJMD periode 2021-2026, sebagaimana tersaji pada Gambar 4.1 berikut.



Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026

Gambar 4.1. Posisi RKPD 2022 dalam Rancangan Awal RPJMD 2021-2022

Sebagai pelaksanaan RPJMD, RKPD Tahun 2022 merupakan penyelarasan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah dalam RPJMD untuk tahun berkenaan. RKPD tahun 2022 merupakan hasil penelaahan terhadap indikator dan target kinerja sasaran dari Rancangan Awal RPJMD untuk Tahun 2022, yang dijabarkan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	TARGET
				2022
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,36	81,63
	Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	<b>79,56</b> (HLS=14,47, RLS= 1,81)	80,07
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	AHH (Angka Harapan Hidup)	72,49 Tahun	72,50
	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Cukup Baik	Cukup Baik
	Meningkatkan daya saing pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	n/a	53%
	Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,58	93,58
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,85	73,85
Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.		Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar (IKLI)	n/a	50
	Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Rasio konektivitas Kota	n/a	0,54
Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni		Indeks kota layak huni	65%	65-65,5%
	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	n/a	49,95
		Pengurangan luas kawasan kumuh perkotaan	112,8 ha	100
		Cakupan Pengelolaan Sampah	72%	90%

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal RPJMD	TARGET
				2022
		Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik	4,06%	4,26%
	Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	indeks resiko bencana	Sedang	Rendah
Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah		Indeks Daya Saing Daerah	n/a	Tinggi
	Meningkatnya perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-1,01%	5,81% - 6,08%
	Menurunnya tingkat kesenjangan pendapatan	Indeks Gini	0,37	0,37
	Meningkatnya penduduk yang berada di atas garis kemiskinan	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	97,71	97,95
	Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi kreatif	Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif	n/a	8.161.320
	Meningkatnya Investasi	Persentase kenaikan investas	3,96	4,42
	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja		persentase produktifitas tenaga kerja per total output	78.148.225
Produktivitas sektor perdagangan dan jasa			79.198.803	83.782.610
Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	61,11	65
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	BB
		Nilai Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	3,4	3,6
		Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan daerah	WTP	WTP
		Indek Persepsi Korupsi	80,46 (2019)	81
		Indeks Profesionalitas ASN	52	75
		Indeks SPBE	3,21 (Baik)	Baik
		Indeks Kelembagaan	n/a	P-3
		Indeks Pelayanan Publik	n/a	3,87
		Indeks Rasa Aman	n/a	B (Aman)
Indeks Demokrasi	n/a	Sedang		

Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026

## 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

### 4.2.1. Penelaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2022, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yaitu " **Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural**", dengan 10 (sepuluh) Fokus Pembangunan, yaitu: (1) Industri, (2) Pariwisata, (3) Ketahanan Pangan, (4) UMKM, (5) Infrastruktur, (6) Transformasi Digital, (7) Pembangunan Rendah Karbon, (8) Reformasi Perlindungan Sosial, (9) Reformasi Pendidikan dan Keterampilan dan (10) Reformasi Kesehatan.

Sedangkan tema pembangunan RKP Tahun 2022 tersebut dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan nasional. Pada dokumen Rancangan RKP Tahun 2022, telah ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:

A. Prioritas Nasional Tahun 2022

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut, sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada tahun 2020 yaitu terjadinya pandemi COVID-19, maka pada tahun 2022 prioritas pembangunan nasional tahun 2022 ditekankan pada PN-1 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Risiko dari adanya pandemi COVID-19 yaitu terjadinya perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, serta perubahan dan pergeseran rencana, namun menjadi pemicu terjadinya optimalisasi pengembangan IPTEK.

#### 4.2.2. Penelaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2022

Dalam Rancangan Awal RKPD Provinsi disebutkan bahwa pembangunan daerah provinsi Banten tahun 2022 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target akhir pembangunan jangka menengah tahun 2017-2022, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 ditujukan untuk "**Pemantapan Daya Saing Daerah dan Sumber Daya Manusia**". Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2022 tersebut, ditetapkan 4 (empat) prioritas pembangunan daerah tahun 2022, meliputi: (1). Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (2). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (3). Peningkatkan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan (4). Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.

Prioritas pembangunan Provinsi Banten tahun 2022 tersebut dijabarkan dalam arah pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. **Pemantapan Tata kelola Pemerintahan**, diarahkan pada penguatan kelembagaan dan tatalaksana, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan dan peningkatan kapasitas sdm aparatur, tata kelola keuangan dan aset, penguatan penerapan SAKIP, peningkatan riset dan inovasi daerah, serta peningkatan kolaborasi antar level pemerintahan.
2. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia**, diarahkan pada pemenuhan layanan dasar dan perlindungan sosial, pengendalian penduduk dan peningkatan tata kelola kependudukan, pengentasan kemiskinan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan pemuda, pembudayaan olahraga, peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat, serta pelestarian kebudayaan daerah.
3. **Peningkatkan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan**, di arahkan pada: pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur ekonomi, pengembangan kawasan, peningkatan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana, peningkatan kolaborasi antar stakeholder pembangunan.
4. **Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**, di arahkan pengendalian inflasi daerah, pengembangan sektor unggulan, revitalisasi industri dan perdagangan, peningkatan investasi, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, pengembangan pariwisata, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, serta adopsi dan inovasi IPTEK.

#### 4.2.3. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD ini menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah. Rumusan usulan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut, dan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Tabel 4.2. Rumusan Usulan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD

No	Urusan	OPD Tujuan	Usulan	Permasalahan
1	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengadaan perlengkapan sarana Tk Pembina/ PAUD	Belum lengkapnya sarana Tk Pembina/ PAUD
			Renovasi Gedung/ruang kelas/ruang guru TK Pembina	Perlunya renovasi Gedung/ruang kelas/ruang guru TK Pembina
			Pemeliharaan / Perbaikan Ruang Guru/Kepala Sekolah Dasar (SD) /TU	Perlunya pemeliharaan / Perbaikan Ruang Guru/Kepala Sekolah Dasar (SD) /TU
			Pemeliharaan / Perbaikan sarana peribadatan/ mushala, toilet/ MCK, Ruang Gudang, penyediaan lapangan olah raga, ruang kantin SD	Perlunya pemeliharaan / Perbaikan sarana peribadatan/ mushala, toilet/ MCK, Ruang Gudang, penyediaan lapangan olah raga, ruang kantin SD
			Pemeliharaan / Perbaikan sarana peribadatan/ mushala, toilet/ MCK, Ruang Gudang, penyediaan lapangan olah raga, ruang kantin SMP	Perlunya pemeliharaan / Perbaikan sarana peribadatan/ mushala, toilet/ MCK, Ruang Gudang, penyediaan lapangan olah raga, ruang kantin SMP
			Pemeliharaan gedung/ruang kelas/Guru TK Pembina	Perlunya Pemeliharaan gedung/ruang kelas/Guru TK Pembina
			Pemeliharaan sarana dan prasarana TK Pembina	Perlunya Pemeliharaan sarana dan prasarana TK Pembina
2	Kesehatan	DINAS KESEHATAN	Peningkatan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), jumantik, dll	Belum optimalnya Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), jumantik, dll
			Pengadaan Sarana prasarana di Posyandu	belum optimalnya sarana prasarana di Posyandu
			Pengadaan Sarana promosi kesehatan	Belum optimalnya sarana promosi kesehatan
			Promosi kesehatan anak, remaja, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia	Belum optimalnya upaya-upaya promosi kesehatan anak, remaja, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia
			Pembangunan / pemeliharaan Posyandu	Perlunya pembangunan / pemeliharaan Posyandu
			Pemeliharaan Puskesmas	Perlunya pemeliharaan Puskesmas
			Pengadaan Tanaman Obat keluarga (TOGA)	Perlunya Pengadaan Tanaman Obat keluarga (TOGA)
3	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pengembangan ekonomi digital bagi UMKM	belum optimalnya pengembangan ekonomi digital bagi UMKM
			Pengembangan UMKM	Perkembangan UMKM Belum optimal
4	Pertanian	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Penyuluhan Pertanian	Diperlukannya Penyuluhan Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Perlunya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
5	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pembangunan biopori / sumur resapan	Diperlukannya biopori / sumur resapan
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (cth: Pelatihan Pengolahan Sampah, dll)	Perlunya Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (cth: Pelatihan Pengolahan Sampah, dll)

No	Urusan	OPD Tujuan	Usulan	Permasalahan
			Pengadaan Sarana pembangunan/ pemeliharaan/ penataan taman lingkungan	perlunya sarana pembangunan/ pemeliharaan/ penataan taman lingkungan
			Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	perlunya penyediaan sarana dan prasarana persampahan
6	Kepemudaan dan Olahraga	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Kelengkapan alat-alat olahraga masyarakat	Kurang lengkapnya alat-alat olahraga masyarakat
			Peningkatan keterampilan Pemuda untuk menjadi wirausahamuda mandiri.	Perlu adanya peningkatan keterampilan Pemuda untuk menjadi wirausahamuda mandiri.
			Peningkatan kapastitas pemuda dalam berorganisasi	Perlunya Peningkatan kapastitas pemuda dalam berorganisasi
7	Kecamatan	KECAMATAN SERPONG UTARA	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di kecamatan Serpong Utara	Perlunya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan di kecamatan Serpong Utara
		KECAMATAN PAMULANG	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di kecamatan Pamulang	Perlunya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan di kecamatan Pamulang
8	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Edukasi /sosialisasi masyarakat untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana	Perlu adanya edukasi /sosialisasi masyarakat untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana
9	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM	Pengerukan dan pembersihan sungai (normalisasi) dan sempadan	Perlu dilakukan pengerukan dan pembersihan sungai (normalisasi) dan sempadan
			Pembangunan/rehabilitasi drainase lingkungan	perlunya pembangunan/rehabilitasi drainase lingkungan
			Pembangunan/rehabilitasi turap untuk penanggulangan banjir dan longsor	perlunya pembangunan/rehabilitasi turap untuk penanggulangan banjir dan longsor
			Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan berkala/pemeliharaan rutin Jalan lingkungan	perlunya pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan berkala/pemeliharaan rutin Jalan lingkungan
			Pengadaan mesin pompa air untuk penanggulangan banjir	perlunya pengadaan mesin pompa air untuk penanggulangan banjir
			Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan berkala/pemeliharaan rutin Jembatan	perlunya pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan berkala/pemeliharaan rutin Jembatan
			Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan berkala/pemeliharaan rutin Turap Jalan	perlunya pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan berkala/pemeliharaan rutin Turap Jalan
10	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN	Penyediaan marka jalan	Perlu penyediaan marka jalan
			Penyediaan/pemeliharaan rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan lainnya (cth: cermin cembung)	Perlu penyediaan/pemeliharaan rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan lainnya (cth: cermin cembung)
			Penyediaan/perbaikan/pemeliharaan lampu penerangan jalan (PJU)	Perlu penyediaan/perbaikan/pemeliharaan lampu penerangan jalan (PJU)
11	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Perbaikan rumah/bedah rumah di lingkungan kumuh	Perlu perbaikan rumah/bedah rumah di lingkungan kumuh
			Perbaikan rumah/bedah rumah di lingkungan non kumuh	Perlu perbaikan rumah/bedah rumah di lingkungan non kumuh
			Perbaikan/pemulihan/rehabilitasi sarana pengelolaan sampah regional (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS)	Perlu perbaikan/pemulihan/rehabilitasi sarana pengelolaan sampah
			Pengadaan Sarana pemukiman	Perlunya sarana pemukiman (balai

No	Urusan	OPD Tujuan	Usulan	Permasalahan
			(balai warga, Gapura, Makam dan lainnya)	warga, Gapura, Makam dan lainnya)
12	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pelatihan Peningkatan SDM dan Sosialisasi Pemberdayaan LINMAS	Perlunya Pelatihan Peningkatan SDM dan Sosialisasi Pemberdayaan LINMAS
			Pembinaan dan penyuluhan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Perlunya Pembinaan dan penyuluhan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
14	Kelautan dan Perikanan	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	perlunya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
15	Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	Pembinaan Perpustakaan untuk Taman baca	Perlunya Pembinaan Perpustakaan untuk Taman baca
16	Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Pengadaan sarana jaringan internet gratis untuk masyarakat pada ruang terbuka umum	perlunya sarana jaringan internet gratis untuk masyarakat pada ruang terbuka umum

#### 4.2.4. Hasil Musrenbang

Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah melakukan Musrenbang Kelurahan dari pertengahan bulan Januari sampai dengan awal bulan Februari tahun 2021 dengan lingkup 54 (lima puluh empat) kelurahan, kemudian dilanjutkan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan pada bulan Februari dengan lingkup 7 (tujuh) kecamatan dan telah dilakukan Forum OPD dan dilanjutkan dengan Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Dari keseluruhan proses perencanaan tersebut telah menghasilkan usulan kegiatan prioritas sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.3. Rumusan Usulan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2021

No	Urusan	OPD Tujuan	Usulan	Permasalahan
1	Kecamatan	7 Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Perlunya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Perlunya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2	Kelautan dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	perlunya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Perlengkapan alat-alat olahraga masyarakat	kurang lengkapnya alat-alat olahraga masyarakat
			Peningkatan keterampilan Pemuda untuk menjadi wirausahamuda mandiri.	Perlu adanya peningkatan keterampilan Pemuda untuk menjadi wirausahamuda mandiri.
			Peningkatan kapasitas pemuda dalam berorganisasi	Perlunya Peningkatan kapasitas pemuda dalam berorganisasi
4	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sosialisasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Perlunya sosialisasi penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
5	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Peningkatan pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), jumantik, dll	Belum optimalnya Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), jumantik, dll

No	Urusan	OPD Tujuan	Usulan	Permasalahan
			Sarana prasarana di Posyandu	belum optimalnya sarana prasarana di Posyandu
			Sarana promosi kesehatan	Belum optimalnya sarana promosi kesehatan
			Promosi kesehatan anak, remaja, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia	Belum optimalnya upaya-upaya promosi kesehatan anak, remaja, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia
			Pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil	Masih belum optimalnya pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil
			Pembangunan / pemeliharaan Posyandu	Perlunya pembangunan / pemeliharaan Posyandu
			Pemeliharaan Puskesmas	Perlunya pemeliharaan Puskesmas
6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	Pengadaan Tanaman Obat keluarga (TOGA)	Perlunya Pengadaan Tanaman Obat keluarga (TOGA)
7	Ketertiban dan Ketentraman Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
			Pelatihan Peningkatan SDM dan Sosialisasi Pemberdayaan LINMAS	Perlunya Pelatihan Peningkatan SDM dan Sosialisasi Pemberdayaan LINMAS
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perlu adanya edukasi /sosialisasi masyarakat untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana	Perlu adanya edukasi /sosialisasi masyarakat untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana
6	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Sarana jaringan internet gratis untuk masyarakat pada ruang terbuka umum	perlunya sarana jaringan internet gratis untuk masyarakat pada ruang terbuka umum
			Peningkatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Pengembangan ekonomi digital bagi UMKM	belum optimalnya pengembangan ekonomi digital bagi UMKM
			Pengembangan lembaga koperasi	lembaga koperasi belum optimal
			Pengembangan UMKM	Perkembangan UMKM Belum optimal
			Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi	Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi belum optimal
7	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan biopori / sumur resapan	diperlukannya biopori / sumur resapan
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	perlunya Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (cth: Pelatihan Pengolahan Sampah, dll)
			Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	perlunya penyediaan sarana dan prasarana persampahan
			Penyediaan sarana pembangunan/ pemeliharaan/ penataan taman lingkungan	perlunya sarana pembangunan/ pemeliharaan/ penataan taman lingkungan

No	Urusan	OPD Tujuan	Usulan	Permasalahan
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum	Pengerukan dan pembersihan sungai (normalisasi) dan sempadan	perlu dilakukan pengerukan dan pembersihan sungai (normalisasi) dan sempadan
			Pembangunan/rehabilitasi drainase lingkungan	perlunya pembangunan/rehabilitasi drainase lingkungan
			Pembangunan/rehabilitasi turap untuk penanggulangan banjir dan longsor	perlunya pembangunan/rehabilitasi turap untuk penanggulangan banjir dan longsor
			Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan berkala/pemeliharaan rutin Jalan lingkungan	perlunya pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan berkala/pemeliharaan rutin Jalan lingkungan
			Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan berkala/pemeliharaan rutin Jembatan	perlunya pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan berkala/pemeliharaan rutin Jembatan
			Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan berkala/pemeliharaan rutin Turap Jalan	perlunya pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan berkala/pemeliharaan rutin Turap Jalan
			Pengadaan mesin pompa air untuk penanggulangan banjir	perlunya pengadaan mesin pompa air untuk penanggulangan banjir
			Penyediaan / pembangunan MCK Komunal	Perlunya penyediaan / pembangunan MCK Komunal
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Perlindungan terhadap perempuan dan anak	masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak
			Peningkatan keterampilan perempuan	Perlu adanya peningkatan keterampilan perempuan
9	Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pengadaan sarpras SD	belum lengkapnya sarana SD
			Pengadaan sarpras SMP	belum lengkapnya sarana SMP
			Pengadaan sarana Tk Pembina / PAUD	belum lengkapnya sarana Tk Pembina / PAUD
			Pemeliharaan / perbaikan ruang fasilitas kesehatan sekolah (UKS) SD	Perlunya pemeliharaan / perbaikan ruang fasilitas kesehatan sekolah (UKS) SD
			Pemeliharaan / Perbaikan Ruang Guru/Kepala Sekolah Dasar (SD) /TU	Perlunya pemeliharaan / Perbaikan Ruang Guru/Kepala Sekolah Dasar (SD) /TU
			Pemeliharaan / Perbaikan Ruang Guru/Kepala Sekolah Menengah Pertama(SMP) /TU	Perlunya pemeliharaan / Perbaikan Ruang Guru/Kepala Sekolah Menengah Pertama(SMP) /TU
			Pemeliharaan / perbaikan ruang Perpustakaan di Sekolah Dasar (SD)	Perlunya pemeliharaan / perbaikan ruang Perpustakaan di Sekolah Dasar (SD)
			Pemeliharaan / perbaikan ruang Perpustakaan di Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Perlunya pemeliharaan / perbaikan ruang Perpustakaan di Sekolah Menengah Pertama (SMP)
			Pemeliharaan / Perbaikan sarana peribadatan/	Perlunya pemeliharaan / Perbaikan sarana peribadatan/

No	Urusan	OPD Tujuan	Usulan	Permasalahan
			mushala, toilet/ MCK, Ruang Gudang, penyediaan lapangan olah raga, ruang kantin SD	mushala, toilet/ MCK, Ruang Gudang, penyediaan lapangan olah raga, ruang kantin SD
			Pemeliharaan / Perbaikan sarana peribadatan/ mushala, toilet/ MCK, Ruang Gudang, penyediaan lapangan olah raga, ruang kantin SMP	Perlunya pemeliharaan / Perbaikan sarana peribadatan/ mushala, toilet/ MCK, Ruang Gudang, penyediaan lapangan olah raga, ruang kantin SMP
			Pemeliharaan gedung/ruang kelas/Guru TK Pembina	Perlunya Pemeliharaan gedung/ruang kelas/Guru TK Pembina
			Pemeliharaan Ruang kelas SD	Perlunya pemeliharaan Ruang kelas SD
			Pemeliharaan Ruang kelas SMP	Perlunya pemeliharaan Ruang kelas SMP
			Peningkatan fasilitas kejar paket A, B dan C	perlunya peningkatan fasilitas kejar paket A, B dan C
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perlunya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Pembinaan bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia	perlunya pembinaan bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia
10	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Penyediaan/pemeliharaan rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan lainnya	Perlu penyediaan/pemeliharaan rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan lainnya (cth: cermin cembung)
			Penyediaan/perbaikan/pemeliharaan lampu penerangan jalan (PJU)	Perlu penyediaan/perbaikan/pemeliharaan lampu penerangan jalan (PJU)
			Penyediaan zona selamat sekolah	perlunya penyediaan zona selamat sekolah
11	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	Pembinaan Perpustakaan untuk Taman baca	Perlunya Pembinaan Perpustakaan untuk Taman baca
12	Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	Penyuluhan Pertanian	diperlukannya Penyuluhan Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Perlunya Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
13	Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perbaikan rumah/bedah rumah di lingkungan kumuh	perlu perbaikan rumah/bedah rumah di lingkungan kumuh
			Pembangunan sarana pemukiman (balai warga, Gapura, Makam dan lainnya)	perlunya sarana pemukiman (balai warga, Gapura, Makam dan lainnya)
14	Sosial	Dinas Sosial	Peningkatan data kemiskinan / data terpadu kesejahteraan sosial	masih rendahnya data kemiskinan / data terpadu kesejahteraan sosial
15	Tenaga Kerja	Dinas Ketenagakerjaan	Peningkatan keterampilan ketenagakerjaan	Perlunya peningkatan keterampilan ketenagakerjaan

#### 4.2.5. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Perumusan isu strategis tahun 2022 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2021, arah kebijakan dari RPJMD dan arah kebijakan RKP Provinsi Banten dan RKP serta memperhatikan dinamika isu strategis seperti fenomena Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah pandemi COVID-19 yang mengharuskan Pemerintah Kota Tangerang Selatan focus terhadap penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19, isu berikutnya adalah persoalan kemacetan dan persoalan sampah. Isu strategis pembangunan Kota Tangerang Selatan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4. Isu Strategis

No	Isu Strategis	Pengampu		Rencana Tindak	Keterkaitan Pihak Lain
		Urusan	OPD		
1	Kemacetan	Perhubungan	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen lalulintas termasuk ATCS.</li> <li>- Pengelolaan angkutan public perkotaan.</li> <li>- Pengendalian 40 titik Kemacetan.</li> <li>- Operasional Terminal Tipe C-BSD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provinsi Banten</li> <li>- BPTJ</li> </ul>
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelebaran Jl Rawabuntu</li> <li>- Pemeliharaan Jalan</li> <li>- Pemeliharaan Jembatan</li> </ul>	
			Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	Penetapan Peraturan Walikota tentang TOD (transit oriented development)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Perhubungan.</li> <li>- PT. KAI</li> <li>- Pengembang perumahan</li> </ul>
2	Sampah	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerjasama pengelolaan sampah ke TPSA Cilowong-Serang</li> <li>- Penyiapan PLTSa di Cipeucang</li> </ul>	Kota Serang.
3	Penanganan Banjir dan Longsor	Pekerjaan Umum dan PR Trantiblinmas	Dinas Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Normalisasi dan pemeliharaan tanggul sungai</li> <li>- Pembangunan dan pemeliharaan stasiun pompa banjir</li> <li>- Pembangunan dan pemeliharaan tandon.</li> <li>- Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan dan kota</li> <li>- Pembangunan dan Pemeliharaan Sistem Drainase Kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembang perumahan.</li> <li>- Kab. /Kota yang berbatasan.</li> <li>- Provinsi Banten</li> </ul>
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana banjir dan longsor termasuk penyediaan EWS.	
			Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan rumah bagi korban bencana.</li> <li>- Perbaikan Kawasan kumuh.</li> </ul>	
			Dinas Bangunan dan	Koordinasi dan Sinkronisasi	

No	Isu Strategis	Pengampu		Rencana Tindak	Keterkaitan Pihak Lain
		Urusan	OPD		
			PR	Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	
4	Penanggulangan COVID-19	Kesehatan	Dinas Kesehatan	- Upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. - Melakukan edukasi masyarakat door to door oleh Tenaga Kesehatan - Menyediakan fasilitas Kesehatan, pusat Karantina, dan vaksinasi masal	
		Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	- Pemakaman khusus pasien COVID-19	
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelaksanaan dan penegakan PPKM	
			BPBD	Koordinator Satgas COVID-19	Kab. /Kota yang berbatasan
		Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyebarluasan informasi	
		Perhubungan	Dinas Perhubungan	Pelaksanaan PPKM	
		Lintas Urusan	Lintas Perangkat Daerah	Menegakan Prokes.	
5	Pemulihan Ekonomi Daerah	Pemerintahan Umum	Kecamatan	Melaksanakan program Padat Karya	
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
		Perumahan dan Permukiman	Dinas Perumahan dan Permukiman		
		Keuangan	Badan Pendapatan Daerah	Relaksasi Pajak	
		Pariwisata	Dinas Pariwisata	Pengetatan prokes semua tempat hiburan dan wisata.	
		Kesehatan	Dinas Kesehatan	Memperluas cakupan UHC	
		Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM	Pemberian bantuan permodalan UMKM	
		Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	Pertanian perkotaan (Urban Farming)	
6	Jaring Pengaman Sosial	Sosial	Dinas Sosial	Pemberian Bantuan Sosial	

#### 4.2.6. Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 merujuk pada arah kebijakan Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026, sebagaimana dituangkan dalam diagram berikut.



Dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, berbagai permasalahan dan isu strategis serta kebijakan pembangunan provinsi dan nasional, maka kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 ditujukan untuk **“Percepatan Implementasi Tangsel Unggul, Kreatif, Inovatif, Layak huni dan Saling Terkoneksi”**. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2022 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2022, meliputi:

1. Sumber daya manusia unggul
2. Pemulihan perekonomian daerah
3. Peningkatan kualitas lingkungan
4. Konektivitas infrastruktur
5. Birokrasi yang efektif dan efisien

Prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan tahun 2022 tersebut dijabarkan dalam arah pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerataan akses masyarakat mendapatkan pendidikan dan kesehatan, diarahkan pada :
  - a. peningkatan kualitas layanan dan akses pendidikan
  - b. peningkatan derajat kesehatan masyarakat
  - c. peningkatan kesejahteraan keluarga
  - d. peningkatan daya saing pemuda
  - e. peningkatan kualitas pembangunan berbasis gender
2. Pengembangan sistem jaringan transportasi publik masal perkotaan, diarahkan pada peningkatan kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan.
3. Optimalisasi pemanfaatan dan fungsi, sarana, prasarana, ruang publik perkotaan, diarahkan pada :
  - a. peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan
  - b. peningkatan pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam
4. Peningkatan daya beli masyarakat melalui konsep pemberdayaan masyarakat, koperasi dan program padat karya, diarahkan pada:
  - a. Peningkatan perekonomian daerah
  - b. peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif dan
  - c. peningkatan Investasi
5. Efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan dan penguatan kualitas pelayanan publik, diarahkan pada :

- a. peningkatan produktifitas tenaga kerja
- b. penurunan tingkat kesenjangan pendapatan
- c. peningkatan penduduk yang berada di atas garis kemiskinan

Prioritas dan arah pembangunan Kota Tangerang Selatan tahun 2022 juga sejalan dengan kebijakan pembangunan jangka menengah yang terdapat dalam Ranwal RPJMD 2021-2026, mendukung prioritas pembangunan Provinsi Banten dan Nasional tahun 2022 yang dijabarkan sebagaimana Tabel 4.5 dan Gambar 4.2 berikut.

Tabel 4.5. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah/Fokus Daerah dengan Prioritas Provinsi dan Nasional

No	Prioritas Daerah/ Arah Pembangunan Tahunan	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi
1.	SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia</li> </ul>
2.	PEMULIHAN PEREKONOMIAN DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertumbuhan Ekonomi Inklusif</li> </ul>
3.	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan</li> </ul>
4.	KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</li> <li>Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</li> </ul>	
5.	BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.</li> <li>Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemantapan Tata kelola Pemerintahan</li> </ul>

Gambar 4.2. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah/Fokus Daerah dengan Prioritas Provinsi dan Nasional

<b>Prioritas Nasional</b>	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
<b>Prioritas Provinsi</b>	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Peningkatan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan			Pemantapan Tata kelola Pemerintahan	
<b>Prioritas Tangel</b>	SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL	PEMULIHAN PEREKONOMIAN DAERAH	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN	KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR		BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	

### 4.3. Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi

Prioritas Kota Tangerang Selatan diharapkan mendukung serta sinkron terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan sinkronisasi tersebut dapat terlihat apabila adanya urusan dan program yang terdapat dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan tahun 2021-2026 yang tertuang serta menjadi urusan dan program yang akan dilaksanakan pada RKPd tahun 2022. Berikut adalah program yang menjadi prioritas dalam RKPd Tahun 2022 yang tersinkron terhadap Prioritas Pembangunan nasional dan provinsi.

Tabel 4.6. Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Tahun 2022

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	PRIORITAS PROVINSI TAHUN 2022	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022			
		PRIORITAS	SASARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM
• Meningkatkan	Peningkatan	SUMBER DAYA	Meningkatnya	Pendidikan	• Pengelolaan

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	PRIORITAS PROVINSI TAHUN 2022	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022			
		PRIORITAS	SASARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM
sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;	Kualitas Sumber Daya Manusia	MANUSIA UNGGUL	kualitas layanan dan akses pendidikan		Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> </ul>
				Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Kebudayaan</li> <li>• Program Pengembangan Kesenian Tradisional</li> <li>• Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</li> </ul>
				Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pembinaan Perpustakaan</li> </ul>
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</li> <li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> </ul>
				Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian</li> <li>• Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</li> <li>• Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</li> <li>• Program penyuluhan pertanian</li> </ul>
			Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan</li> <li>• Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat</li> <li>• Program penanganan kerawanan pangan</li> <li>• Program pengawasan keamanan pangan</li> </ul>
				Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengendalian penduduk</li> <li>• Program pembinaan keluarga berencana (KB)</li> <li>• Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)</li> </ul>
				Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pemberdayaan sosial</li> <li>• Program rehabilitasi sosial</li> <li>• Program perlindungan dan jaminan sosial</li> <li>• Program penanganan bencana</li> <li>• Program pengelolaan taman makam</li> </ul>

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	PRIORITAS PROVINSI TAHUN 2022	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022			
		PRIORITAS	SASARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM
					pahlawan
			Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan</li> <li>Program perlindungan perempuan</li> <li>Program peningkatan kualitas keluarga</li> <li>Program pengelolaan sistem data gender dan anak</li> <li>Program pemenuhan hak anak (pha)</li> <li>Program perlindungan khusus anak</li> </ul>
			Meningkatkan daya saing pemuda	Kepemudaan Dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li> <li>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</li> <li>Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</li> <li>Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan</li> </ul>		KONEKTIVITAS INFRASTRUKTUR	Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li> </ul>
				Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pengelolaan sumber daya air (sda)</li> <li>Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum</li> <li>Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</li> <li>Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</li> <li>Program penataan bangunan gedung</li> <li>Program penataan bangunan dan lingkungannya</li> <li>Program penyelenggaraan jalan</li> <li>Program pengembangan jasa konstruksi</li> <li>Program penyelenggaraan penataan ruang</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim</li> </ul>	Peningkatan daya saing daerah dan pemerataan pembangunan	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program perencanaan lingkungan hidup</li> <li>Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</li> <li>Program pengelolaan keanekaragaman</li> </ul>

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	PRIORITAS PROVINSI TAHUN 2022	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022			
		PRIORITAS	SASARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM
					hayati (KEHATI) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah berbahaya dan beracun (limbah B3)</li> <li>• Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)</li> <li>• Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</li> <li>• Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</li> <li>• Program penanganan pengaduan lingkungan hidup</li> <li>• Program pengelolaan persampahan</li> </ul>
				Perumahan Dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengembangan perumahan</li> <li>• Program kawasan permukiman</li> <li>• Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh</li> <li>• Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)</li> </ul>
				Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penatagunaan Tanah</li> </ul>
				Kelautan Dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengelolaan perikanan budidaya</li> <li>• Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</li> </ul>
				Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pemberdayaan sosial</li> <li>• Program rehabilitasi sosial</li> <li>• Program perlindungan dan jaminan sosial</li> <li>• Program penanganan bencana</li> <li>• Program pengelolaan taman makam pahlawan</li> </ul>
			Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum</li> <li>• Program penanggulangan bencana</li> <li>• Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan</li> </ul>	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	PEMULIHAN PEREKONOMIAN DAERAH	Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi kreatif	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pemasaran pariwisata</li> <li>• Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</li> </ul>

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	PRIORITAS PROVINSI TAHUN 2022	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022			
		PRIORITAS	SASARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM
berkeadilan					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</li> <li>• Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif</li> </ul>
				Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> </ul>
				Kelautan Dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengelolaan perikanan budidaya</li> <li>• Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</li> </ul>
				Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pelayanan izin usaha simpan pinjam</li> <li>• Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)</li> <li>• Program pengawasan dan pemeriksaan</li> <li>• Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi</li> <li>• Program pendidikan dan latihan</li> <li>• Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi</li> <li>• Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi</li> </ul>
			Meningkatnya Investasi	Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pengembangan iklim penanaman modal</li> <li>• Program promosi penanaman modal</li> <li>• Program pelayanan penanaman modal</li> <li>• Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal</li> <li>• Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal</li> </ul>
				Kelautan Dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> </ul>
				Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program perencanaan dan pembangunan industri</li> <li>• Program perencanaan dan pembangunan industri</li> <li>• Program pengelolaan sistem informasi industri nasional</li> </ul>
				Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program perizinan dan pendaftaran perusahaan</li> <li>• Program peningkatan sarana distribusi perdagangan</li> <li>• Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</li> </ul>

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	PRIORITAS PROVINSI TAHUN 2022	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022			
		PRIORITAS	SASARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pengembangan ekspor</li> <li>Program standarisasi dan perlindungan konsumen</li> <li>Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</li> </ul>
			Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>Program penempatan tenaga kerja</li> <li>Program hubungan industrial</li> </ul>
				Kelautan Dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> </ul>
				Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Penyuluhan Pertanian</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.</li> <li>Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan</li> </ul>	Pemantapan Tata kelola Pemerintahan	BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Komunikasi Dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik</li> <li>Program pengelolaan aplikasi informatika</li> </ul>
				Persandian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</li> </ul>
				Statistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Penyelenggaraan Statistik Sektor</li> </ul>
				Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pendaftaran penduduk</li> <li>Program pencatatan sipil</li> <li>Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan</li> <li>Program pengelolaan profil kependudukan</li> </ul>
				Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum</li> <li>Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum</li> </ul>
				Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program pengelolaan keuangan daerah</li> <li>Program pengelolaan barang milik daerah</li> <li>Program pengelolaan pendapatan daerah</li> </ul>
				Inspektorat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program penyelenggaraan pengawasan</li> <li>Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi</li> </ul>
				Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Kepegawaian Daerah</li> </ul>
				Pendidikan Dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> </ul>
				Sekretaris Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program administrasi umum</li> <li>Program</li> </ul>

PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022	PRIORITAS PROVINSI TAHUN 2022	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2022			
		PRIORITAS	SASARAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM
					pemerintahan dan kesejahteraan rakyat • Program perekonomian dan pembangunan
				Sekretariat DPRD	• Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
				Perencanaan	• Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah • Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
				Penelitian Dan Pengembangan	• Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
				Kearsipan	• Program Pengelolaan Arsip
				Kesatuan Bangsa Dan Politik	• Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan • Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik • Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan • Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya • Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

## BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

### 5.1. Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Tahun 2022

Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan yang telah dibahas pada Bab IV, dengan merujuk pada hasil evaluasi tahun sebelumnya, maka disusun Rencana Kerja tahun 2022 serta pagu indikatifnya.

Pagu indikatif tahun 2022 setiap Perangkat Daerah didapatkan dari hasil penjumlahan antara model perencanaan dari urutan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, Forum Konsultasi Publik dan disempurnakan pada saat Musrenbang Kota Tangerang Selatan yang dilakukan pada bulan Maret 2021 ditambahkan dengan model perencanaan *Top Down* (kebijakan kepala daerah terhadap perencanaan kota Tangerang Selatan), maka didapatkan hasil pagu indikatif dan rekapitulasi program dan kegiatan RKPD seperti tersaji pada Tabel 5.1, 5.2 dan 5.3 berikut:

Tabel 5.1. Rekapitulasi Pagu Belanja Daerah Tahun 2022

Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	4	14	108	454.415.100.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	21	101	580.275.450.000	Dinas Kesehatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5	13	68	338.847.450.000	Dinas Pekerjaan Umum
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6	13	38	266.015.400.000	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5	15	50	84.255.700.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2	11	48	18.326.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2	11	36	18.474.000.000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2	10	43	24.164.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	15	74	15.801.116.485	Dinas Sosial
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	5	19	50	13.736.000.000	Dinas Ketenagakerjaan
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7	19	46	16.910.747.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	5	13	45	13.072.056.125	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1	1	1	100.000.000	Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	10	17	44	174.108.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4	11	28	14.081.950.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3	7	22	1.208.703.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga

Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Pagu	Perangkat Daerah
					Berencana
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	18	53	83.508.000.000	Dinas Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3	9	39	45.406.431.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	8	14	41	19.712.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	13	44	26.095.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	4	17	83	27.876.600.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	3	374.516.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	3	311.153.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	3	4	8	1.700.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2	10	42	15.738.450.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	3	5	7	885.000.000	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	2	6	12	917.093.875	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	5	16	72	13.758.950.000	Dinas Pariwisata
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	4	9	14	936.850.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	6	11	25	1.417.717.206	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	4	11	33	11.957.282.794	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Sekretariat Daerah	3	18	71	125.661.000.000	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD	2	18	78	116.323.000.000	Sekretariat DPRD
Perencanaan	3	13	58	22.657.995.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Keuangan	3	13	67	45.614.383.515	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Keuangan	2	7	41	52.192.557.741	Badan Pendapatan Daerah
Kepegawaian	2	11	39	39.767.905.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
Pendidikan Dan Pelatihan	1	2	2	2.212.745.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
Penelitian Dan Pengembangan	1	4	10	904.855.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Inspektorat Daerah	3	11	36	25.094.550.000	Inspektorat
Kecamatan	4	11	29	28.532.000.000	Kecamatan Ciputat
Kecamatan	5	13	31	25.471.000.000	Kecamatan Ciputat Timur
Kecamatan	6	12	28	33.143.000.000	Kecamatan Pamulang
Kecamatan	5	16	44	34.372.000.000	Kecamatan Serpong
Kecamatan	5	15	35	27.344.000.000	Kecamatan Serpong Utara
Kecamatan	5	15	43	41.036.000.000	Kecamatan Pondok Aren
Kecamatan	5	15	43	25.301.000.000	Kecamatan Setu
Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	12	52	16.673.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
<b>JUMLAH</b>	<b>187</b>	<b>561</b>	<b>1.988</b>	<b>2.946.687.707.741</b>	

Tabel 5.2. Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022

Usuran/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.799.868.928.685	
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	453.709.812.200	
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	281.242.755.720	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	271.241.261.548	
1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.452.000.000	
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.300.000.000	
1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.499.494.172	
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.750.000.000	
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	90.904.950.480	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	48.710.607.260	
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	33.428.735.250	
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.815.607.970	
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	950.000.000	
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	81.562.106.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	81.562.106.000	
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	580.275.450.000	
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	404.845.878.308	Dinas Kesehatan
1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	383.019.400	
1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	167.320.320.451	
1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	122.270.000	
1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	798.040.800	
1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.643.412.098	
1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.400.000.000	
1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.766.573.341	

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.029.956.218	
1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	130.382.286.000	
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	131.522.499.692	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	68.586.648.965	
1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.960.837.803	
1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	802.930.000	
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.172.082.924	
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	37.424.030.000	
1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	19.715.755.000	
1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.708.275.000	
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	147.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	47.000.000	
1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	80.000.000	
1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	20.000.000	
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	6.336.042.000	Dinas Kesehatan
1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.670.000	
1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.723.000	
1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.271.649.000	
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	604.862.850.000	
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.608.517.534	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.192.335.000	
1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.951.208.454	
1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	831.340.300	
1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.654.474.478	
1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.700.000	

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.160.633.302	
1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.776.826.000	
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	50.987.250.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.987.250.000	
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.100.000.000	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	4.100.000.000	
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.950.000.000	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.950.000.000	
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	130.312.500.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	130.312.500.000	
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	222.435.400.000	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	222.435.400.000	
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100.000.000	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	119.319.937.271	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	119.319.937.271	
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.895.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	700.000.000	
1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	645.000.000	
1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	550.000.000	
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	7.154.245.195	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2.000.000.000	
1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	
1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	3.404.245.195	
1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	84.255.700.000	
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.591.700.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	800.000.000	
1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.204.550.000	
1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.620.000.000	
1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000.000	
1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.139.150.000	
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.578.000.000	
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.759.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	250.000.000	
1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	2.309.000.000	
1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.600.000.000	
1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	600.000.000	
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	17.870.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	870.000.000	
1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	17.000.000.000	
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	11.500.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	11.500.000.000	
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	31.535.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	31.535.000.000	
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	60.964.000.000	
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	42.839.115.000	Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	879.000.000	
1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.183.495.652	
1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	644.700.000	
1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.008.436.488	
1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.547.360.000	
1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.937.802.860	
1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.638.320.000	
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.045.505.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.733.225.000	
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	267.280.000	
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	45.000.000	
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	6.176.000.000	Badan Penanggulangan Bencana
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.000.000.000	
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.500.000.000	
1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.576.000.000	
1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.100.000.000	
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	9.903.380.000	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.713.380.000	
1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	90.000.000	
1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100.000.000	
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15.801.116.485	
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.966.116.485	Dinas Sosial
1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	300.000.000	
1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.521.143.702	
1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	180.000.000	
1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	954.849.063	

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	208.000.000	
1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.861.293.720	
1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	940.830.000	
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	610.000.000	Dinas Sosial
1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	610.000.000	
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	900.000.000	Dinas Sosial
1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	625.000.000	
1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	275.000.000	
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	725.000.000	Dinas Sosial
1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	125.000.000	
1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	350.000.000	Dinas Sosial
1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	200.000.000	
1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	150.000.000	
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	250.000.000	Dinas Sosial
1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	250.000.000	
<b>2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>454.824.606.125</b>	
<b>2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>	<b>13.736.000.000</b>	
2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.216.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	
2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.862.573.324	
2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	640.000.000	
2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.374.988.000	
2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188.438.676	
2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	60.000.000	

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.380.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.000.000.000	
2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80.000.000	
2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	80.000.000	
2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	100.000.000	
2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	820.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000	
2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	110.000.000	
2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	270.000.000	
2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
2.07.04.2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.260.000.000	
2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	550.000.000	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	710.000.000	
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.910.747.000	
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.820.873.950	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	264.753.000	
2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.591.589.650	
2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	676.975.840	
2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	228.100.000	
2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.044.561.960	
2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.014.893.500	
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	557.089.050	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
		Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	92.784.000	
2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	464.305.050	
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	752.885.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	502.885.000	
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	250.000.000	
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	834.930.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	730.000.000	
2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	104.930.000	
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	70.550.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.550.000	
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	460.994.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	106.895.000	
2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	354.099.000	
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	413.425.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
		Anak Dan Keluarga Berencana
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	43.791.000	
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	
2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.634.000	
<b>2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	<b>13.072.056.125</b>	
<b>2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.073.786.125</b>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	232.000.000	
2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.935.199.925	
2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.000.000	
2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000	
2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.278.586.200	
2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	598.000.000	
<b>2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>50.000.000</b>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	
<b>2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>625.510.000</b>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	110.000.000	
2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	266.710.000	
2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	248.800.000	
<b>2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>172.760.000</b>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	15.000.000	
2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.760.000	
<b>2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>150.000.000</b>	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
<b>2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	<b>100.000.000</b>	

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	100.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	174.108.000.000	
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.651.768.064	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	465.000.000	
2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.095.626.844	
2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	78.665.300	
2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	
2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	922.070.000	
2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.848.067.920	
2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.202.338.000	
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	700.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	250.000.000	
2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	450.000.000	
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.961.050.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.961.050.000	
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	16.841.856.277	
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	16.841.856.277	
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	650.000.000	
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	390.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	390.000.000	
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	400.000.000	
2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	550.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	550.000.000	
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	450.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	450.000.000	
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	130.513.325.659	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	130.513.325.659	
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.081.950.000	
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.651.950.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000	
2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.124.630.000	
2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	375.000.000	
2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.807.840.000	
2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.480.000	
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	430.000.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	430.000.000	
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.208.703.000	
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	365.800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.14.02.2.01 Pemasukan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	86.155.000	
2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	279.645.000	
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	584.691.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	84.831.000	
2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	25.150.000	

Usuran/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	285.610.000	
2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	189.100.000	
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	258.212.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	258.212.000	
<b>2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<b>83.508.000.000</b>	
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.996.190.000	Dinas Perhubungan
2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000	
2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.916.867.403	
2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.000.000	
2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200.000.000	
2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	270.000.000	
2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	250.000.000	
2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.801.305.000	
2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.258.017.597	
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	55.511.810.000	Dinas Perhubungan
2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	250.000.000	
2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	47.092.750.000	
2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	550.000.000	
2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	670.000.000	
2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.400.600.000	
2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.780.360.000	
2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	200.000.000	
2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	325.000.000	
2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	768.100.000	

Usuran/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	475.000.000	
<b>2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>45.406.431.000</b>	
<b>2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>12.821.032.000</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	190.294.000	
2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.954.399.000	
2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	58.960.000	
2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.538.757.000	
2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.522.616.000	
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	556.006.000	
<b>2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>6.718.361.000</b>	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.718.361.000	
<b>2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>25.867.038.000</b>	
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.193.750.000	
2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.673.288.000	
<b>2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	<b>19.712.000.000</b>	
<b>2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>13.482.114.000</b>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	
2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.690.414.000	
2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.317.950.180	
2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.000.000	
2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.438.277.000	
2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	526.472.820	
<b>2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	<b>300.000.000</b>	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	300.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	300.000.000	
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	750.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	750.000.000	
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	500.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.547.086.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.547.086.000	
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.382.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.382.000.000	
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.450.800.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.450.800.000	
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	26.095.000.000	
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.705.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	
2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.670.467.000	
2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000	
2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.179.299.295	
2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	116.130.000	
2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.657.361.480	
2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	931.742.225	
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	190.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000	

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	300.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	600.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	600.000.000	
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	150.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	150.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
<b>2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>27.876.600.000</b>	
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.488.323.862	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	276.910.000	
2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.361.733.402	
2.19.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	24.400.000	
2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	385.805.000	
2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18.250.000	
2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.955.121.460	
2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	466.104.000	
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	4.568.000.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	3.828.000.000	
2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	740.000.000	
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	10.955.276.138	Dinas Pemuda Dan Olahraga

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.046.000.000	
2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.982.000.000	
2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1.147.500.000	
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	255.000.000	
2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	5.524.776.138	
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	865.000.000	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	865.000.000	
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	374.516.000	
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	374.516.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	374.516.000	
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	311.153.000	
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	311.153.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	311.153.000	
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.700.000.000	
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100.000.000	
2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	300.000.000	
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	15.738.450.000	
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.730.508.580	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.839.000	
2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.643.381.680	

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.000.000	
2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.000.000	
2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	387.303.900	
2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.600.000	
2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.592.314.000	
2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	844.070.000	
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.007.941.420	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.184.941.420	
2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	823.000.000	
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	885.000.000	
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	846.012.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	50.153.300	
2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	312.400.700	
2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	483.458.000	
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	3.988.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	3.988.000	
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	35.000.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	35.000.000	
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	28.987.893.875	
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	917.093.875	
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	800.093.875	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	580.000.000	
3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.500.000	
3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	187.593.875	
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	117.000.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	42.000.000	
3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	75.000.000	
<b>3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>	<b>13.758.950.000</b>	
<b>3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.949.091.000</b>	Dinas Pariwisata
3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	410.140.000	
3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.716.059.811	
3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	115.940.000	
3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.341.984.000	
3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.844.888.189	
3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	520.079.000	
<b>3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>1.459.859.000</b>	Dinas Pariwisata
3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	600.000.000	
3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000	
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	350.000.000	
3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	409.859.000	
<b>3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>350.000.000</b>	Dinas Pariwisata
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	350.000.000	
<b>3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>275.000.000</b>	Dinas Pariwisata
3.26.04.2.01 Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	
3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	125.000.000	
<b>3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>725.000.000</b>	Dinas Pariwisata
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	475.000.000	
3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	250.000.000	
<b>3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>	<b>936.850.000</b>	
<b>3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>261.650.000</b>	Dinas Pariwisata
3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	228.050.000	

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	33.600.000	
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	150.000.000	Dinas Pariwisata
3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian	150.000.000	
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	370.000.000	Dinas Pariwisata
3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	
3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	270.000.000	
3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	40.000.000	
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	155.200.000	Dinas Pariwisata
3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	155.200.000	
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.417.717.206	
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	39.412.780	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	5.499.400	
3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	9.831.960	
3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	24.081.420	
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	951.759.200	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	153.267.100	
3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	798.492.100	
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	131.553.460	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	53.933.800	
3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	64.238.510	
3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.381.150	
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	163.723.816	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	163.723.816	
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	82.619.650	Dinas Perindustrian Dan

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
		Perdagangan
3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	82.619.650	
3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	48.648.300	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	48.648.300	
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	11.957.282.794	
3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.802.565.204	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.875.538	
3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.238.614.740	
3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.425.000	
3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.704.780	
3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.168.346	
3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.790.000	
3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.076.700.000	
3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.286.800	
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	116.255.890	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	116.255.890	
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	16.020.800	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	16.020.800	
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	22.440.900	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	22.440.900	
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	241.984.000.000	
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	125.661.000.000	
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.311.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	362.500.000	
4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.732.317.310	

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.783.721	
4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.770.500.000	
4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.450.000.000	
4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.586.990.610	
4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.500.000.000	
4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.006.441.359	
4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	17.275.500.000	
4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	2.429.967.000	
4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.135.000.000	
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	9.350.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	1.342.612.500	
4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.850.000.000	
4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	3.750.000.000	
4.01.02.2.04 Fasilitas Kerjasama Daerah	407.387.500	
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.000.000.000	Sekretariat Daerah
4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.400.000.000	
4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.500.000.000	
4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.100.000.000	
4.02 SEKRETARIAT DPRD	116.323.000.000	
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	72.211.240.000	Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	340.000.000	
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.577.000.000	
4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.000.000	
4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.091.000	
4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.418.000.000	
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196.000.000	
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.640.923.000	

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.090.226.000	
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	43.410.000.000	
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	1.350.000.000	
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	44.111.760.000	Sekretariat DPRD
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.350.000.000	
4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	763.000.000	
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	442.000.000	
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	4.603.000.000	
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5.152.760.000	
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	131.000.000	
4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	300.000.000	
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	30.370.000.000	
<b>5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>163.350.441.256</b>	
<b>5.01 PERENCANAAN</b>	<b>22.657.995.000</b>	
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.998.559.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	400.000.000	
5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.110.639.408	
5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.826.000	
5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.904.540.572	
5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.000.000	
5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.917.253.020	
5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.011.300.000	
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.584.547.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	910.490.628	
5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	248.686.199	
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	425.370.173	

Usuran/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.074.889.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	801.144.000	
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	294.500.000	
5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	979.245.000	
5.02 KEUANGAN	97.806.941.256	
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	63.972.590.832	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	270.092.250	
5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	51.125.966.073	
5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.699.400	
5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110.649.000	
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.791.400.999	
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.438.250	
5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.605.114.860	
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.955.230.000	
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	26.016.395.425	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.457.500.000	
5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	611.271.210	
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.134.740.700	
5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	22.812.883.515	
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.817.955.000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.817.955.000	
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.999.999.999	Badan Pendapatan Dareah
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4.999.999.999	
5.03 KEPEGAWAIAN	39.767.905.000	
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.447.905.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	110.000.000	
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.386.212.328	
5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.000.000	
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.455.036	
5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.116.647.636	
5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	498.590.000	
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.320.000.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.120.000.000	
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	780.000.000	
5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	330.000.000	
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	90.000.000	
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.212.745.000	
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.212.745.000	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	450.000.000	
5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.762.745.000	
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	904.855.000	
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	904.855.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	231.000.000	
5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	150.000.000	
5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	150.000.000	
5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	373.855.000	
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	25.094.550.000	
6.01 INSPEKTORAT DAERAH	25.094.550.000	
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.072.407.300	Inspektorat
6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	219.163.800	
6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.034.316.000	

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.427.000	
6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	234.312.800	
6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.344.187.700	
6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.191.200.000	
6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.038.800.000	
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.943.794.700	Inspektorat
6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.622.306.000	
6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	321.488.700	
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	78.348.000	Inspektorat
6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	15.013.000	
6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	63.335.000	
<b>7 UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>215.199.000.000</b>	
<b>7.01 KECAMATAN</b>	<b>215.199.000.000</b>	
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	142.954.702.924	Kecamatan
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.109.000.000	
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80.274.457.197	
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	31.045.513	
7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	218.000.000	
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.429.100.000	
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	805.000.000	
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.738.100.214	
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.350.000.000	
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.785.153.600	Kecamatan
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	240.000.000	
7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	16.975.330.400	
7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	127.000.000	
7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	13.442.823.200	Kecamatan

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	40.044.999.999	
7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	37.799.999.999	
7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.245.000.000	
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	995.000.000	Kecamatan
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	565.000.000	
7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	280.000.000	
7.01.04.2.03 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	150.000.000	
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	360.000.000	Kecamatan
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	360.000.000	
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	59.143.477	Kecamatan
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	59.143.477	
<b>8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>16.673.000.000</b>	
<b>8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>16.673.000.000</b>	
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.934.917.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	291.109.000	
8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.798.505.136	
8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	164.630.000	
8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.025.171.000	
8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	445.901.200	
8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.672.303.064	
8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	537.297.600	
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	490.971.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	490.971.000	
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	2.822.112.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.822.112.000	

Urusan/Program/Kegiatan	Jumlah pagu anggaran (Rp)	Perangkat Daerah untuk masing-masing Program
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	450.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	450.000.000	
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	900.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	900.000.000	
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.075.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.075.000.000	
<b>Jumlah</b>	<b>2.946.687.707.741</b>	

Tabel 5.3. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022

No	Isu Strategis	Urusan	Rencana Tindak	Keterkaitan Pihak Lain	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif	OPD
1	Kemacetan	Perhubungan	- Manajemen lalu lintas termasuk ATCS.	- Provinsi Banten - BPTJ	PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.730.360.000	Dinas Perhubungan
			- Pengelolaan angkutan public perkotaan	-		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	325.000.000	
			- Pengendalian 40 titik Kemacetan.			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	56.029.517.597	
			- Operasional Terminal Tipe C-BSD			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	550.000.000	
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Pelebaran Jl Rawabuntu - Pemeliharaan Jalan - Pemeliharaan Jembatan		PENYELENGGAR AAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	192.842.749.600	Dinas Pekerjaan Umum
			Penetapan Peraturan Walikota tentang TOD (transit oriented development)	- Kementerian Perhubungan. - PT. KAI Pengembang perumahan	PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
2	Sampah	Lingkungan Hidup	- Kerjasama pengelolaan sampah ke TPSA Cilowong-Serang - Penyiapan PLTSa di Cipeucang -	Kota Serang.	PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	147.668.701.659	Dinas Lingkungan Hidup

No	Isu Strategis	Urusan	Rencana Tindak	Keterkaitan Pihak Lain	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif	OPD
3	Penanganan Banjir dan Longsor	Pekerjaan Umum dan PR Trantiblinmas	- Normalisasi dan pemeliharaan tanggul sungai	- Pengembang perumahan.	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	46.260.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			- Pembangunan dan pemeliharaan stasiun pompa banjir	- Kab. /Kota yang berbatasan.				
			- Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan dan kota		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	124.300.000.000	
			Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana banjir dan longsor termasuk penyediaan EWS.		PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5.500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			- Penyediaan rumah bagi korban bencana.		PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3.809.000.000	Dinas Perkimta
			- Perbaikan Kawasan kumuh.		KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	25.500.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000	Dinas Bangunan dan PR

No	Isu Strategis	Urusan	Rencana Tindak	Keterkaitan Pihak Lain	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif	OPD
4	Penanggulangan COVID-19	Kesehatan	- Pencegahan : Melakukan edukasi masyarakat door to door oleh Tenaga Kesehatan		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.723.000	Dinas Kesehatan
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.271.649.000		
			- Penanganan: Menyediakan fasilitas Kesehatan, pusat Karantina, dan vaksinasi masal		PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	30.396.026.192	
		Perumahan dan Permukiman	- Penanganan: Pemukiman khusus pasien COVID-19		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Penyelenggaraan PSU Perumahan	31.535.000.000	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pelaksanaan dan penegakan PPKM		PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	267.280.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			Koordinator Satgas COVID-19	Kab. /Kota yang berbatasan	PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.500.000.000	BPBD
		Komunikasi dan Informatika	Penyebarluasan informasi		INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.718.361.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Perhubungan	Pelaksanaan PPKM		PENYELENGGAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.780.360.000	Dinas Perhubungan
		Lintas urusan	Menegakan Prokes.		Lintas program			Lintas Perangkat Daerah
	Pemulihan Ekonomi	Pemerintahan Umum	Melaksanakan program Padat Karya		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	37.799.999.999	Kecamatan

No	Isu Strategis	Urusan	Rencana Tindak	Keterkaitan Pihak Lain	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif	OPD
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  Perumahan dan Permukiman Pemerintahan Umum						Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan dan Permukiman Kecamatan
		Kuangan	<i>Relaksasi Pajak</i>		PENGLOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4.999.999.999	Badan Pendapatan Daerah
		Pariwisata	<i>Pengetatan proses semua tempat hiburan dan wisata.</i>		PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	350.000.000	Dinas Pariwisata
		Kesehatan	<i>Memperluas cakupan UHC</i>		PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.563.443.710	Dinas Kesehatan
		Koperasi dan UKM	<i>Pemberian bantuan permodalan UMKM</i>		PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.450.800.000	Dinas Koperasi dan UKM
		Pangan	<i>Pertanian perkotaan (Urban Farming)</i>		PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	157.760.000	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
	Jaring Pengaman Sosial	Sosial	<i>Pemberian Bantuan Sosial</i>		PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	Dinas Sosial

## BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada Bab ini akan disampaikan penjabaran mengenai Indikator Kinerja Daerah. Adapun penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

### 9.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan Indikator Makro Pembangunan Kota Tangerang Selatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada Tabel 6.1 dan Tabel 6.2

Tabel 9.1. Indikator Makro Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

Indikator Makro	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target RKPD
		2021	2022
LPE	Persen	-1,01	5,81 - 6,08
Inflasi	Persen	0,14	3,29
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,48	7,94
Kemiskinan	Persen	2,29	2,05
IPM	Nilai	81,36	81,63

Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

Tabel 9.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target RKPD 2022
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,36	81,63
	Meningkatnya kualitas layanan dan akses pendidikan	Indeks Pendidikan	<b>79,56</b> (HLS =14,47, RLS=11,81)	80,07
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	AHH (Angka Harapan Hidup)	72,49 Tahun	72,5
	Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	Cukup Baik	Cukup Baik
	Meningkatkan daya saing	Indeks Pembangunan	n/a	53%

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target RKPD 2022
	pemuda	Pemuda		
	Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,58	93,58
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,85	73,85
Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur transportasi.		Indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar (IKLI)	n/a	5
	Meningkatnya kinerja transportasi dan jaringan jalan perkotaan	Rasio konektivitas Kota	n/a	0,59
		Kinerja Lalulintas/Transportasi Kota	n/a	0,54
Meningkatkan kualitas kota sebagai kota layak huni		Indeks kota layak huni	65	65-65,5
	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	n/a	49,95
		Pengurangan luas kawasan kumuh perkotaan	112,8 ha	94.44
		Cakupan Pengelolaan Sampah	72%	90%
		Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik	4,06%	4,26%
	Meningkatnya pencegahan dan Penanganan Bencana Alam dan Non Alam	indeks resiko bencana	Sedang	Rendah
Meningkatkan perekonomian dan daya saing ekonomi daerah		Indeks Daya Saing Daerah	n/a	Tinggi
		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-1,01%	5,81% - 6,08%
		Indeks Gini	0,37	0,37
		Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	97,71	97,95
	Meningkatnya pertumbuhan sektor ekonomi kreatif	Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif	n/a	8.161.320
	Meningkatnya Investasi	Persentase kenaikan investasi	3,96	4,42
	Meningkatnya produktifitas tenaga kerja	persentase produktifitas tenaga kerja per total output	78.148.225	82.292.178
		Produktivitas sektor perdagangan dan jasa	79.198.803	83.782.610
Mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	61,11	65
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B	BB
		Nilai Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)	3,4	3,6
		Opini BPK atas pemeriksaan Keuangan daerah	WTP	WTP
		Indek Persepsi Korupsi	80,46 (2019)	81
		Indeks Profesionalitas ASN	52	75
		Indeks SPBE	3,21 (baik)	Baik
		Indeks Kelembagaan	n/a	P-3
		Indeks Pelayanan Publik	n/a	3,87
		Indeks Rasa Aman	n/a	B (Aman)
		Indeks Demokrasi	n/a	Sedang

Sumber : Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021-2026

## 9.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah merupakan alat ukur spesifik yang secara kuantitatif dan atau kualitatif menjadi dampak yang dapat menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Daerah terutama dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan indikator seni budaya dan olahraga. Pada aspek pelayanan umum dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Pelayanan non Dasar dan Urusan Pilihan. Sedangkan aspek daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 6.2.

Tabel 9.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2022

ASPEK	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2022
<b>A.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>			
	Pertumbuhan PDRB	Persen	-1,01	5,81 - 6,08
	Laju Inflasi	Persen	0,14	3,29
	PDRB per kapita	Juta Rupiah	45,87	49,31
	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Persen	97,71	97,95
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	81,36	81,63
	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	11,81	11,86
	Angka usia harapan hidup	Tahun	72,47	72,52
	Angka partisipasi angkatan kerja	Persen	Perse	Perse
	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	8,48	8,48
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,4	81,4
	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	49,11	49,11
	Opini BPK	Status	WTP	WTP
	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	94,21	94,21
	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Persen	0,22%	0.20 - 0.21
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	16,20%	16,20%
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	7,89%	7.31 - 7.18
<b>B.</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>			
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Juta Rupiah	3.689.527	3.606.601

ASPEK	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2022	
	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	Persen	60,00%	
	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen	8,14	7,32	
<b>C.</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>				
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Penduduk Usia 7 - 12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	Persen	97,13%	103,87%
		Persentase Penduduk Usia 13 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	Persen	84,04%	88,49%
		Persentase Penduduk Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persen	51,38%	72,89%
		Persentase Penduduk Usia 7 - 18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C)	Persen	1,79%	1,79
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Sekolah yang terakreditasi A	Persen	67,17%	73,00%
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru SD dan SMP yang memenuhi kualifikasi S1 dan D4	Persen	98,50%	98,76%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio daya tampung Fasilitas Pelayanan Kesehatan PEMDA terhadap jumlah penduduk		515 tempat tidur	515
		Persentase Kunjungan Balita yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar	Persen	99,70%	97%
		persentase ketersediaan obat, vaksin & bhp sesuai standar	Persen	96%	91%
		Angka Kesakitan Menurut Penyakit Tertentu per 100 penduduk	Penduduk	8,26 per 100 penduduk	8 per 100 penduduk
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	rasio dokter per 100.000 penduduk	Penduduk	81,1 per 100.000 penduduk	82,5 per 100.000 penduduk
		Persentase Tenaga Kesehatan dilatih berdasarkan Kompetensinya	Persen	N/A	33%
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Pembinaan Fasilitas Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Yang Sesuai Standar	Persen	77%	80%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Posyandu Aktif	Persen	42%	45,00%

ASPEK	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	66,58% (1.066 km) / 1.601,053 km x 100%	71,70%
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi yang memiliki kompetensi	Persen	25% (250 org tenaga kerja konstruksi sudah tersertifikasi dari 1000 org kebutuhan tenaga kerja kostruksi)	30%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (permendagri 86/2017)	Persen	40,41% (162,28 Ha kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur Pengendalian banjir dari 401,6 Ha kawasan permukiman rawan banjir	43,56%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat (permendagri 86/2017)	Persen	13,55% (417,87 km drainase dalam kondisi baik / tidak tersumbat dari 3.083 Km Panjang Seluruh Drainase yang terdiri dari panjang jalan drainase kota 384kmx2 sisi dan dari rencana induk drainase tahun 2017 2315 km)	15,05%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	Persen	86,17%	100% (SPM Permendagri 100/2020)

ASPEK	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2022
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (permendagri 18/2020)	Persen	89,86%	100% (SPM Permendagri 100/2020)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Luas Wilayah Kota	Persen	4,06%	4%
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio kepatuhan IMB kab/kota (permendagri 18/2020)	Persen	49,80%	50,20%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang di tangani (permendagri 18/2020)	Persen	112,8 Ha	14,91%
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) (permendagri 18/2020)	Persen	Jumlah total RTLH = 2869 unit.	0,71%
			Jumlah total rumah setangsel = 330.983 unit	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Persen	11 Unit rumah korban bencana	100%
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1. Persentase lingkungan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (permendagri 18/2020)	Persen	Jumlah perumahan di tangsel 1073 perumahan. Jumlah perumahan yang PSU tercatat diaset 863 perumahan	60,86%
	2. rasio tempat pemakaman umum / satuan penduduk	Persen		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Orang	n/a	50 org
	persentase perda/perkada yang ditegakan	Persen	n/a	100%
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penanggulangan Bencana	Persen	100%	260.500
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa	318.449 jiwa	636.898

ASPEK	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2022
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa	189.000 jiwa	100%
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	10 menit	10 menit
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS jenis penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis yang tertangani	Persen	n/a	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial	Persen	n/a	20%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS anak terlantar yang tertangani	Persen	n/a	100%
	Persentase validasi data fakir miskin	Persen	n/a	100%
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	Persen	n/a	100%
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terkelola	Persen	n/a	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kepatuhan dan realisasi RTK	Dokumen	0	2 Dokumen
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi masyarakat dan kewirausahaan	Peserta	9.500 Peserta	11.000 Peserta
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Penempatan	5000 Penempatan	6000 Penempatan
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kasus	35 kasus	45
	2. Besaran Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	Kasus	27 Kasus	23
	3. Besaran perusahaan peserta pekerja/ buruh yang menjadi peserta program jamsostek	Persen	2%	0
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				

ASPEK	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD yang menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender	Persen	32,43%	37,84%
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100%	100%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan peningkatan kualitas keluarga	Persen	N/A	15%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Implementasi Sistem data gender dan anak	Persen	40,54%	45,95%
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga Perlindungan anak aktif	Persen	50%	55%
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100%	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH	Persen	94%	82,50%
PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Ketersediaan energi dan protein perkapita		2400 (kalori) dan 69 (protein)	2400 dan 69
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persen	73%	73%
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	0,00%	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase regulasi tentang pertanahan yang terbentuk	Persen	n/a	20%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota Tangerang Selatan	Persen	72%	90%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		55,51	49,95
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	55,51	49,95

ASPEK		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2022
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	55,51	49,95
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	55,51	49,95
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketaatan penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	50 perusahaan terawasi	16%
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Ketaatan penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	50 perusahaan terawasi	16%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	50 perusahaan terawasi	16%
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketaatan penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	50 perusahaan terawasi	16%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Anak usia 0-17 tahun kurang satu hari yang memiliki KIA	Persen	37,70%	49,76%
		Cakupan Penerbitan KTP	Persen	89,91%	91,55%
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Pasangan berakta Perkawinan	Persen	100%	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kelurahan dan Kecamatan Yang Terkoneksi Online Database Pelayanan Kependudukan	Kelurahan	54	54
		OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	OPD	9	9
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio akseptor KB	Persen	75,32%	75,60%
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet)	Persen	6,13%	6,10%

ASPEK	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2022
	need)			
	Kategori kampung KB	Kampung	7 Kategori Dasar, 5 Kategori Berkembang dan 3 kategori Mandiri Kampung KB	3 Kampung KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persen	50%	50%
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal yang melakukan pendidikan kependudukan	SSK	n/a	2 SSK
	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	Sektor	n/a	1 Sektor
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio PJU per 40 meter jalan kota dan lingkungan.	Persen	n/a	4.000
	Rasio konektivitas Kota/Cakupan pelayanan angkutan umum di perkotaan	Persen	0,59 (16X1/27)	0,59 (16 trayek)
	Kinerja lalu lintaskabupaten/kota		0,56 (LOS=C) hasil analisis andalalin pada ruas jalan se Kota Tangerang Selatan	0,54
	Persentase pemasangan Perlengkapan Jalan	Persen	n/a	2500 (lampu)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	100%	100%
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100 % (147/147)	100%

ASPEK		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah koperasi yang berkualitas	Persen	7 Koperasi Sehat (Berdasarkan keterlaksanaan RAT dan penilaian koperasi sehat)	15%
				1. Jumlah Koperasi yang melakukan RAT= 103 Koperasi	
				Persentase koperasi RAT: $103/765 \times 100 =$ 13,46%	
				2. Jumlah total aset Koperasi : Rp 370.076.506.6 38	
				3. Total Volume Usaha: Rp 462.595.633.3 06	
				4. SHU: 20.249.121.53 3	
				JUMLAH KOPERASI BERPRESTASI Tahun 2019= 3	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	persentase Usaha mikro yang berhasil dikembangkan menjadi wirausaha		n/a	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor	Investor	1485 Investor	1560 Investor
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase peningkatan calon investor yang menerima informasi potensi investasi daerah	Persen	100%	100%
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan sesuai SOP	Persen	58%	60%
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Presentase Pengendalian terhadap Penanaman Modal	Persen	0, Tahun 2021 baru dilakukan penarikan data	20%
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Presentase potensi investasi yang terintegrasi dalam sistem informasi penanaman modal	Persen	0	15%

ASPEK	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2022
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan Pembinaan Kepemudaan	Persen		1776
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	Persen		100%
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Anggota Pramuka yang aktif	Persen		2%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100%	100%
	2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100%	100%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	40%	40%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase paguyuban warga etnis yang dibina	Persen	0,50%	1%
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase lembaga kesenian tradisional yang dibina	Persen	10,00%	40%
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persen	32	2
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat tangsel	Persen	7,43%	8%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase unit kerja (OPD,UPT, Kelurahan) yang mengelola arsip secara baku	Persen	76,42%	80,49%
URUSAN PILIHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				

ASPEK	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2022
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	277,4 ton	277,4 ton
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	277,4 ton	277,4 ton
PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	277,4 ton	277,4 ton
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	277,4 ton	277,4 ton
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	277,4 ton	277,4 ton
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Tingkat hunian akomodasi	Persen	18%	15%
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PAD Sektor Pariwisata	Miliar Rupiah	248.556.780.636	15%
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Cakupan ekonomi kreatif yang memiliki omzet $\geq$ 120 jt	Persen	44%	6%
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Tenaga Kerja Pariwisata tersertifikasi	Persen	14,20%	1,40%
	Persentase Tenaga Kerja ekonomi kreatif yang tersertifikasi	Persen	n/a	5%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Persen	$15 / 75 = 20\%$	40%
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	<i>Tidak ada wabah 5 tahun ke belakang</i>	100%
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok petani	Persen	$15 / 75 = 20\%$	40%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan rekomendasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persen	0	80%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Persentase pasar dan sarana distribusi lainnya sesuai	Persen	0	75%

ASPEK	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2022
PERDAGANGAN	standar(SNI)			
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Persen	100%	100%
	Persentase pertumbuhan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	Persen	0	1
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah peningkatan aktivitas produk ekspor unggulan IKM	Produk	300 Produk	40
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	persentase UTTP yang bertanda tera sah yang berlaku	Persen	0	100%
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah produk dalam negeri yang diperdagangkan	Produk	300 produk	30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dokumen	1	3
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase peningkatan permohonan perizinan IUI	Persen	2,26%	4%
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase ketersediaan informasi industri	Persen	25%	30%
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH				
	Cakupan Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan Setda	Persen	100%	100%
	Cakupan Administrasi keuangan Setda dan Operasional Kepala Daerah	Persen	100%	100%
	Cakupan perumusan kebijakan peningkatan Penataan Organisasi	Persen	100%	100%
	Cakupan Monitoring Kebijakan Implementasi RB	Persen	100%	100%
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Cakupan perumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	Persen	n/a	100%
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan		Sangat Tinggi (skor/predikat)	sangat tinggi
	Cakupan pelaporan LPPD dan SPM sesuai ketentuan	Dokumen	2 dokumen	2
	Ketepatan waktu penyampaian LPPD dan SPM		tepat waktu	tepat waktu
	Persentase kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	Persen	75%	80%
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Terkendalnya inflasi daerah pada rentang 2%-4%	Persen	n/a	2%-4%
	Persentase efisiensi pengadaan barang dan jasa	Persen	n/a	100%

ASPEK	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2022
	Rasio nilai pengadaan melalui e-katalog lokal terhadap nilai pengadaan	Persen	n/a	100%
	Cakupan perumusan kebijakan peningkatan kinerja pembangunan daerah	Persen	n/a	100%
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>				
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD (propempera, anggaran, pengawasan)	Persen	100%	100%
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>PERENCANAAN</b>				
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat konsistensi antara dokumen	Persen	97%	95%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Aspirasi Masyarakat melalui Musrenbang dan reses yang telah masuk dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan oleh PD	Persen	87%	75%
	Persentase capaian tahapan KPBU sesuai rencana	Persen	50%	60%
	Persentase data Pembangunan	Persen	50%	60%
<b>KEUANGAN</b>				
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tersedianya Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	n/a	100%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Manajemen Aset	Persen	n/a	100%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan Pajak Daerah	Persen	-3%	5-10%
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>KEPEGAWAIAN</b>				
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Keterisian formasi CPNS dan calon PPPK dalam penerimaan CPNS dan Calon PPPK	Persen	99%	100%
	Persentase peningkatan ASN yang memperoleh rekomendasi tugas belajar/ijin belajar	Persen	n/a	100%
	Persentase penerapan regulasi daerah dalam penghargaan kinerja ASN (penyusunan, ujicoba, evaluasi dan implementasi)	Persen	n/a	50,00%
	Rasio Assesment pegawai	Persen	n/a	1%
	Persentase keterisian jabatan PNS	Persen	n/a	100%
	Persentase ASN dengan dokumentasi data kepegawaian lengkap	Persen	33%	50%
	Persentase Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin	Persen	n/a	100%

ASPEK	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2022
	Persentase OPD yang telah menyusun dokumen HCDP (AKD/APKP)	Persen	n/a	21%
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang menduduki jabatan telah memiliki Kompetensi Sesuai pemenuhan kompetensi dan kualifikasi jabatannya	Persen	n/a	21%
	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi teknis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya	Persen	n/a	5%
<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>				
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	0%	100%
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	Persen	0%	100%
<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>				
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah SKPD yang predikat sakin A	OPD	n/a	15
	Level Implementasi SPIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	Level	n/a	Level 3
	Level Implementasi SPIP SKPD	Level	n/a	Level 4
	Opini BPK	WTP	n/a	WTP
	Prosentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persen	n/a	90%
	Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persen	n/a	100%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Prosentase Pejabat Yang melaporkan LHKPN	Persen	n/a	100%
	Prosentase ASN yang melaporkan LHKASN	Persen	n/a	100%
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				
<b>KECAMATAN</b>				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai ketentuan	Persen	100%	100%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rasio kontinuitas program pemberdayaan masyarakat	Persen	100%	100%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rasio penanganan awal gangguan trantib ditangani	Persen	100%	100%

ASPEK		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL RPJMD	TARGET KINERJA TAHUN 2022
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum	Persen	100%	100%
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kelurahan yang masyarakatnya menerima penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	n/a	18,52%
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya kepada masyarakat	Persen	n/a	20%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	Persen	n/a	20%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan Kelurahan yang masyarakatnya mengikuti pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persen	n/a	18,52%
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase laporan potensi konflik yang ditangani/ditindak lanjuti	Persen	n/a	100%

## BAB VII PENUTUP

RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2022 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD tahun 2021-2026 serta arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD periode kelima. Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ, yang mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen RKPD 2022, selain berpedoman pada RPJPD 2005-2025 juga mempertimbangkan Visi, Misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepada Daerah serentak tahun 2020 lalu, serta memperhatikan RKP tahun 2022.

RKPD ini menjadi bahan penyempurnaan perangkat daerah dalam perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam Renja Perangkat Daerah tahun 2022.

Dalam rangka menjamin substansi dokumen RKPD yang mendorong terlaksananya kegiatan-kegiatan pembangunan dalam mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka telah dilaksanakan hal-hal yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Tangerang Selatan, 07 Juli 2021

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,



*[Handwritten Signature]*

**BENYAMIN DAVNIE**